PERANG DINASTI PILKADA SERENTAK

MACETNYA PERKARA KORUPSI KEMENPORA

TEMPO

ENAK DIBACA DAN PERLU

OUTLOOK EKONOMI 2021

SAATNYA BERUBAH

Pandemi Covid-19 seharusnya jadi momentum mendorong ekonomi hijau. Sektor bisnis mana yang paling siap?



00042
9 770126 427302
7-13 DESEMBER 2020
RP 45.000
WWW.MAJALAH.TEMPO.CO
MAJALAH BERITA MINGGUAN
ISSN: 0126 - 4273

Hak Jawab Yasmine Rubaya



Surat - MBM

Hak Jawab Yasmine Rubaya

Majalah *Tempo* edisi 4 Juli 2020 halaman 11 memuat artikel berjudul "Moncong Pistol di Kepala Babe". Berita tersebut memuat hal-hal berikut ini:

1. "Menurut Kurnia, anggota staf Maya bernama Yasmine Rubaya lalu menunjukkan surat pernyataan yang telah ditandatangani Donny. 'Saya *dikatain* makan duit haram,' Kurnia bercerita."
2. "Penyekapan terhadap keluarga Donny terjadi hingga esok harinya, Kamis, 16 Januari. Menurut Kurnia, selama penyekapan itu, Yasmin dan Bonar berteriak-teriak serta mengancam membunuh mereka."
3. "Polisi meminta Yasmine *cs* serta Donny dan Kurnia datang ke kantor polsek. Awalnya Yasmine cs menolak."

Kami berkeberatan terhadap pemberitaan-pemberitaan tersebut. Sebab, pemberitaan tersebut mengandung fakta hukum yang tidak benar, bersifat sepihak, dan memojokkan klien kami sehingga telah melanggar asas praduga tidak bersalah. Berikut ini klarifikasi kami:

1. Poin 1 tidak benar dan klien kami tidak pernah mengeluarkan pernyataan "makan uang haram".

2. Poin 2 tidak benar dan klien kami tidak pernah berteriak-teriak serta mengancam akan membunuh.
3. Poin 3 tidak benar dan klien kami pada saat itu sedang berada di Karawang bersama Ippiandy Mahmud untuk bertemu dengan notaris Rafeldi.

Guna berimbangnya pemberitaan oleh media, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pers, kami meminta media *online* Tempo memuat hak jawab dan mengklarifikasi kesesatan berita tersebut.

CAESARIO DAVID KALIGIS S.H, M.H
KALIGIS & ASSOCIATES

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjQ0OjQ3Il0

Keterangan tersebut berasal dari banyak narasumber.

Ekonomi Hijau

Dunia kembali bergerak ke arah yang lebih baik. Pandemi membuat banyak negara menengok kembali pembangunan hijau. Inggris dan Cina mengumumkan akan mencapai target nol emisi pada 2050 dan 2060. Perkembangan ini menggembirakan karena krisis iklim memang tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Ia sudah nyata di depan mata kita.

Perserikatan Bangsa-Bangsa baru saja mengumumkan bahwa tahun ini sebagai tahun terpanas. Padahal sejak Maret dunia berhenti berproduksi. Pabrik-pabrik berhenti beroperasi. Artinya, gas rumah kaca di atmosfer tetap menebal. Atau gas rumah kaca menumpuk sebelum masa pandemi sehingga atmosfer kita penuh oleh jelaga yang membuat panas matahari terpantul kembali ke planet ini.

Gas rumah kaca berasal dari produksi emisi aktivitas manusia, dari energi tak terbarukan hingga deforestasi. Maka, untuk mencegah krisis iklim kian dalam, saatnya kita lebih ramah kepada bumi dengan membuat kebijakan ramah lingkungan, seperti yang dibuat Inggris dan Cina. Bencana yang dipicu perubahan iklim sudah sering terjadi: banjir, longsor, puting beliung, dan badai.

Sudah saatnya kita menghentikan industri ekstraktif, yakni investasi yang mengeruk kekayaan alam secara langsung. Sudah saatnya ekonomi kita lebih banyak mengolah produk yang tak membahayakan lingkungan. Sebagai orang awam, saya tidak tahu apakah proyek strategis nasional yang diluncurkan Presiden Joko Widodo sudah memenuhi asas itu atau justru sebaliknya.

Semoga kita segera sadar dan bumi terlindungi dari usaha-usaha yang menyakitinya!

Aditya Hermawan
Yogyakarta

Perubahan Iklim

Anak dan Saudara dalam Pemilu.



- **Nepotisme dilakukan oleh elite PPP dengan mencalonkan anak dan saudara kandung. .**
- **PPP disebut akan menjadi partai politik keluarga. 21657**
- **Kontroversi serupa terjadi di partai lain. .**

PRESIDEN Joko Widodo dianggap hendak membangun dinasti politik lewat pencalonan anak dan menantunya dalam pemilihan kepala daerah 2020. Bobby Nasution, menantunya, diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pilkada di Medan sebagai calon wali kota. Bobby dipasangkan dengan Aulia Rachman, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Medan dari Partai Gerakan Indonesia Raya.

Pasangan ini diusung oleh koalisi partai politik, yakni PDIP, Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura. Sementara itu, di Solo, Jawa Tengah, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, akan bertarung dalam pemilihan wali kota.
Gibran berpasangan dengan Teguh Prakosa sebagai calon wakil wali kota.
Keduanya mendapat surat rekomendasi dari PDIP pada Jumat, 17 Agustus 2020.
Pasangan ini didukung oleh koalisi gemuk Gerindra, Golkar, PAN, dan Partai Solidaritas Indonesia.

Pencalonan anak, menantu, dan kerabat keluarga untuk mengisi jabatan tertentu bukan baru ini saja terjadi di Indonesia. Konteksnya pun tak melulu mengincar posisi kepala daerah. Pada masa pencalonan anggota DPR untuk Pemilihan Umum 1987, misalnya, isu nepotisme berembus kencang karena dianggap menjadi parasit demokrasi. *Tempo* menggambarkan situasi ini dalam laporan berjudul "Dari Anak Naro hingga Anak Bung*"*, yang terbit pada 4 Oktober 1987.

Menteri Dalam Negeri saat itu, Soepardjo Rustam, menerima daftar calon anggota DPRD yang berisi 2.216 nama. Padahal kursi yang tersedia di DPR hanya 400. Di antara nama-nama itu, mengemuka nama yang merupakan anak, saudara kandung, menantu, dan kerabat dekat lain. Yang paling kentara adalah calon-calon dari PPP yang diusung oleh H.J. Naro.

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjQ0OjU4Il0 Naro tak malu-malu mengusung anaknya, Hussein Naro, sebagai calon jadi dari Jawa Barat. Ia juga mengusung adiknya, Wibowo Naro, dari Sumatera Barat; dan Yulinar Naro, adiknya juga, dari DKI Jakarta. Karena hal ini, Naro diberi julukan Ampi, yang berarti anak, menantu, dan *pamili*. Naro dituduh melakukan praktik nepotisme tanpa tedeng aling-aling karena memasukkan nama-nama itu tanpa mempedulikan aspirasi partai di cabang ataupun wilayah.

Nepotisme ini dilakukan Naro di tengah-tengah konfliknya dengan Soebardji di tubuh PPP. Buntut konflik tersebut, ia menghapus nama-nama "musuh"-nya dari kubu Soebardji, yaitu Syarifuddin Harahap, Nuddin Lubis, dan Soebardji sendiri. Ketiga nama tersebut merupakan inkumben, pemenang Pemilu 1982, dalam pertarungan di Sumatera Utara. "PPP akan menjadi partai keluarga," kata Ali Imron Kadir, politikus PPP.

Soebardji meradang atas keputusan Naro ini. Menurut dia, yang merupakan ketua fraksi, kelompok Naro selama ini tidak aktif sebagai anggota DPR. Ia mengatakan tahu benar siapa saja yang aktif dalam penyusunan undang-undang dan siapa saja yang hanya menjadi loyalis Naro tanpa berkontribusi. "Mereka tidak ikut membuat puluhan undang-undang tapi malah mereka yang diterima Depdagri, ini kan aneh," ujarnya.

Sementara itu, politikus Senayan yang lain, Ridwan Saidi, mengatakan tipis peluang PPP untuk menang besar dalam pemilu nanti. Syahwat politik Naro ia tuding sebagai penyebabnya. "Pencalonan itu harus disusun dengan taktik. Jika mengutamakan taktik, ia harus bersedia mengorbankan kepentingan pribadinya," katanya. Tapi nyatanya Naro terjebak dalam pusaran nepotisme yang akan ikut menenggelamkan partai. "Naro akan jatuh," ujarnya.

Kontroversi juga muncul di tubuh Partai Demokrasi Indonesia karena adanya pencalonan anak-anak Bung Karno. Guruh Sukarno muncul sebagai calon dari DKI Jakarta, Megawati dari Jawa Tengah. Di Golkar, regenerasi dari anak-anak pejabat juga terjadi. Salah satu yang paling kentara adalah munculnya Dewi Ria Nasution, yang baru berusia 24 tahun, anak Gubernur Sumatera Utara Kaharuddin Nasution.

Menurut Ridwan, regenerasi "karbitan" ini tak sehat. Sebab, regenerasi yang dilakukan sekarang bersandar pada reproduksi biologis, bukan sebagai hasil persaingan kemampuan.

Konflik PPP Pemilu Orde Baru Politikus | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | DPR DPR

Editorial: Mengapa Covid-19 Membuat Ekonomi Hijau Semakin Urgent dalam Outlook Ekonomi 2021



Momentum Ekonomi Hijau

TAHUN segera berganti. Luka dalam setiap sendi kehidupan akibat pandemi Covid-19 mungkin belum akan mengering setahun ke depan. Ketika ekonomi 2021 diprediksi mulai menggeliat, ada pertanyaan terpenting yang mendesak dijawab: bagaimana agar ekonomi tetap tumbuh dalam jangka panjang tanpa memicu wabah serupa di masa depan.

Kita tahu wabah Covid-19 dipicu virus SARS-CoV-2 yang berasal dari kelelawar hutan. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa kekeliruan praktik ekonomi masa kini bisa berbalik mematikan umat manusia. Hasrat memupuk kemakmuran sebesar-besarnya, dengan pembangunan infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam secara agresif, terus menggerus habitat satwa liar. Praktik ini yang membuka lebar-lebar pintu penularan virus dari hewan ke manusia.

Dengan 700-an ribu virus pada mamalia dan burung yang berpotensi menjadi infeksi baru manusia, para ilmuwan penyakit zoonosis memperingatkan bahwa

pandemi tahun ini bisa jadi bukan pukulan balik terakhir yang mematikan. Sebelum ada pandemi baru pun alam akan memukul lebih cepat dengan berbagai bencana lingkungan jika manusia tak mengerem laju kegiatan ekonomi yang merusak bumi.

Maka, jelas, pandemi yang melahirkan krisis kesehatan masyarakat dan resesi ekonomi sejagat kali ini semestinya menjadi momentum memperbaiki masa depan dunia. Kita membutuhkan politik-ekonomi baru yang lebih berdamai dengan bumi. Dalam bahasa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, semua negara perlu mengatur ulang ekonominya dengan mempertimbangkan aksi-aksi pro-iklim. Berbicara dalam forum World Conference of Speakers of Parliament pada 19 Agustus lalu, Guterres berseru, tidak ada yang lebih penting dilakukan sekarang ini selain menangani krisis iklim seiring dengan mengatasi Covid-19.

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjQ1OjExIl0
Indonesia semestinya bisa menjadi aktor utama untuk mewujudkan visi itu. Hutan hujan tropis di negeri ini adalah yang terbesar ketiga di dunia. Dua pertiga wilayahnya juga berupa lautan yang mahakaya. Dengan meratifikasi Perjanjian Paris pada 2016, Indonesia sebenarnya sudah mengayunkan langkah menuju ke sana. Sejumlah proyek dan pendanaan hijau telah bergulir untuk memenuhi komitmen Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen secara swadaya hingga 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030.

Namun, belakangan, visi pemerintah untuk menepati janji itu kian buram. Alih-alih mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, kebijakan pemerintah kian kencang melangkah mundur ke zaman batu. Kita makin kecanduan mengeksploitasi sumber daya alam yang tak tergantikan. Presiden Joko Widodo tampaknya terjebak pada teori-teori pengembangan ekonomi yang usang.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada awal Oktober lalu adalah indikasi kekeliruan arah yang dipilih pemerintah. Undang-undang sapu jagat alias *omnibus law* ini memudahkan konversi hutan untuk kepentingan industrialisasi. Insentif yang lebih besar justru mengalir ke pengusaha pertambangan. Sedangkan berbagai kewajiban lingkungan yang sebelumnya kudu dipenuhi pelaku usaha justru dihapuskan. Pasal-pasal yang mengancam hutan itu jelas mengabaikan fakta bahwa deforestasi adalah penyumbang utama kerusakan bumi ini.

Tendensi serupa tampak dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diteken Jokowi pada 17 November lalu. Proyek-proyek utama yang telah diseleksi sesuai dengan

rencana pembangunan jangka menengah tersebut didominasi oleh program-program berbasis lahan yang mengancam lingkungan hidup. Program ketenagalistrikan, misalnya, masih mengandalkan pembangunan pembangkit listrik batu bara, yang kini makin ditinggalkan banyak negara di dunia.

Presiden Joko Widodo harus menghentikan langkahnya yang terus menggeber pembangunan tanpa memperhatikan keseimbangan terhadap alam. Di masa pandemi ini, pemerintah perlu memberi porsi lebih besar terhadap prinsip ekonomi hijau. Program pemulihan ekonomi nasional yang akan berlanjut tahun depan seharusnya dirancang sejalan dengan misi pembangunan rendah karbon. Langkah ini telah dilakukan Selandia Baru, Singapura, India, Malaysia, Korea Selatan, Cina, dan Australia. Negara-negara itu menjadikan belanja penanganan dampak Covid-19 sebagai investasi negara ke proyek-proyek infrastruktur ramah lingkungan.

Jokowi mesti ingat, janjinya mengurangi emisi gas rumah kaca pada 2030 bukan semata-mata untuk rakyat Indonesia, tapi buat seluruh umat manusia. Dia berutang kepada generasi masa depan yang juga berhak hidup di bumi yang sehat.

Covid-19 Outlook Ekonomi

Editorial: Akhir Politik Dinasti di Pilkada



Akhiri Politik Dinasti

SECARA hukum, tak ada yang salah dengan politik dinasti. Undang-Undang Pemilihan Umum tak melarang seorang kerabat pejabat negara mencalonkan diri sebagai kandidat gubernur, bupati, atau wali kota. Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan bahwa larangan bagi kerabat elite politik untuk maju dalam pemilihan kepala daerah bertentangan dengan konstitusi.

Yang dilanggar dalam praktik politik dinasti adalah etika publik. Dengan akses terhadap kekuasaan, seorang kerabat pejabat memiliki privilese untuk dapat memenangi pemilihan dibandingkan dengan kandidat lain. Sang pejabat, misalnya, dapat membuat program untuk memenangkan kerabatnya. Seorang pejabat dapat pula memobilisasi aparatur negara di bawahnya guna membantu pemenangan anggota keluarga yang berlaga.

Politik dinasti juga memperkecil kemungkinan kandidat di luar kelompok atau keluarganya masuk ke lingkar kekuasaan. Ditambah koneksi yang kuat dengan partai politik, politik kekerabatan ini menjadikan lingkup rekrutmen politik menjadi terbatas. Di sisi lain, penguasaan struktur partai oleh elite politik ini pada akhirnya membuat partai seperti kartel yang serba tertutup.

Dari 1.000 lebih kandidat yang bakal bertarung di 270 daerah dalam pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020, setidaknya 124 calon terindikasi merupakan kerabat elite politik. Yang sudah ramai dibicarakan adalah anak dan mantu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming yang akan berlaga di Solo dan Bobby Nasution di Medan. Ada pula anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, yang maju sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan. Di daerah ini, keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, juga menjadi kontestan. Tiga kerabat dari tiga menteri lain di pemerintahan Jokowi juga ikut bertanding di daerah lain.

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjQ1OjE1Il0
Membiarkan anak, mantu, dan kerabatnya maju dalam pilkada, para pejabat sesungguhnya tengah membiarkan pertarungan berpotensi tidak adil. Tentu sang pejabat bisa membantah tudingan bahwa ia telah menggunakan kekuasaan untuk membela kerabat yang bertarung. Jikapun benar ia tidak melakukannya, tak ada yang bisa menjamin aparatur negara di bawah pejabat tersebut bisa bersikap adil.

Tengoklah yang terjadi di Solo dan Medan. Memang belum ada bukti Jokowi memerintahkan anak buahnya untuk memenangkan kedua kandidat. Tapi, di lapangan, banyak aparatur negara bergerak. Di Solo, staf Jokowi dikabarkan turut membantu Gibran. Sedangkan di Medan, ada lurah yang mengarahkan warganya untuk memilih Bobby. Lurah itu bergerak karena diperintahkan camat dan personel kepolisian daerah. Polisi juga diduga menggalang dukungan dari sejumlah kelompok masyarakat untuk mendukung Bobby.

Peraturan yang mengharuskan aparat netral bukan tidak ada. Tapi simbiosis aparat dengan para politikus membuat aturan yang terang-benderang tersebut menjadi macan kertas. Para politikus terus memelihara budaya patrimonial ala Orde Baru: mengkooptasi aparatur untuk memenangi pemilihan kepala daerah.

Kondisi ini diperburuk oleh budaya "asal bapak senang". Aparatur kerap menyediakan dirinya untuk dimanfaatkan elite politik karena menganggap hal tersebut akan menguntungkan kariernya. Dua sisi hubungan politikus dan aparat inilah yang mendorong demokrasi masuk jurang.

Sejumlah studi menunjukkan dampak buruk politik kekerabatan ini. Di Indonesia, seperti temuan Setyaningrum dan Saragih (2019), politik dinasti berdampak pada buruknya kinerja pemerintah daerah. Politik dinasti cenderung menghasilkan kebijakan yang menguntungkan segelintir orang. Di Filipina dan Jepang, politik kekerabatan menyebabkan kemiskinan meningkat.

Editorial: Jangan Lengah Hadapi Pandemi Covid-19 -



Karena Covid-19 Tak Bisa Diperintah

RASANYA baru kemarin kita mendengar instruksi Presiden Joko Widodo kepada jajaran pemerintahannya untuk menekan angka penularan virus *corona*. Pada pertengahan September lalu, masih terngiang di telinga kita bagaimana Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengendalikan wabah di sembilan daerah "dalam dua pekan".

Sayangnya, wabah Covid-19 bukan prajurit, yang bisa tunduk kepada perintah atasan. Dua pekan berlalu dan sekarang kita semua bergidik melihat kurva penderita Covid-19 di Indonesia yang terus naik kian tajam. Pada Kamis pekan lalu, jumlah warga yang positif terkena Covid-19 tercatat 8.369 orang. Jumlah ini memecahkan rekor penularan harian tertinggi sejak Maret. Angka ini juga naik dua setengah kali lipat dibanding jumlah penularan satu bulan sebelumnya.

Di banyak rumah sakit, kita mendengar kabar pilu soal ruang gawat darurat yang kian penuh dan ketersediaan ventilator yang menipis. Sejumlah pasien Covid-19 meninggal karena terlambat mendapat akses ventilator. Dengan sekitar 70 ribu kasus aktif di seluruh Indonesia sampai akhir pekan lalu, tekanan terhadap sistem layanan kesehatan tentu amat berat. Kondisi ini amat mengkhawatirkan.

Apalagi pekan depan kita akan mengikuti pemilihan kepala daerah serentak dan mengalami libur panjang Natal serta tahun baru. Tiga kegiatan itu bakal banyak diwarnai kerumunan. Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat saja risiko tertular masih ada, apalagi tanpa protokol kesehatan sama sekali.

Sejak awal, Badan Kesehatan Dunia (WHO) sudah menganjurkan cara terbaik menghadapi wabah adalah menerapkan sistem cegah, deteksi, dan respons alias 3T (*test, tracing and treatment*). Pengetahuan ini datang dari pengalaman panjang dunia menghadapi wabah sejak flu Spanyol pada 1918 hingga polio, ebola, SARS, MERS-Cov, dan flu burung.

Masalahnya, pemerintah tak pernah benar-benar serius mengikuti saran ini. Alih-alih mencari solusi dengan pendekatan kesehatan berbasis sains, pemerintah malah condong memandang Covid-19 sebagai ancaman terhadap stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi. Karena itulah Presiden Jokowi menyerahkan kendali penanganan wabah kepada ekonom, politikus, dan tentara, bukan otoritas medis. Walhasil, setiap usul kebijakan pengendalian virus *corona* selalu dinilai dari apa dampak dan gangguannya terhadap perekonomian, bukan pada efektivitasnya mengekang penularan.

Ditambah, harus diakui, kapasitas aparatur pemerintah melakukan deteksi dan penelusuran riwayat kontak (*tracing*) belum sepenuhnya memadai. Sistem pendataan pasien juga masih amburadul. Padahal kedua hal tersebut merupakan faktor krusial dalam pendekatan medis dan sains. Tidak mengherankan, sembilan bulan berlalu, wabah justru makin sulit dikendalikan.

Kondisi ini diperparah oleh sikap tidak bertanggung jawab sejumlah elite. Mereka kerap memperlihatkan atau mendiamkan pelanggaran atas protokol kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, misalnya, nekat menemui Rizieq Syihab di rumahnya padahal pentolan Front Pembela Islam itu baru saja berinteraksi dengan puluhan ribu pendukungnya. Di daerah lain, elite lokal mengabaikan protokol kesehatan dalam kampanye dan membahayakan massa. Akibatnya, sejumlah kota dan kabupaten yang menyelenggarakan pilkada berubah statusnya menjadi zona merah Covid-19.

Kini pilihan Presiden Jokowi tak banyak lagi. Dia bisa belajar dari pengalaman sembilan bulan terakhir dan berbenah atau dia bisa bertahan dengan cara lama yang terbukti gagal. Satu hal yang pasti, Covid-19 bukan anak buah yang bisa enyah hanya dengan perintah.

Editorial: Jauhkan Tentara dari Penanganan Teror Sigi



Kelompok MIT Bukan Urusan Prajurit

ENTAH manusia jenis apa anggota kelompok yang menamakan diri Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Mereka membunuhi petani di pinggiran hutan Sulawesi Selatan secara acak, tanpa memandang suku ataupun agama korbannya.

Menurut catatan Institut Mosintiwu, organisasi kemasyarakatan untuk perdamaian di Poso dan sekitarnya, MIT setidaknya empat kali membunuh secara keji di wilayah itu sepanjang Januari-November 2020. Korbannya beragama Islam, Kristen, dan Hindu. Persamaannya, mereka semua petani.

Kebiadaban terakhir kelompok MIT yang, menurut kepolisian, dipimpin Ali Ahmad alias Ali Kalora dilakukan pada 27 November. Kelompok itu membakar tujuh rumah—satu di antaranya biasa digunakan untuk tempat beribadah jemaat Gereja Bala Keselamatan. Empat orang tewas dalam kekerasan ini.

MIT disebut-sebut telah bergerilya selama delapan tahun di hutan dan perdesaan Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi yang saling berbatasan. Konflik berdarah antar-penganut agama membakar kawasan itu, terutama Poso dan Sigi, pada 1998-2001. Masyarakat umum pun segera

mengaitkan kejahatan MIT pada 27 November dengan sejarah kelam tersebut. Namun, melihat hasil riset Institut Mosintiwu, kejahatan kelompok itu kelihatannya tidak menyasar kepada satu kelompok agama tertentu.

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjQ1OjIwIl0
Tetap eksisnya MIT selama bertahun-tahun di wilayah itu sebenarnya cukup mengherankan. Sebab, sejak Januari 2016, pemerintah telah mengerahkan anggota Tentara Nasional Indonesia bersama kepolisian dalam Satuan Tugas Tinombala. Anggotanya terdiri atas 3.000-an personel Brigade Mobil Kepolisian, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Marinir, Raider, dan Komando Pasukan Khusus.

Satgas Tinombala menembak mati Santoso, pemimpin MIT sebelum Ali Kora, pada 2016. Aparat keamanan mengklaim, setelah tewasnya Santoso, anggota MIT makin berkurang. Meski begitu, Operasi Tinombala justru terus diperpanjang. Menurut catatan Institut Mosintuwu, penduduk sering kali menjadi korban salah tembak aparat keamanan. Setidaknya tiga petani menjadi korban sepanjang 2020 ini.

Masyarakat dalam posisi terjepit. Mereka takut dicap sebagai “banpol” atau bantuan polisi oleh kelompok MIT. Pada saat yang sama, mereka khawatir dituduh aparat keamanan sebagai bagian dari MIT. Walhasil, mereka meninggalkan tempat tinggal dan lahan yang mereka garap. Merekalah korban terbesar dari kejahatan kelompok MIT, yang diikuti pengerahan besar-besaran aparat keamanan.

Pemerintah sebaiknya mengevaluasi pengerahan pasukan ke Sulawesi Tengah itu. Apalagi setelah kegagalan mereka dalam melindungi penduduk, yang ditandai oleh serangan demi serangan oleh kelompok MIT sepanjang tahun ini. Penambahan jumlah tentara ke wilayah itu sebaiknya tidak diteruskan.

Pelibatan tentara dalam penanganan terorisme semestinya belum bisa sepenuhnya dijalankan. Undang-Undang TNI memang mengatur adanya operasi militer selain perang, yang bisa ditafsirkan termasuk antiterorisme. Operasi semacam itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Antiterorisme juga membuka keterlibatan tentara dalam perang melawan terorisme. Namun rancangan peraturan presiden untuk melaksanakannya kini sedang dibahas di Dewan.

Walhasil, tentara semestinya hanya bisa beroperasi di bawah komando kepolisian. Keberadaan pasukan tentara pun semestinya tidak tetap—seperti yang terjadi dalam Operasi Tinombala—melainkan bergantung pada situasi di lapangan. Artinya, pengerahan tentara hanya bisa dilakukan pada situasi ketika kepolisian berpotensi tak lagi mampu menanganinya.

Serangkaian pembunuhan petani di Sigi oleh kelompok MIT belum masuk kategori itu. Karena itu, kepolisian seharusnya berusaha lebih keras menangkap para pelaku pembunuhan.

Terorisme

Mengapa Ekonomi Hijau Jadi Jawaban Setelah Bencana Covid-19



ilustrasi

- **Teka-teki vaksin dan kelas menengah-atas akan jadi kunci nasib ekonomi 2021.**

  .

- **Pandemi jadi pelajaran pentingnya ekonomi hijau. 21657**

- **Inisiatif bisnis berkelanjutan berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang mengejar pertumbuhan ekonomi cepat. .**

UNTUK urusan vaksin Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), semua elemen gampang bersepakat. Dari ekonom, pengusaha, pemerintah, sampai bank sentral sepaham: vaksin akan menjadi pengubah permainan pada 2021.

Urut-urutannya begini. Vaksin akan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa virus sudah bisa dikendalikan. Masyarakat kelas menengah-atas mulai membuka pundi-pundinya untuk berbelanja. Permintaan yang meningkat akan menggerakkan pengusaha untuk menambah produksi. Mereka membutuhkan modal. Kredit bank pun keluar. Akhirnya, semua kembali berputar dengan normal.

Dari rantai tersebut, rupanya kelas menengah-atas adalah kunci bagi Indonesia. “Kepercayaan konsumen kelas menengah-atas di Indonesia adalah komponen penting bagi dunia bisnis untuk bertahan dan melanjutkan pemulihan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Bloomberg Economy Forum, 18 November lalu.

Data komponen pertumbuhan ekonomi mendukung argumentasi Sri Mulyani. Konsumsi domestik mendominasi komposisi produk domestik bruto (PDB) nasional dengan kontribusi mencapai 58 persen. Konsumsi unggul atas investasi yang berkontribusi 32 persen dan perdagangan yang hanya menyumbang 18 persen terhadap PDB.

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjQ3OjQ2Il0



Lahan yang terbakar di Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, pada September 2019/ ANTARA/Nathan

Dari porsi konsumsi terhadap PDB itu, pembelanja terbesar berasal dari kelompok atas dan menengah. Sebanyak 40 persen penduduk termiskin hanya menyumbang 17,7 persen belanja. Postur konsumsi domestik inilah yang menyebabkan pandemi memukul amat kencang ekonomi kita.

Pendapatan kelompok menengah-bawah turun sehingga daya beli mereka anjlok —walaupun sudah mendapat guyuran bantuan sosial tunai dan nontunai. Sementara itu, kelompok menengah-atas menahan belanja. Indikatornya, menurut Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia, dana tabungan di perbankan meningkat. “Ini indikasi belanja yang ditahan,” ujar Faisal, pertengahan November lalu.

Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan, dana pihak ketiga di perbankan pada September 2020 berlimpah, mencapai Rp 6.651 triliun, atau tumbuh 12,88 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, bank tidak bisa menyalurkan kredit. Rasio pinjaman terhadap tabungan di bulan itu pun anjlok menjadi 83,16 persen dari sebelumnya 85,11 persen pada Agustus 2020.

OJK dan para bankir yang semula masih yakin kredit bakal tumbuh 5 persen pada 2020 akhirnya merevisi optimisme tersebut menjadi 0-1 persen saja. “Pelemahan kredit terjadi karena *demand* dan *supply* yang selektif,” tutur Andry Asmoro, Kepala Ekonom Bank Mandiri, pertengahan November lalu. “Positifnya, bank sangat *prudent* dibandingkan dengan krisis yang lalu-lalu.”

Resesi tak terelakkan. Akhir November lalu, Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2020 bakal terjerembap ke jurang negatif, di rentang minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen. Sebelumnya, pemerintah memperkirakan pertumbuhan berada di rentang minus 1,1 persen sampai plus 0,2 persen dan minus 0,4 persen sampai plus 2,3 persen.

Atas dasar itu, pemerintah memutuskan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021 dengan anggaran sebesar Rp 372,3 triliun, turun dibanding anggaran pemulihan 2020 yang mencapai Rp 695,2 triliun.

Anggaran terbesar dalam PEN 2021, yakni Rp 136,7 triliun, akan dialokasikan ke program sektoral kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Selanjutnya, anggaran perlindungan sosial akan kebagian Rp 110,2 triliun. Program dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah akan disokong bujet Rp 48,8 triliun. Anggaran kesehatan dialokasikan Rp 25,4 triliun. Adapun untuk dukungan kepada dunia usaha berupa insentif perpajakan dan pembiayaan korporasi masing-masing tersedia dana Rp 20,4 triliun dan Rp 14,9 triliun.

Di luar PEN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 mengalokasikan dana jumbo untuk perlindungan sosial sebanyak Rp 421,7 triliun. Angka yang nyaris sama, sebesar Rp 413,8 triliun, disiapkan untuk belanja pembangunan infrastruktur. Akan halnya dana pembangunan pariwisata tersedia Rp 15,7 triliun. Pemerintah mengklaim semua kebutuhan belanja tersebut akan menyokong target pertumbuhan ekonomi 2021 yang dipatok 5 persen.

Namun agaknya pemerintah lupa, seluruh dunia sedang berkontemplasi. Forum Ekonomi Dunia (WEF) menyebutkan pandemi virus *corona* merupakan peringatan kepada manusia agar berhenti melampaui batas mengeksploitasi bumi. Deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim dipercaya telah membuat pandemi lebih mungkin terjadi.

Penggundulan hutan memperbesar peluang interaksi manusia dengan hewan liar sehingga memungkinkan bagi virus zoonosis seperti SARS-CoV-2 melompat lintas spesies dan berbagi kuman. Panel Antar-Pemerintah tentang Perubahan Iklim juga telah memperingatkan bahwa pemanasan global mungkin akan mempercepat munculnya virus baru.

Direktur Pusat Iklim, Kesehatan, dan Lingkungan Harvard University, Amerika Serikat, Aaron Bernstein mengakui bahwa bukti langsung yang menegaskan perubahan iklim telah mempengaruhi penyebaran Covid-19 memang belum ada. Tapi Bernstein dan para pakar lain tahu, perubahan iklim mengubah cara manusia berhubungan dengan spesies lain.

Saat planet memanas, hewan-hewan berpindah, berkontak dengan hewan lain, yang biasanya tidak mereka lakukan. Ini menciptakan peluang bagi patogen untuk masuk ke inang baru. “Kita punya banyak alasan untuk menyelamatkan iklim, untuk meningkatkan kesehatan kita. Mengurangi risiko munculnya penyakit menular salah satunya,” ucap Bernstein.

Tidak hanya bertafakur, semua negara di dunia juga didorong mengambil kesempatan dari Covid-19. Pandemi telah memicu pembatasan penerbangan lokal dan internasional, menurunkan volume perdagangan, serta mengurangi mobilitas orang. Kondisi ini melahirkan penurunan emisi gas rumah kaca terbesar yang pernah terjadi. Pada akhir tahun ini, emisi gas rumah kaca diperkirakan turun 8 persen.

Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menghitung, emisi gas rumah kaca global harus turun 7,6 persen setiap tahun sepanjang 2020-2030. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga kenaikan suhu global tetap di bawah 1,5 derajat Celsius pada akhir abad ini.

Banyak ekonom dan pegiat lingkungan mendesak semua negara agar kembali memperhatikan target-target tersebut. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris, yang mencakup komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sampai 29 persen pada 2030. Janji penurunan emisi ini bisa melompat hingga 41 persen jika ada bantuan internasional.

Tidak ada alasan lagi. Sejumlah bantuan internasional telah mengucur, baik lewat hibah maupun pinjaman hijau.

•••

TEMPO menyiapkan laporan khusus Proyeksi Ekonomi 2021 ini ketika pandemi Covid-19 masih mengintai—bahkan kembali memburuk. Indonesia baru saja mencetak rekor terbaru pada 3 Desember 2020: angka penduduk yang

terinfeksi Covid-19 mencapai 8.369. Rasio kasus positif pada penduduk yang dites pada November lalu juga menyentuh 13,55 persen, melampaui standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang hanya 5 persen.

Jika kondisi ini berlanjut, agaknya skenario kepercayaan masyarakat yang diprediksi segera pulih untuk keluar dan berbelanja bakal mundur lagi. Pelaku bisnis juga akan menimbang ulang rencana ekspansi. Bertahan atau menggeser fokus ke barang dan jasa yang masih laku di masa pandemi bisa menjadi solusi.

Namun, di tengah ketidakpastian yang masih mengintai pada 2021, sejumlah pelaku bisnis di aneka sektor usaha kini tengah memulai atau memperdalam penetrasi mereka pada ekonomi berkelanjutan. Langkah ini ditopang peluang, juga dituntut keadaan.

Bagi Adi Satria, perubahan perilaku konsumen turut mendorong Accor Group, jaringan hotel internasional, untuk mempercepat langkah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi keberlanjutan. Vice President Sales Marketing Distribution and Loyalty Accor Malaysia, Indonesia, dan Singapura ini mencontohkan, hotel jaringan Accor secara bertahap mengurangi penggunaan kertas dan mengganti semua layanan secara digital. Langkah ini sebenarnya telah lama diambil, tapi kini dipercepat seiring dengan kecenderungan pelanggan yang kian memperhatikan aspek kebersihan, kesehatan, keamanan, dan ramah lingkungan (CHSE).

Upaya menerapkan ekonomi berkelanjutan memang menuntut tambahan biaya investasi. Namun, menurut Adi, langkah ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan pelanggan di tengah sulitnya memprediksi bisnis jangka pendek. “Ini juga komitmen kami yang tak menjadikan bisnis semata-mata untuk keuntungan,” kata Adi, Selasa, 1 Desember lalu.

Seperti halnya di perhotelan, industri pariwisata sangat bergantung pada kepercayaan turis. Kendati masuk kategori sektor yang paling terakhir bangkit, sektor ini tergolong yang paling maju menerapkan konsep usaha CHSE.

Tingginya perhatian terhadap kebutuhan ekonomi hijau juga membuka potensi pendanaan bagi pelaku usaha di sektor ini. Kabar teranyar datang dari Star Energy, operator pembangkit listrik energi panas bumi milik Barito Group, yang baru saja menerbitkan surat utang hijau global senilai US$ 1,11 miliar. Penerbitan itu kelebihan permintaan tiga setengah kali.

Star Energy membuktikan bahwa pembiayaan hijau makin ramah bagi pelaku bisnis nasional. Hal ini ditopang komitmen lembaga pembiayaan dan investor global yang mulai menghindari energi fosil.

Tapi kondisi agak berbeda bagi investor lokal. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), misalnya, tidak mendapat bunga yang menarik ketika menerbitkan surat utang hijau senilai Rp 500 miliar pada 2018 kepada investor domestik. Tingkat kupon surat utang itu mencapai 7,55-7,80 persen. “Belum ada insentif bagi penerbit *bond* dan investor,” ujar Darwin Trisna Djajawinata, Direktur Operasional dan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur, Rabu, 2 Desember lalu.

Untuk mendukung pembiayaan hijau ini, Otoritas Jasa Keuangan sedang menyusun peta jalan keuangan berkelanjutan kedua, menggantikan peta jalan pertama yang kurang menggigit. “Makin jelas nanti klasifikasinya, mana saja yang bisa dibiayai oleh perbankan,” tutur Kepala Departemen Internasional OJK Rendra Zairuddin Idris pada Senin lalu, 30 November lalu.



Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 5 Oktober lalu./TEMPO/M Taufan Rengganis

Keuangan dan iklim investasi hijau juga bakal makin bergairah tahun depan. Bursa Efek Indonesia berencana meluncurkan *green index* pada 14 Desember 2020. Ini adalah daftar emiten yang operasinya paling memperhatikan tata kelola perusahaan, sosial, dan lingkungan (ESG). “Ada 25 konstituen pertama yang akan masuk. Semoga bisa naik terus,” kata Kepala Divisi Pengembangan Bisnis BEI Denny Wicaksono pada Rabu, 2 Desember lalu. Yang menarik, setiap emiten tersebut bisa terlempar dari daftar bila melanggar prinsip ESG di tengah jalan.

Di industri manufaktur—sektor yang menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar dari segi penggunaan energi—gerakan ekonomi hijau juga mulai muncul. Sejumlah perusahaan global yang beroperasi di Indonesia, seperti Coca-Cola Amatil dan Unilever, mulai mengurangi penggunaan bahan bakar tak ramah lingkungan di fasilitas produksi mereka.

Awal Oktober lalu, PT Coca-Cola Amatil Indonesia meresmikan pengoperasian panel surya yang menyokong 60 persen kebutuhan listrik mereka. PT Unilever Indonesia Tbk juga menggunakan biomassa sebagai pengganti gas untuk pengeringan produk.

Di sektor otomotif, gerak produksi mobil listrik juga diyakini bakal makin kencang seiring dengan masuknya sejumlah komitmen investasi penyimpan daya. Produsen baterai kendaraan listrik asal Cina, Contemporary Amperex Technology Co Ltd, misalnya, akan berinvestasi di Indonesia senilai US$ 5,1 miliar atau sekitar Rp 71,9 triliun.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan perusahaan asal Korea Selatan, LG Chem, juga sedang melakukan negosiasi dengan PT Aneka Tambang Tbk untuk membuat baterai di Indonesia. Situasi ini memicu sejumlah pabrik tancap gas mengeluarkan produk mobil listrik. Hyundai, misalnya, telah merilis dua mobil bertenaga listrik penuh, Ioniq dan Kona.

Bisnis *startup* pun tak mau ketinggalan masuk ke ekosistem ekonomi hijau. Sejumlah perusahaan rintisan muncul, di antaranya Sylendra Power yang bergerak di bidang energi bersih. Sektor energi memang masih akan menjadi pasar paling nyata bagi penyedia teknologi hijau di Indonesia.

•••

KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menambahkan satu lagi pengubah keadaan pada 2021: Undang-Undang Cipta Kerja. “Hanya ada dua *game changer* di 2021: vaksin dan Undang-Undang Cipta Kerja,” ucap Rosan pada pertengahan November lalu.

Dia optimistis undang-undang sapu jagat itu akan menjadi tulang punggung peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja. Investasi sejauh ini baru menyumbang 32 persen—33,17 persen pada 2019—terhadap produk domestik bruto nasional. Perdagangan ekspor-impor hanya menyumbang porsi 18 persen. Indonesia kalah jauh dibanding Vietnam, yang porsi perdagangannya terhadap PDB sudah mencapai 210,4 persen pada 2019.

Namun dua ekonom lingkungan, Andhyta Firselly Utami dan Poppy Ismalina, melihat ada inkonsistensi antara Undang-Undang Cipta Kerja dan komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris. Menurut Andhyta, beberapa negara menggunakan justifikasi pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 untuk berinvestasi di sektor dan cara yang tidak berkelanjutan. “Persepsi publik melihat Cipta Kerja memperlemah perlindungan lingkungan,” ujar Andhyta, ekonom lingkungan dari Think Policy Society, Senin, 30 November lalu.

Poppy sependapat. Dia melihat Undang-Undang Cipta Kerja merupakan ancaman bagi lingkungan hidup dan konservasi hutan di Indonesia. Paradigma dalam undang-undang tersebut, tutur Poppy, adalah pertumbuhan ekonomi. “Ekonomi sebagai panglima itu paradigma usang, bertolak belakang dengan pembangunan berkelanjutan,” kata ekonom lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada ini.

Septian Hario Seto menampik jika Undang-Undang Cipta Kerja dianggap tidak peduli terhadap lingkungan. Seto mencontohkan perubahan perizinan lingkungan bagi dunia usaha dalam wet itu. Menurut Seto, pemerintah menggeser perizinan menggunakan analisis risiko. Makin kecil risiko terhadap lingkungan, Seto menjelaskan, izin lingkungan makin tidak dibutuhkan. Sebaliknya, bila risiko terhadap lingkungan tinggi, perusahaan tetap wajib mengantongi izin lingkungan. “Izin lingkungan itu bahkan menempel ke izin usaha.”

Untuk urusan investasi hijau, Seto mengakui pemerintah belum mampu mengikuti cara negara-negara maju di Eropa yang memaksa dunia usaha bergerak ke arah pembangunan berkelanjutan. “Negara-negara maju sudah melalui perekonomian yang menghasilkan karbon tinggi sejak 30-40 tahun lalu,” ucapnya. “Kami bisa sekali mencapai Perjanjian Paris, tapi jangan dipaksa harus mengikuti cara mereka.”

Salah satu cara yang sedang disiapkan pemerintah adalah menyiapkan sumber daya alam yang bisa menghasilkan kredit karbon, seperti hutan tropis, gambut, bakau, dan koral. “Kalau kita bisa menjaganya, itu sudah signifikan dalam hal pengurangan karbon,” ujar Seto.

Sejumlah investasi luar negeri yang bakal masuk, Seto melanjutkan, juga sudah mulai berwawasan lingkungan. Salah satunya investasi pengolahan baja dari Fortescue Metals Group (FMG), Australia. “Andrew Forrest (CEO FMG) ingin energinya menggunakan pembangkit listrik tenaga air,” tutur Seto.

Debat pertumbuhan ekonomi versus perlindungan lingkungan sudah berlangsung panjang. Covid-19 semestinya menjadi penutup dengan bukti bahwa mengabaikan lingkungan demi pembangunan bisa membawa kehancuran lebih parah bagi perekonomian.



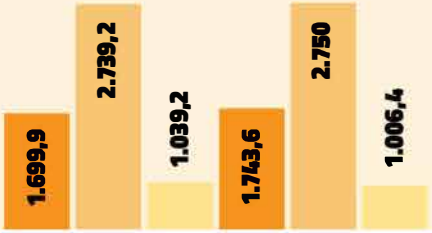
MENGEJAR TARGET 2030

PEREKONOMIAN terpuruk akibat pagebluk. Pemerintah pun kembali memusatkan sejumlah rencana pembangunan 2021 pada program-program pemulihan ekonomi, penanganan pandemi, serta perbaikan sistem kesehatan nasional. Komunitas internasional berseru agar upaya pemulihan ekonomi, termasuk di Indonesia, juga diisi aksi pro-lingkungan untuk memastikan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca pada 2030 terpenuhi

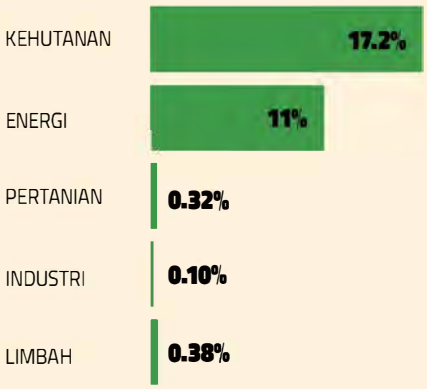
ASUMSI MAKRO EKONOMI 2021

Pertumbuhan ekonomi	5,0%
Inflasi	3,0%
Nilai tukar rupiah	Rp 14.600 per dolar Amerika Serikat
Suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun	7,29%
Harga minyak	US$ 45 per barel
Lifting minyak	705.000 barel per hari
Lifting gas	1.007.000 barel setara dengan minyak per hari

POSTUR APBN 2020-2021
(RP TRILIUN)



TARGET KONTRIBUSI SEKTOR TERHADAP PENURUNAN EMISI 2030



PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020-2024

Pertumbuhan ekonomi	5,6-6,0%
Tingkat pengangguran	4,0-4,6%
Tingkat kemiskinan	6,5-7,0%
Indeks pembangunan manusia	75,54
Rasio Gini	0,360-0,374
Penurunan emisi	27,3%

KOMITMEN INDONESIA TERHADAP PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2030

29%

Komitmen penurunan emisi secara mandiri



SUMBER: APBN 2021, KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, BAPPENAS, WORLD RESOURCES INSTITUTE INDONESIA | **NASKAH:** AISHA SHAIDRA

Penanggung jawab: Agoeng Wijaya

Kepala proyek: Aisha Shaidra

Penulis: Aisha Shaidra, Dini Pramita, Khairul Anam, Nur Alfiyah, Raymundus Rikang, Retno Sulistyowati

Penyunting: Agoeng Wijaya, Anton Septian, Bagja Hidayat, Sapto Yunus, Stefanus Teguh Pramono

Penyumbang bahan: Made Argawa (Bali), Murthadho (Bogor), Servio Maranda (Bangka Belitung)

Periset foto: Gunawan Wicaksono, Jati Mahatmaji, Ratih Purnama Ningsih

Penyunting bahasa: Edy Sembodo, Hardian Putra Pratama, Iyan Bastian

Desainer: Rudy Asrori, Junianto Prasongko

Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Komite

Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Outlook

Ekonomi Komite Pemulihan Ekonomi Nasional | KPEN

Sejumlah Bank Indonesia yang Menerapkan Prinsip Berkelanjutan Unggul di ASEAN



Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) menyambut bergabungnya lima bank nasional sebagai anggota baru, yaitu CIMB Niaga, Bank Syariah Mandiri, OCBC NISP, Maybank Indonesia, dan HSBC Indonesia, di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, November 2019./ Dok. WWF

- **Bank di Indonesia dinilai cukup memimpin dalam keuangan berkelanjutan di ASEAN. .**
- **Sejumlah bank mengubah berbagai regulasi internal untuk mendukung ekonomi hijau. 21657**
- **Pembiayaan hijau justru bertumbuh di masa pandemi. .**

KABAR baik diterima Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Desember, Selasa pekan lalu. Hari itu, organisasi konservasi independen terbesar di dunia, World Wide Fund for Nature (WWF), merilis laporan Sustainable Banking Assessment 2020, penilaian terhadap bank di Asia Tenggara plus Jepang dan Korea Selatan dalam mengimplementasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST).

Laporan yang ikut menyoroti delapan bank dari Indonesia—dari total 48 bank yang dinilai—itu menyebutkan industri perbankan di kawasan telah mencapai perkembangan yang signifikan dalam menerapkan LST. Tapi, yang membikin OJK bungah, perbankan Indonesia dinilai unggul pada aspek pengungkapan integrasi LST dalam strategi bisnis secara keseluruhan, juga telah memiliki program peningkatan kapasitas untuk keuangan berkelanjutan. “Apa yang kita lakukan selama ini diakui bahkan oleh dunia internasional. Ini saatnya melanjutkan dan tidak berpuas dengan pencapaian ini,” kata Kepala Departemen Internasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rendra Zairuddin Idris, Sabtu, 5 Desember lalu.

Apresiasi tersebut, menurut Rendra, mendorong OJK selaku regulator untuk menyiapkan ekosistem yang lebih baik bagi lembaga jasa keuangan. Dia memastikan OJK akan terus memperbaiki dan memenuhi semua indikator dalam kerangka LST agar bisa bersaing di dunia global.

Delapan bank dari Indonesia yang turut dinilai meliputi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Muamalat, PT Bank Panin Tbk, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Dua di antaranya, BRI dan BCA, tercatat masuk daftar sepuluh besar bank yang memenuhi kriteria tertinggi di tingkat ASEAN.

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjQ3OjQ5Il0
Penanggung jawab untuk program keuangan berkelanjutan Yayasan WWF Indonesia, Rizkiasari Yudawinata, mengungkapkan bahwa secara umum capaian delapan bank dari Indonesia cukup merata dalam hal komitmen dan inisiatif menerapkan praktik keuangan berkelanjutan. “Indonesia bukan hanya yang terbaik di tingkat ASEAN, bahkan termasuk yang *leading* terkait dengan kemajuan *sustainable finance*,” ujar Rizkiasari, Jumat, 4 Desember lalu.

Laporan terbaru ini memang menjadi oase bagi OJK setelah sorotan tajam mengarah ke lembaga tersebut. Peta jalan keuangan berkelanjutan tahap pertama yang mereka gulirkan di pengujung 2014 dinilai tak ampuh memaksa perbankan mengerem pembiayaan ke sektor industri yang berisiko tinggi merusak lingkungan. “Reformasi dibutuhkan untuk memaksa bank menerapkan kriteria pinjaman yang lebih ketat,” ucap Direktur Eksekutif Transformasi untuk Keadilan Indonesia Edi Sutrisno kepada *Tempo*, Jumat, 4 September lalu.

Di tengah keraguan para pegiat lingkungan, kalangan bankir sebenarnya bersepakat bahwa pemenuhan aspek LST sejalan dengan *prudential banking principle*, prinsip-prinsip pengelolaan bank yang dikembangkan perbankan untuk

mencegah krisis keuangan kembali terjadi. Executive Vice President Secretariat & Corporate Communications PT Bank Central Asia Tbk Hera F. Haryn mengungkapkan, pasar BCA bahkan mulai merespons baik langkah-langkah perusahaan yang berkomitmen terhadap pengembangan ekonomi hijau.

Karena itu, dia menambahkan, BCA juga menjalankan sejumlah aktivitas untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Hera mencontohkan, BCA telah meninjau kembali kebijakan dasar perkreditan bank dengan menambahkan kebijakan baru berupa larangan penyaluran kredit kepada usaha-usaha yang menimbulkan risiko terhadap aspek LST. “Dari aspek lingkungan, pemberian kredit makin memperhatikan dampak negatif risiko yang ditimbulkan,” tutur Hera, Jumat, 4 Desember lalu.

Menurut Hera, BCA juga telah memperbarui ketentuan sentralisasi pengelolaan data rekanan bank. Syarat baru itu antara lain tidak mempekerjakan anak dan pekerja paksa, menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta menerbitkan pakta integritas dan deklarasi *anti-fraud*. “Sejumlah inisiatif melestarikan lingkungan kami lakukan juga, seperti pengembangan teknologi yang berkontribusi pada penghematan energi dan emisi, serta penghematan kertas,” ujarnya.

Direktur Utama PT BNI Royke Tumilaar bahkan hakulyakin pendekatan keuangan berkelanjutan bisa menjadi solusi masa depan. Strategi ini, kata dia, tak hanya akan meningkatkan nilai investasi bagi investor, tapi juga menciptakan kondisi kerja terbaik bagi karyawan sekaligus berdampak positif terhadap lingkungan dan sosial.

Itu sebabnya dia juga memastikan BNI terus berkomitmen terhadap bisnis keuangan yang berkelanjutan. Caranya, dia menjelaskan, bank akan mendukung ekspansi pada sektor usaha berkelanjutan. “Selain berdampak positif pada lingkungan dan sosial, dukungan pada sektor bisnis berkelanjutan akan memberikan manfaat bagi ekonomi dalam jangka panjang ke depan,” ucap Royke, Sabtu, 5 Desember lalu.

Menurut dia, selama masa pandemi Covid-19, pembiayaan BNI ke sektor bisnis berkelanjutan justru meningkat. Kredit untuk sektor energi terbarukan per September 2020, misalnya, melonjak 34,4 persen dibanding capaian pada periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 3,46 triliun. Secara kumulatif, penyaluran pembiayaan dengan kriteria kegiatan usaha berkelanjutan pada September lalu telah mencapai Rp 139,15 triliun, naik 5,0 persen dibanding tahun lalu.

Pertumbuhan serupa dialami PT Bank Mandiri. “Pembiayaan ke sektor hijau berkontribusi positif terhadap kinerja Bank Mandiri,” tutur Corporate

Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha, tanpa menyebutkan detailnya.

•••

OTORITAS JASA KEUANGAN menggagas program keuangan berkelanjutan agar jasa keuangan bisa tumbuh menyediakan sumber pendanaan sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Peta jalan keuangan berkelanjutan yang digulirkan pada Desember 2014 sebenarnya merupakan kelanjutan gagasan serupa ketika industri bank masih di bawah pengawasan Bank Indonesia.

Saat ini peta jalan tahap kedua untuk periode 2020-2024 sedang menunggu diteken oleh Dewan Komisioner OJK. Penyusunan peta keuangan hijau ini juga menjadi bagian dari peran OJK dan industri jasa keuangan untuk mendukung komitmen Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Agenda tersebut masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang menetapkan target pengembangan energi terbarukan. Kebijakan energi nasional juga dikeluarkan pemerintah pada 2014 untuk mencapai sekitar 23 persen energi terbarukan pada 2025. Selain dalam penyusunan peta jalan keuangan berkelanjutan serta Peraturan OJK Nomor 51 2017, penerbitan dan persyaratan obligasi hijau diatur dalam Peraturan OJK Nomor 60 Tahun 2017.

Sejak 2018, setiap tahun Indonesia menerbitkan *sovereign global green sukuk* dengan total US$ 2,75 miliar. Setahun berikutnya, pemerintah menerbitkan *green sukuk* retail pertama di dunia. Total investasinya US$ 100 juta. Nilai tersebut dialokasikan untuk membiayai transportasi berkelanjutan hemat energi, juga memitigasi bencana serta membuka akses sumber energi yang terbarukan.

"Indonesia bukan hanya yang terbaik di tingkat ASEAN, bahkan termasuk yang leading terkait dengan kemajuan sustainable finance."

April tahun lalu, Aliansi Investasi Berkelanjutan Global (GSIA) merilis tinjauan investasi berkelanjutan 2018. Laporan tersebut menemukan bahwa aset investasi berkelanjutan di Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia Baru pada 2018 meningkat 34 persen sejak 2016. Nilainya mencapai US$ 30,7 triliun. Investasi berkelanjutan makin mudah diakses dengan pilihan investasi berkelanjutan tersedia melalui berbagai sarana investasi.

Sejumlah regulasi dan rancangan kebijakan pemulihan hijau dirancang pemerintah untuk mendorong transformasi perekonomian dan mewujudkan komitmen mengurangi emisi karbon. Pandemi yang menghantam dunia sejak

awal tahun dinilai sejumlah pihak sebagai momentum untuk melakukan pemulihan guna mengatasi tantangan Covid-19 dan perubahan iklim.

Tak dimungkiri, menurut ekonom lingkungan dan pendiri Think Policy Society, Andhyta F. Utami, di sejumlah negara, pandemi juga dijadikan justifikasi untuk berinvestasi pada ranah yang tidak berkelanjutan sebagai upaya pemulihan ekonomi. “Pada umumnya ada yang melihat tipe *sustainable* memakan waktu lama,” ujar Andhyta, Senin, 30 November lalu.

Di Indonesia, pandangan pembangunan konvensional masih lebih dipercaya para pembuat kebijakan. Ini tecermin dari terbitnya sejumlah regulasi yang bertolak belakang dengan sejumlah rencana mengurangi emisi karbon itu sendiri. Persepsi publik pun menilai sejumlah peraturan memperlemah perlindungan terhadap lingkungan.

Rendra Zairuddin Idris sepakat pandemi menjadi alarm bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan di seluruh dunia belum punya daya dukung terhadap lingkungan serta pembangunan yang lebih bertanggung jawab. “Pandemi mendorong pembangunan ke depan tidak bisa lagi seperti sekarang,” ucap Rendra, Senin, 30 November lalu.

Toh, pada praktiknya, dia menilai pendanaan hijau tidak bisa serta-merta diterapkan secara penuh, terlebih dalam waktu cepat tatkala pemerintah berfokus menangani pandemi. Sejumlah sektor keuangan, kata Rendra, masih perlu menyesuaikan diri dan menghitung sederet risiko. Bagaimanapun, dia hakulyakin proses pembiayaan hijau bisa terus berjalan selama masa pandemi. “Ini masih bisa berjalan bareng, tanpa perlu dibenturkan,” tuturnya. “Dalam tahap itu, kini OJK menyiapkan ekosistemnya.”

Rizkiasari Yudawinata menilai 2021 akan menjadi tahun penting bagi lembaga jasa keuangan dalam mengambil pelajaran terpenting dari pandemi yang datang tiba-tiba. Begitu pula halnya dalam menyikapi perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang bahkan sudah diprediksi. “Kalau sudah memahami risiko ini, sektor jasa keuangan sudah diberi kesempatan agar bisa beradaptasi dengan baik,” kata Rizkiasari.

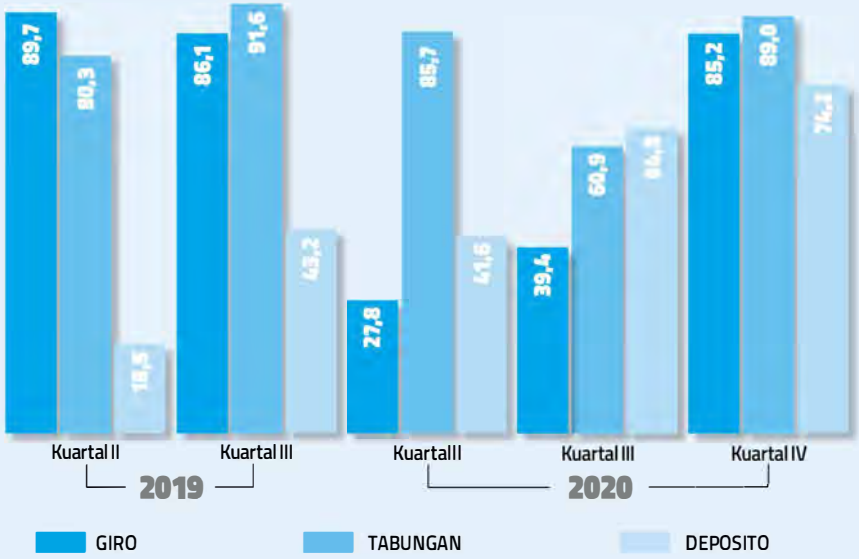
BELUM KEMBALI NORMAL

OTORITAS Jasa Keuangan memprediksi pertumbuhan kredit pada 2021 belum kembali normal. Tahun ini, terjadi penurunan signifikan pertumbuhan kredit pada September dibanding pada Maret. Pertumbuhan dana pihak ketiga pada 2021 ditaksir tidak akan sebesar tahun ini.

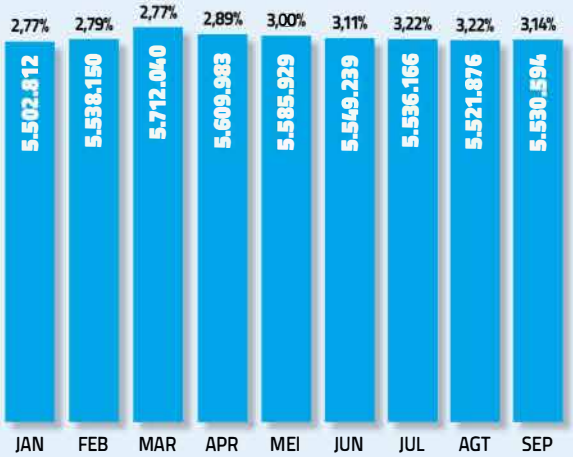
ARUS MODAL MASUK/KELUAR 2020

	September	Oktober
Net buy/sell saham (Rp triliun)	-15,59	-3,71
Net buy/sell Surat Berharga Negara (Rp triliun)	-8,79	21,80 (6 November)

PERTUMBUHAN DPK PER KATEGORI



PERKEMBANGAN KREDIT DAN NON-PERFORMING LOAN BANK UMUM 2020 (RP MILIAR)



KOMPOSISI DANA PIHAK KETIGA (DPK) BANK UMUM 2020 (RP MILIAR)



NASKAH: AISHA SHAIDRA | **SUMBER:** OTORITAS JASA KEUANGAN, BANK INDONESIA

keuangan berkelanjutan Outlook Ekonomi

Bagaimana Pabrik Manufaktur Besar Menginisiasi Ekonomi Berkelanjutan



Proses pemasangan panel surya di pabrik Coca-Cola Amatil Indonesia, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Rabu pekan lalu. Tempo/Tony Hartawan

- **Langkah mandiri Coca-Cola berharap dari matahari. .**
- **Penggunaan bahan bakar industri manufaktur jadi penyumbang terbesar emisi sektor energi. 21657**
- **Setelah bahan bakar, inovasi produk ramah lingkungan digeber Unilever. .**

PANEL surya itu berjumlah ribuan, berjajar rapi, nyaris memenuhi atap enam bangunan besar di kompleks pabrik PT Coca-Cola Amatil Indonesia, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Rabu siang itu, 2 Desember lalu, sejumlah pekerja tengah sibuk-sibuknya memasang setumpuk modul yang baru diangkat menggunakan *mobile crane*. Pemasangan panel yang kini menyisakan 20 persen dari total pekerjaan itu akan menggenapi proyek Coca-Cola yang digadang-gadang sebagai panel surya terbesar di Asia Tenggara. “Ini langkah pertama kami dalam proyek energi baru terbarukan,” kata Presiden Director Coca-Cola Amatil Indonesia & Papua New Guinea Kadir Gunduz kepada *Tempo*.

Pembangunan pembangkit surya berkapasitas 7,13 megawatt di area seluas 72 ribu meter persegi—lebih luas dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan—itu dimulai medio tahun lalu. Coca-Cola menggelontorkan dana senilai Rp 87 miliar untuk menggantikan sekitar 60 persen kebutuhan listrik di pabriknya dengan energi matahari. Coca-Cola mengalkulasi, proyek ini akan memangkas emisi karbon hingga 8,9 juta kilogram per tahun.

Kendati pandemi Covid-19 telah merontokkan berbagai sektor usaha, termasuk industri minuman, Kadir menegaskan rencana perseroan mengembangkan proyek serupa di fasilitas pabrik di beberapa daerah tahun depan. Pabrik di Pasuruan, Jawa Timur, dan Semarang, Jawa Tengah, menjadi dua target berikutnya pada 2021. Saat ini audit konstruksi atap bangunan yang akan menjadi landasan modul tengah digelar. “Ini bagian komitmen Amatil untuk mendukung target pemerintah dalam mengurangi emisi,” ujarnya.

Pandemi memang memukul kencang industri pengolahan, termasuk produsen minuman ringan. Asosiasi Industri Minuman Ringan mencatat, penjualan produk minuman ringan yang tak mengandung alkohol (*non-alcoholic ready to drink*) jeblok di kisaran 40-70 persen pada masa-masa awal penyebaran Covid-19. Kala itu, sektor ini bisa dibilang nyaris ambruk.

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjQ3OjUyIl0
Data Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) menunjukkan bisnis makanan dan minuman pada triwulan II lalu hanya tumbuh 0,22 persen, merosot jauh dibanding triwulan sebelumnya yang masih bisa mencapai 3,9 persen. Pertumbuhan triwulan III juga masih jauh dari harapan, hanya 0,66 persen. Tren pelemahan tajam, yang diikuti penguatan tipis, di industri makanan ini senapas dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional pada periode yang sama, masing-masing terkontraksi minus 5,32 persen dan minus 3,49 persen.

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman menjelaskan, sektor makanan-minuman terpukul oleh penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi. Penurunan terutama terjadi di masyarakat kelas menengah-bawah. Sementara itu, masyarakat kelas atas cenderung menahan belanja. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar turut memicu pelemahan kinerja industri.

Dia memperkirakan industri makanan-minuman bisa tumbuh 2-3 persen pada triwulan IV, seiring dengan bergulirnya insentif pemerintah, seperti bantuan modal kerja, bantuan tunai, dan subsidi gaji. “Normalnya di kisaran 7-9 persen. Tahun lalu pertumbuhan kami 7,9 persen,” ucap Adhi. “Memang ini tidak normal.”

Daya beli memang menjadi momok bagi industri manufaktur di masa pandemi. Pembatasan sosial dan penurunan kinerja penjualan akan memaksa pabrik mengurangi utilisasi fasilitas produksinya, yang ujung-ujungnya juga mendorong penurunan daya beli masyarakat.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat jam kerja di sektor manufaktur berkurang 11,1 miliar jam akibat utilisasi pabrik yang tinggal separuh. "Akibatnya, total pendapatan yang hilang mencapai Rp 1.158 triliun selama 30 pekan," tutur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.

Namun, jauh sebelum pandemi Covid-19, industri manufaktur sudah lama dianggap sebagai momok bagi lingkungan. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi 2017-2018 yang disusun Direktorat Jenderal Pengendalian Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat sektor manufaktur sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar kedua dari sisi penggunaan energi. Kontributor emisi selain industri manufaktur adalah industri energi—pembangkit listrik, kilang minyak, dan pengolahan batu bara—serta transportasi.

Ketika meresmikan pengoperasian panel surya Coca-Cola, 1 Oktober lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto berharap industri melanjutkan langkah penggunaan energi baru dan terbarukan. Pemerintah, kata dia, juga tengah meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional sebesar 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050.

Airlangga menghitung, panel solar dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 300 juta ton pada 2050. "Sama dengan penghematan 7.000 kendaraan selama setahun," ujarnya ketika itu.



Pekerja tengah memindahkan susunan minuman bersoda menggunakan alat berat berbahan bakar gas di pabrik Coca-Cola Amatil Indonesia, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (2/12/2020) Panel surya sebesar 72.000 meter per segi tersebut mambpu menghasilkan 9,6 juta kwh dan mampu menggerakkan fasilitas manufaktur./Tempo/Tony Hartawan

•••

PABRIK lain, seperti Unilever Indonesia, juga tengah gencar mengkampanyekan penggunaan energi bersih. Lini pabrik Powder Non-Soap Detergent yang memproduksi Rinso dan Molto, misalnya, telah menggunakan biomassa untuk menggantikan bahan bakar gas alam dalam proses pengeringan detergen bubuk. Biomassa diolah dari cangkang inti sawit yang dianggap tersedia melimpah, relatif tahan cuaca saat penyimpanan, dan memiliki kadar abu rendah.

September lalu, di tengah pandemi, Unilever secara global menggulirkan program Clean Future. Proyek ini berfokus pada lima hal, yakni penggunaan bahan baku yang dapat diperbarui dan bersifat sirkular, produk berjejak karbon rendah, efisiensi air dan kemampuan produk untuk terurai secara alami, kemasan hasil daur ulang yang dapat diisi kembali, serta desain produk yang membangun kepercayaan konsumen.

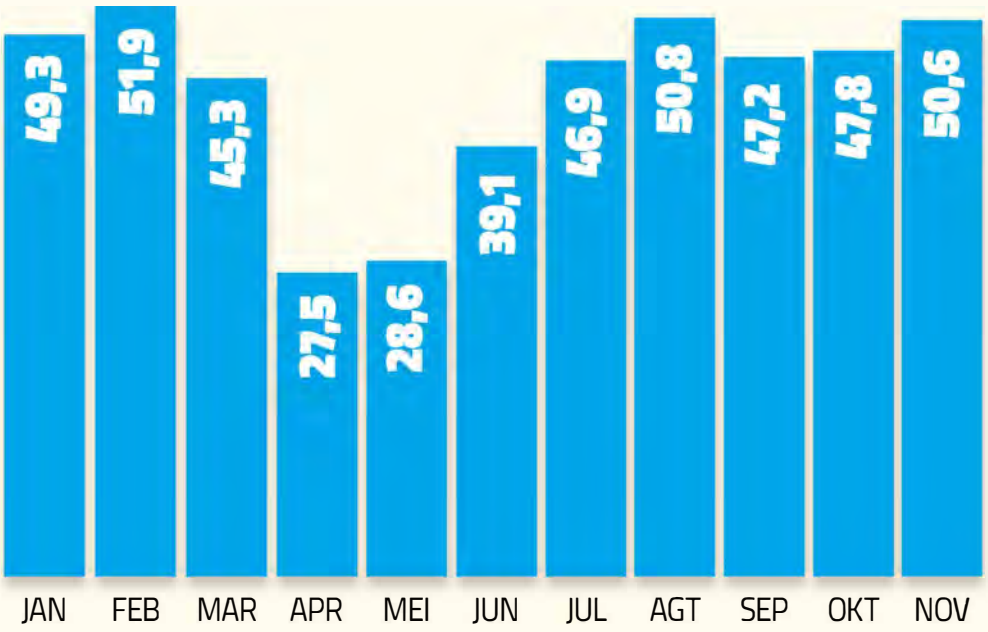
Head of Corporate Affairs & Sustainability Unilever Indonesia Nurdiana Darus menjelaskan, terobosan ini dirancang divisi Home Care perusahaan untuk mengubah cara pembuatan dan pengemasan produk pembersih dan detergen secara fundamental. Program ini juga bertujuan memenuhi komitmen perusahaan untuk menghasilkan *net zero emission* atau produk bebas emisi pada 2039.

HARAPAN DI SEKTOR PENGOLAHAN

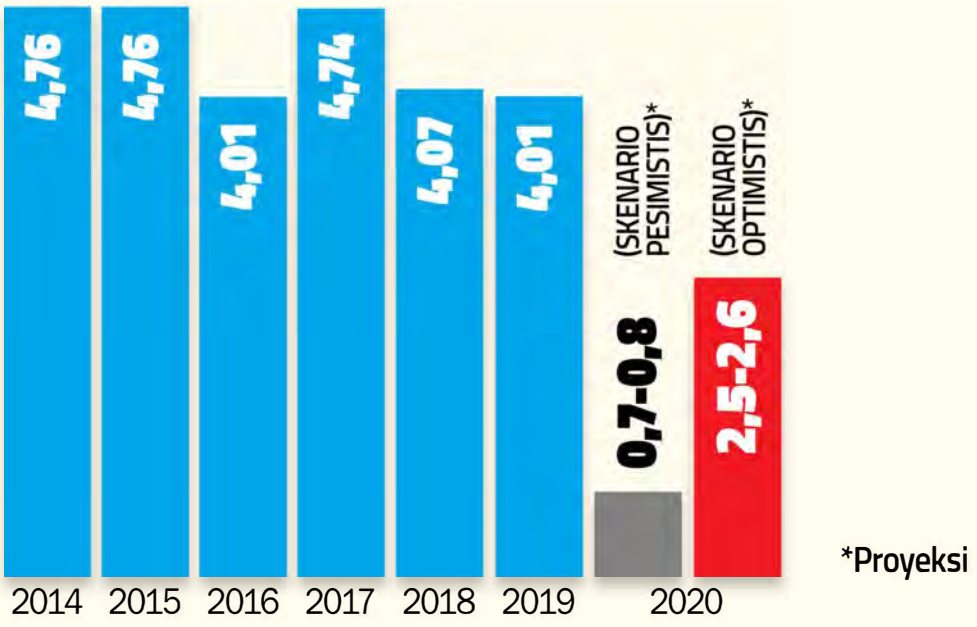
SEMPAT rontok terkena dampak pandemi Covid-19, sektor manufaktur perlahan menunjukkan perbaikan. Optimisme muncul setelah lembaga riset dan analisis keuangan internasional, IHS Markit, merilis Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia yang naik menuju level 50,6 pada November 2020. Bulan sebelumnya, PMI manufaktur Indonesia berada di posisi 47,8.

PMI adalah indikator kegiatan perekonomian suatu negara. Biasanya, indeks yang menjadi fokus perhatian adalah sektor manufaktur sehingga biasa disebut PMI manufaktur. Kementerian Perindustrian menyatakan peningkatan indeks tersebut menunjukkan industri pengolahan bergeliat menjelang akhir 2020.

PMI MANUFAKTUR INDONESIA 2020 (POIN)



PERTUMBUHAN INDUSTRI MANUFAKTUR BESAR DAN SEDANG (IBS) (%)



SUMBER: IHS MARKIT, BADAN PUSAT STATISTIK, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, GAPMMI

Unilever menyiapkan investasi sebesar 1 miliar euro atau sekitar Rp 17 triliun untuk mendanai penelitian, pengembangan, dan inovasi global di bidang bahan kimia pembersih sirkular. Perusahaan, Nurdiana menambahkan, akan menggunakan pendekatan "karbon warna" sebagai transisi ke sumber karbon terbarukan.

Sumber karbon fosil yang tidak dapat diperbarui, misalnya, diidentifikasi sebagai karbon hitam. Karbon ini akan digantikan karbon lain, seperti tangkapan karbon dioksida (karbon ungu); tumbuhan dan sumber biologis (karbon hijau); sumber laut, seperti alga (karbon biru); serta karbon yang dipulihkan dari bahan limbah (karbon abu-abu). Semua sumber karbon itu akan diatur dan diinformasikan melalui analisis mengenai dampak lingkungan.

Saat ini, Nurdiana melanjutkan, bahan kimia di sebagian besar produk pembersih yang ada di pasar memiliki proporsi jejak karbon yang besar, yaitu sekitar 46 persen di sepanjang siklus produk tersebut. "Dengan meninggalkan bahan kimia dari bahan bakar fosil dalam formulasi produk, perusahaan menargetkan dapat mengurangi jejak karbon hingga 20 persen," ucapnya.

Di samping inovasi produk, pandemi mendorong Unilever berekspansi memperkuat lini penjualan digital. Langkah ini dilakukan lantaran adanya pola pergeseran cara berbelanja konsumen yang kini lebih banyak melalui *online*. Pada tahun ini saja diperkirakan 60 persen pembeli di Indonesia telah mencoba metode belanja digital.

Sebagai bagian dari proyek ini, Unilever membantu mitra usaha mikro, kecil, dan menengah alias pemilik warung. Perseroan meluncurkan Sahabat Warung, aplikasi berbasis Android, sehingga pedagang bisa mendapat produk Unilever secara *online* tanpa harus keluar rumah. "Kami memperkuat ketersediaan produk pada berbagai jalur e-*commerce* dan berbagai inovasi digital bagi konsumen dan pelanggan," kata Nurdiana.

RETNO SULISTYOWATI

Covid-19 Ekonomi Sirkular Pertumbuhan Industri

Menggenjot Kendaraan Ramah Lingkungan



Pengunjung melihat kendaraan bermotor listrik yang dipamerkan di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Agustus 2019./TEMPO/Muhammad Hidayat

- **Harga yang mahal menjadi salah satu penyebab rendahnya angka penjualan mobil listrik. .**
- **Baterai menjadi salah satu faktor harga mobil ramah lingkungan lebih mahal dari mobil konvensional. 21657**
- **Pemerintah berupaya menciptakan ekosistem industri yang kondusif dari hulu sampai hilir. .**

DI depan peserta The 15th MnM's Week Webinar and Talk Show yang diselenggarakan Fakultas Teknik Universitas Indonesia secara daring (*online*), Kamis, 3 Desember lalu, Henry Tanoto memaparkan hasil penjualan mobil ramah lingkungan di perusahaan tempatnya bekerja. Wakil Presiden Direktur PT Toyota-Astra Motor itu mengatakan angka penjualannya meningkat signifikan dalam sebelas tahun terakhir.

Saat pertama kali memasarkan mobil ramah lingkungan di Indonesia pada 2009, Toyota menjual rata-rata hanya dua unit mobil per bulan. Saat ini perusahaan multinasional itu bisa menjual sampai 79 unit per bulan. Henry menyebutkan, secara total, perusahaannya sudah menjual 3.300 unit hingga Oktober lalu. Meski

meningkat, jumlah penjualan mobil ramah lingkungan masih kalah jauh dibanding angka penjualan mobil berbahan bakar fosil. “Ini masih di bawah 1 persen dari seluruh penjualan kami,” katanya.

Toyota adalah pionir pemasaran mobil ramah lingkungan di Indonesia. Mereka awalnya menjual mobil *hybrid* Toyota Prius yang memiliki dua mesin: motor bakar dan motor listrik. Kedua sistem penggerak tersebut bekerja secara bergantian sehingga memungkinkan penghematan bahan bakar. Perusahaan itu kini memasarkan dua tipe mobil ramah lingkungan lain. Salah satunya mobil *plug-in hybrid* yang juga memiliki dua mesin tapi lebih canggih karena baterainya bisa diisi ulang dengan sumber listrik dari luar, seperti dari rumah. Terakhir, mereka meluncurkan mobil yang menggunakan tenaga baterai penuh, Lexus UX 300e, pada November lalu.

Sebelum Toyota, beberapa merek lain, seperti Tesla, BMW, Nissan, dan Hyundai, meluncurkan mobil listrik dengan tenaga baterai penuh di Indonesia. Rata-rata harga mobil ramah lingkungan masih di atas angka Rp 400 juta. Padahal, Henry mengungkapkan, selain mempertimbangkan kesesuaian mobil dengan kebutuhan, konsumen sangat memperhatikan masalah harga. Sebanyak 75-85 persen konsumen membeli mobil dengan harga di bawah Rp 300 juta. Sisanya membeli mobil dengan harga lebih tinggi. “Ini mungkin terkait dengan daya beli masyarakat,” ujar Henry.

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjQ3OjUzIl0
Salah satu komponen yang membuat harga mobil ramah lingkungan lebih mahal daripada mobil sejenis yang berbahan bakar fosil adalah baterai. Komponen ini menyumbang 35 persen dari seluruh biaya produksi mobil. Pajak untuk mobil jenis ini juga terbilang tinggi. Menurut Presiden Direktur Prestige Corp, yang mengimpor Tesla, Rudy Salim, pihaknya mesti menaikkan harga penjualan karena menanggung biaya pemberitahuan impor barang sebanyak 50 persen, pajak pertambahan nilai 10 persen, dan pajak penghasilan 10 persen. Karena itu, harga jualnya di Indonesia bisa sampai dua kali lipat harga di luar negeri. “Ini yang membuat pasar mobil listrik terbatas,” tutur Rudy melalui pesan WhatsApp, Kamis, 3 Desember lalu.

Ini baru soal harga. Rudy menambahkan, konsumen juga mempertimbangkan masalah prasarana. Hingga kini belum ada infrastruktur pengisian daya listrik sehingga pengecasan hanya bisa dilakukan di rumah. “Padahal di luar negeri adalah suatu hal yang biasa mengisi baterai di tempat umum,” ucapnya.

Pemerintah berusaha mengatasi berbagai masalah ini dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan

Berbasis Baterai pada Agustus lalu. Fokusnya antara lain menggarap potensi industri baterai di Tanah Air.

Senior Supervisor Mining and Minerals Industry Institute Mining Industry Indonesia (Mind ID), Ratih Amri, mengatakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara membentuk tim yang beranggotakan lintas BUMN dengan induk Mind ID. *Holding* tersebut membawahkan sejumlah perusahaan tambang, yakni PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium, dan PT Timah Tbk. “Kalau sudah menguasai hulunya, kita bisa mengontrol persaingan dari sisi biaya,” ujarnya.

Menurut Ratih, Indonesia memiliki cadangan 21 juta metrik ton nikel, melebihi cadangan yang dimiliki negara lain di dunia, yang sudah siap dioptimalkan untuk membuat baterai listrik. Nikel adalah bahan utama pembuatan baterai. Ratih mengatakan hal ini harus segera dimanfaatkan karena bisa jadi dalam beberapa belas tahun ke depan teknologi sumber penggerak motor sudah beralih ke bahan lain. “Ambisinya, pada 2025 kita bisa menjadi produsen baterai global,” tuturnya.

Pemerintah, kata dia, juga berusaha menciptakan ekosistem industri yang kondusif dari hulu sampai hilir. Mereka ingin menggandeng perusahaan seperti Tesla agar membangun industrinya di Indonesia.

Produsen baterai kendaraan listrik asal Cina, Contemporary Amperex Technology Co Ltd, juga akan menanamkan investasi senilai US$ 5,1 miliar atau sekitar Rp 71,9 triliun di Indonesia. Kerja sama sudah ditandatangani bulan lalu. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto menambahkan, perusahaan asal Korea Selatan, LG Chem, sedang dalam negosiasi dengan PT Antam Tbk untuk membuat baterai di Indonesia.

Direktur Jenderal Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier mengatakan, selain akan memproduksi baterai, pemerintah memberikan fasilitas kepada para pengguna mobil ramah lingkungan. Setelah terbit peraturan presiden untuk percepatan kendaraan berbasis baterai tersebut, pemerintah membuat aturan pendukungnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Nantinya pajak penjualan barang mewah tidak lagi ditentukan berdasarkan bentuk kendaraan seperti sebelumnya, melainkan melihat emisi gas buang yang dikeluarkan. Makin besar emisi, makin tinggi pajaknya. Aturan ini akan berlaku pada 2021 (**lihat boks**).

Taufiek menambahkan, pemerintah juga telah membuat peta jalan Making Indonesia 4.0 dalam bidang otomotif. Rencananya, dalam lima-sepuluh tahun ke

depan, pemerintah menginginkan adanya inisiasi produksi lokal sepeda motor listrik. Ketika itu, sudah ada penetapan rencana yang jelas mengenai penghapusan sepeda motor berbasis bahan bakar sambil membangun infrastruktur yang diperlukan dan mendorong adopsi sepeda motor listrik.

Pemerintah, dia melanjutkan, juga membangun pusat riset dan pengembangan komponen elektronik, seperti baterai, dan membuat prototipe untuk mempercepat pengembangan produk. Pada 2030 sampai lima tahun setelahnya, pemerintah berfokus menginisiasi produk lokal mobil listrik dengan proses yang sama. "Kami ingin membangun kemampuan produksi dalam negeri untuk sepeda motor listrik dan mobil listrik di sepanjang rantai nilai," ucap Taufiek.

DUKUNGAN FASILITAS DAN INSENTIF

Pemerintah memberikan berbagai insentif bagi konsumen dan produsen kendaraan ramah lingkungan. Berikut ini di antaranya.

Untuk Konsumen

1. Pajak
   - Pajak penjualan barang mewah nol persen (Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019)
   - Bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) nol persen di DKI Jakarta (Peraturan Gubernur DKI Nomor 3 Tahun 2020)
   - BBN-KB 10 persen untuk mobil listrik dan 2,5 persen buat sepeda motor listrik di Jawa Barat (Peraturan Menteri Dalam Negeri 975-698 Tahun 2019)
   - BBN-KB 10 persen untuk kendaraan listrik di Bali (Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019)
2. Suku bunga dan uang muka
   - Kredit khusus kendaraan bermotor listrik dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan bunga 3,8 persen per tahun dan tenor sampai 6 tahun
   - Uang muka nol persen untuk kendaraan listrik yang berlaku efektif pada 1 Oktober 2020 (Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/13/PBI/2020)
3. Tambah daya listrik
   - Gratis bagi pemilik mobil listrik
   - Diskon 75 persen bagi pemilik sepeda motor listrik

Untuk Produsen

1. **Tax holiday** (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2020, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2019)
2. **Tax allowance** (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2018)
3. Pembebasan bea masuk (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2015)
4. Bea masuk ditanggung pemerintah
5. ***Super deduction tax*** dan ***investment allowance*** (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2020)

Kementerian Perindustrian Toyota Astra Motor Mobil Listrik

Kunci Pemulihan Bisnis Pariwisata Tahun Depan -



Antrean tamu yang akan melalukan check-in di Bogor Valley Hotel, 1 Desember lalu. TEMPO/M.A MURTADHO

- **Bisnis perhotelan dan pariwisata berupaya memenuhi standar kebersihan dan kesehatan untuk menggaet konsumen. .**
- **Kementerian Pariwisata memproyeksikan kunjungan wisatawan mancanegara berkisar 3-9 juta orang pada 2021. 21657**
- **Proyeksi bisnis pariwisata masih sulit diprediksi, bergantung pada kebijakan pemerintah. .**

JALAN Legian, kawasan Kuta, Bali, masih terlihat lengang pada Selasa siang, 1 Desember lalu. Hanya sebagian toko dan restoran yang buka. Sebelum pandemi virus *corona*, untuk menyusuri jalur utama di sana, biasanya butuh waktu sekitar 30 menit karena macetnya lalu lintas. Namun, siang itu, perjalanan hanya memerlukan waktu 10 menit.

Ni Putu Suartini, penjaga toko cendera mata di Jalan Legian, mengatakan kawasan Kuta sepi setelah terjadi pagebluk *corona*. Toko Putu yang menjual

patung serta aksesori seperti anting dan gelang tak lagi disambangi wisatawan. Sementara dulu bisa meraup pendapatan Rp 500 ribu-1,5 juta dalam sehari, kini Putu hanya dapat mengantongi Rp 50 ribu. “Mudah-mudahan turis lebih ramai pada liburan akhir dan awal tahun,” ujar perempuan asal Singaraja, Bali, itu.

Pagebluk juga membuat bisnis hotel di Bali lunglai. Ketua Bali Hotel Association I Made Ricky Darmika Putra menyebutkan baru 25 persen hotel di Bali yang beroperasi. Menurut dia, tingkat keterisian kamar hanya sekitar 30 persen. Padahal, menjelang masa libur akhir tahun, okupansi hotel bisa sampai 80 persen. “Wisatawan domestik masih mendominasi,” ucap Corporate General Manager Santrian Resorts & Villa tersebut.

Dinas Pariwisata Bali mencatat, hingga September lalu, hanya ada 1 juta wisatawan asing di Pulau Dewata. Padahal sebanyak 6 juta turis berkunjung pada periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun jumlah wisatawan lokal yang mengunjungi Bali cuma 3,7 juta orang hingga Oktober lalu. Pada 2018, jumlahnya mencapai 10,5 juta orang.

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjQ3OjU3Il0
Made Ricky mengatakan tamu-tamu hotel lebih selektif dan hati-hati dalam memilih penginapan di tengah pandemi. Sejak pariwisata Bali dibuka kembali pada Juli lalu, banyak wisatawan menanyakan soal penerapan protokol kesehatan serta sertifikasi kesehatan dan kebersihan dari Dinas Pariwisata ataupun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Konsumen baru memesan kamar setelah yakin hotel menjalankan protokol kesehatan. “Kami memperkirakan tren perilaku konsumen itu berjalan sampai pandemi reda,” katanya.

Kementerian Pariwisata mengadakan sertifikasi kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Ini protokol yang harus dipatuhi pengelola bisnis wisata agar bisa kembali beroperasi. Hingga Sabtu, 5 Desember lalu, program yang dikenal sebagai sertifikasi CHSE itu telah menjangkau hampir 11 ribu usaha pariwisata di 333 kota dan kabupaten.

Seperti di Bali, hotel-hotel di Bogor, Jawa Barat, menerapkan protokol CHSE untuk menggaet kembali tamu. Public Relations Hotel Salak The Heritage, Mega Jayanti Sutisna, mengatakan tamu yang menginap di situ tak hanya menjalani pemeriksaan suhu tubuh, tapi juga wajib mengisi formulir riwayat kesehatan. Hal yang sama berlaku bagi karyawan hotel. “Kami menolak tamu dari luar negeri yang belum menjalani karantina selama 14 hari,” tutur Mega.

Di Hotel Aston Bogor, pengelola menyemprotkan cairan disinfektan sedikitnya dua kali sehari. Penyemprotan bisa diulang jika tamu meminta kamar dan properti di dalamnya disterilkan lagi sebelum mereka tiba. Mencegah kerumunan

wisatawan, pengunjung restoran diatur dengan sistem ganjil-genap berdasarkan nomor kamar. Pengelola juga menyediakan sejumlah gel pembersih tangan di sejumlah lokasi. “Ada biaya operasional tak terduga karena adaptasi protokol kesehatan,” ujar Assistant Public Relations Manager Aston Bogor Hotel & Resort Meida Sari.



Pengunjung di area outdoor Hotel Aston Bogor, Jawa Barat, 3 Desember 2020. Tempo/M.A. Murtadho

Pejabat sementara Sekretaris Jenderal Indonesian Hotel General Manager Association, Bustamar Koto, mengatakan penerapan protokol kesehatan di hotel-hotel di Bogor membuat okupansi di wilayah itu mendekati 70 persen hingga Desember tahun ini. Padahal rata-rata tingkat hunian hotel di Jawa Barat sekitar 50 persen. Bustamar yakin bisnis pariwisata akan pulih tahun depan jika pengusaha konsisten menerapkan dan menjaga protokol kesehatan.

Meyakinkan pelanggan untuk kembali menginap, grup Accor dengan jaringan lebih dari 130 hotel di Indonesia tak hanya menerapkan standar CHSE yang dibuat pemerintah. Vice President Sales Marketing Distribution and Loyalty Accor Malaysia, Indonesia, dan Singapura Adi Satria mengungkapkan, pihaknya juga meluncurkan label ALLSAFE—berisi sekitar 100 standar kebersihan dan keamanan hotel. Menurut Adi, standar itu meliputi peningkatan pembersihan area publik dan kamar, aturan menjaga jarak di restoran, serta solusi pembayaran hotel yang nirsentuh.

Adi menyebutkan proyeksi bisnis pariwisata mendatang masih sulit diprediksi karena situasi yang dinamis. Menurut dia, arus wisatawan yang masuk ke Indonesia perlu waktu lebih lama untuk pulih. Namun, menurut catatan grup Accor, pariwisata dan bisnis perhotelan di Jakarta serta beberapa kota besar lain

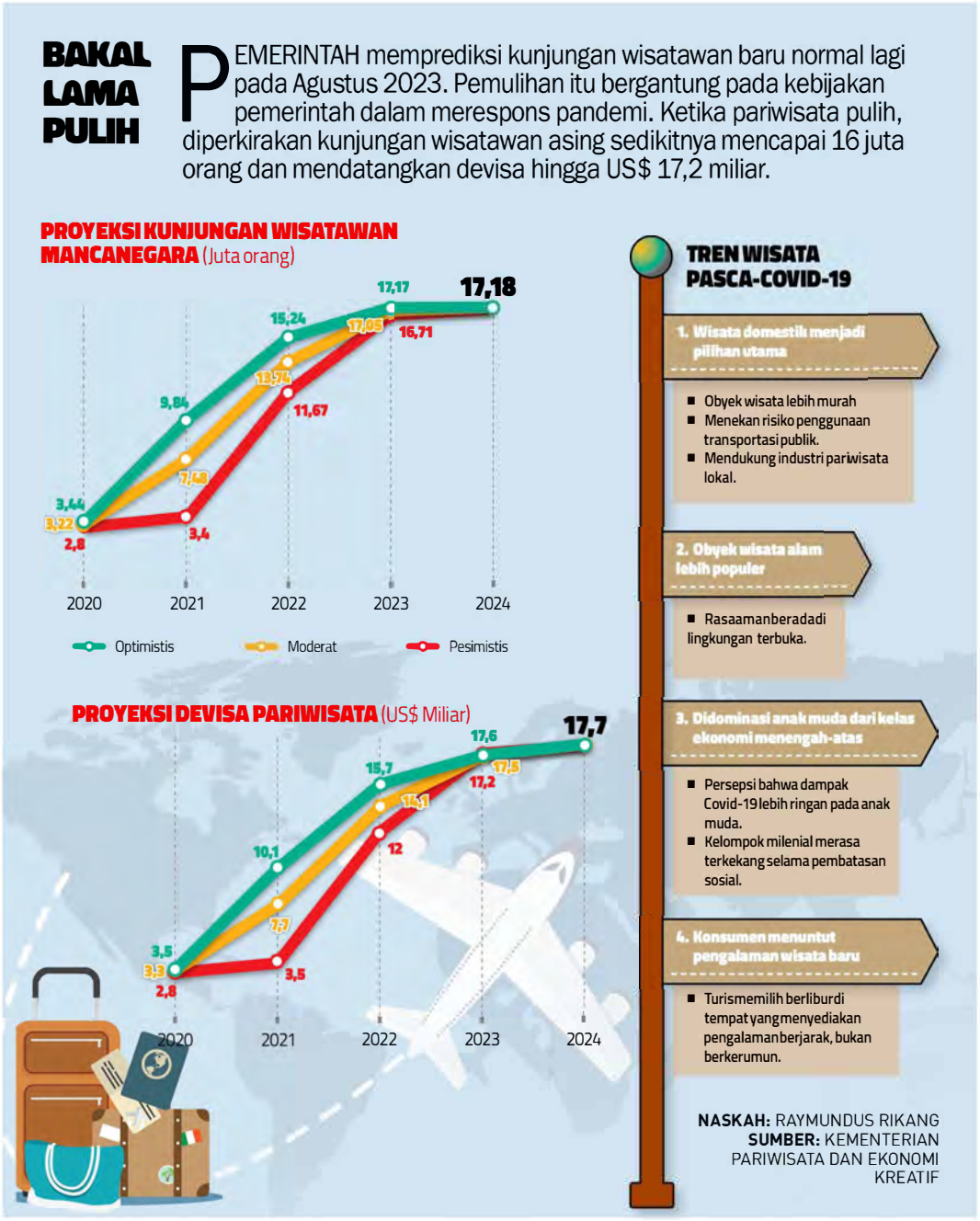
mulai bangkit. “Kebijakan pemerintah akan menentukan pemulihan kegiatan pariwisata,” ucapnya.

Seperti Adi, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Maulana Yusran mengatakan bisnis pariwisata tak akan langsung bergairah tahun depan. Dia memperkirakan sektor turisme masih lesu hingga triwulan pertama. Pariwisata diperkirakan mulai semarak ketika memasuki masa libur panjang, seperti Lebaran, liburan sekolah, serta akhir tahun.

Direktur Kajian Strategis Kementerian Pariwisata Wawan Rusiawan mengatakan setidaknya ada empat tren wisata pasca-pandemi Covid-19. Pertama, wisata domestik menjadi pilihan utama pelancong. Kedua, turis dari kalangan milenial dan kelas ekonomi menengah-atas lebih antusias bepergian. Ketiga, wisatawan menggemari lokasi yang masih bisa menerapkan *social distancing*. Terakhir, obyek wisata alam menjadi lebih populer dibanding sebelumnya. “Kementerian akan berfokus membenahi destinasi yang terkait dengan wisata alam,” kata Wawan.

Salah satu obyek wisata alam yang sedang berkembang adalah Belitung Mangrove Park di Bangka Belitung. Destinasi seluas 757 hektare ini dibangun di atas bekas lahan tambang timah. Pada 2018 dan 2019, jumlah pengunjung Belitung Mangrove Park hampir 80 ribu. Gara-gara pandemi Covid-19, angka kunjungan wisatawan sampai November 2020 cuma 16 ribu.

Ketua Hutan Kemasyarakatan Seberang Bersatu yang mengelola Belitung Mangrove Park, Marwandi, mengatakan destinasi wisata itu dikembangkan untuk mendukung tren wisata berbasis pelestarian lingkungan. Di Belitung Mangrove Park, turis antara lain dapat menangkap kerang bambu dan memancing ikan serta kepiting di kolam bekas lubang tambang. “Fasilitas kebersihan dan protokol kesehatan sudah kami siapkan untuk menarik minat wisatawan berkunjung pada tahun depan,” tutur Marwandi.



Outlook Ekonomi Bisnis Pariwisata Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif

Berkah Pandemi Usaha Energi



Kegiatan pemasangan solar panel di fasilitas pengolahan bersama komunitas lokal, Sumba, NTT, 3 September 2020./Dokumentasi SINARI

- **Ada perubahan selera investor yang lebih memperhatikan revenue dan profitabilitas. .**
- **Perusahaan rintisan di sektor hijau kesulitan mendapat pendanaan untuk kembangkan bisnis karena revenue model-nya belum jelas. 21657**
- **Memiliki peluang sangat besar di masa mendatang .**

SEPANJANG 2020, pandemi Covid-19 menumbangkan banyak usaha rintisan yang beroperasi di Indonesia. Sebut saja Sorabel, *startup e-commerce fashion* asal Yogyakarta, atau Airy Room, yang menangani bisnis hotel sejak 2015. Hooq dan Eatsy, *startup* dari Singapura, yang masing-masing menyediakan layanan video *streaming* dan usaha kecil-mikro, juga kolaps akibat krisis ekonomi.

Tak hanya di Indonesia, wabah memukul bisnis usaha rintisan di dunia. Startup Genome, inkubator usaha rintisan di 150 negara yang berpusat di Amerika Serikat, mencatat pertumbuhan empat dari sepuluh *startup* berada di zona merah sejak Desember 2019. Penyebabnya, banyak investor menahan diri untuk membenamkan modal di jenis usaha digital ini.

CEO Startup Genome Jean-Francois Gauthier dalam Global Startup Ecosystem Report 2020 mengungkapkan, di tengah pesimisme mengenai pertumbuhan bisnis startup, ada 10 persen pengusaha yang optimistis bisnisnya tetap bertumbuh.

Sehingga mereka tetap optimistis bisa mendapatkan pendanaan dari investor untuk mengembangkan bisnis di tengah pandemi. “Krisis mempercepat perubahan transaksi konvensional ke digital,” tulisnya. “Ini panggilan kepada wirausaha agar berinovasi lebih cepat.”



Eddi Danusaputro, CEO Mandiri Capital Indonesia. (foto: https://mandiri-capital.co.id/)

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjQ3OjU4Il0 Gauthier merujuk pada data bahwa selama pandemi virus *corona* sejak Desember tahun lalu, muncul 50 usaha berkategori *unicorn*—perusahaan rintisan yang valuasinya lebih dari US$ 1 miliar atau Rp 14,5 triliun. Tak hanya mengubah kebiasaan konsumen, pandemi juga mengubah cara pandang investor terhadap bisnis ini.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) Eddi Danusaputro mengatakan para investor menaruh perhatian pada potensi pertumbuhan pasar, kemampuan beradaptasi, kualitas pendiri, model bisnis yang jelas, dan pemakaian modal yang efisien. “Saat ini pemodal menekankan pentingnya cara mendapatkan untung, terutama untuk usaha yang sudah berjalan,” kata Eddi, Jumat, 4 Desember lalu.

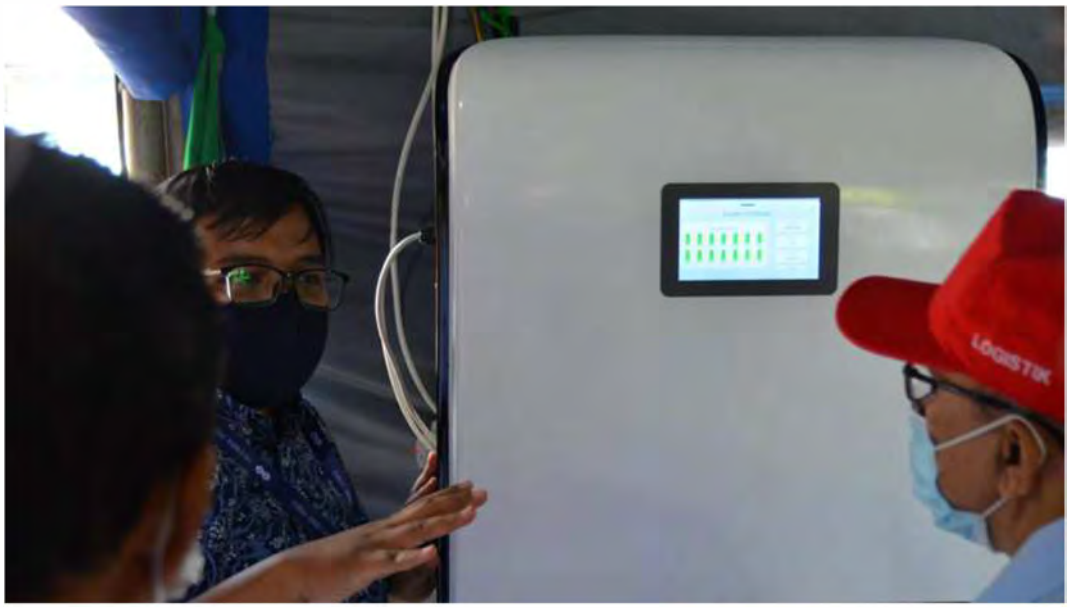
Eddi, yang juga CEO Mandiri Capital Indonesia, memperkirakan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia masih bertumpu pada pertumbuhan jasa keuangan digital dan *e-commerce*. Menurut dia, *e-commerce* memegang peran penting untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Sektor ini menjadi penggerak ekonomi penting karena menciptakan lapangan kerja serta memastikan perputaran barang dan jasa.

Di sektor bisnis rintisan hijau, Eddi mengatakan mulai terjadi peningkatan jumlah pengusaha yang bermain meski tak seagresif sektor lain. Ada persepsi yang

bercokol bahwa sektor ini lebih sulit diandalkan untuk mendapat penghasilan dan mencetak laba. Karena itu, sektor ini kurang diminati investor yang memperhatikan model bisnis untuk menghasilkan pendapatan dan laba. Laporan Amvesindo yang berjudul Lanskap Industri Startup Indonesia menunjukkan pendanaan terhadap sektor hijau seperti agrobisnis nyaris tak ada selama 2019.

Namun, menurut Eddi, persepsi tersebut perlahan tergerus karena tetap ada investor yang berminat memberikan pendanaan dan ada beberapa korporasi yang makin terbuka untuk berkolaborasi. “Ada investor yang berfokus pada investasi ke perusahaan rintisan yang mendukung *green economy* dan turut memberikan solusi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,” tuturnya. Di samping itu, kesadaran akan lingkungan yang mulai tumbuh selama pandemi dan adanya dorongan pembangunan lestari turut menunjang pertumbuhan perusahaan rintisan di sektor ini ke depan.

Ihwal sulitnya pendanaan untuk sektor usaha rintisan ramah lingkungan, Wynn Nathaniel Wijaya mengamini. Pendiri Weston Energy dan Sinari, dua usaha digital pengadaan energi bersih dan tenaga surya, ini mengatakan sektor tersebut masih kurang menarik investor karena membutuhkan modal besar dalam membangun teknologi, sementara model bisnis dan permintaannya belum jelas. Di Indonesia, baru ada satu inkubator untuk sektor ini.



Sylendra Power membantu memberikan Energy Harvester yang berfungsi untuk menyimpan listrik bersih yang dihasilkan dari sinar matahari di PLTS darurat , Posko Dekontaminasi Gugus Tugas Kab. Sleman, Juli 2020./Linkedin.com/Sylendra Power

Karena itu, untuk menarik minat investor, para pendiri usaha rintisan ramah lingkungan memerlukan inovasi lebih. Melalui Sinari, Wynn mengombinasikan pemanfaatan energi bersih berbasis panel surya dengan sektor agrikultur untuk para petani di Sumba Timur, Ende, dan Alor, Nusa Tenggara Timur. Tujuannya

adalah meningkatkan nilai tambah produk sehingga petani tak lagi menjual produk gelondongan, yang membuat nilai jualnya tak bertambah.

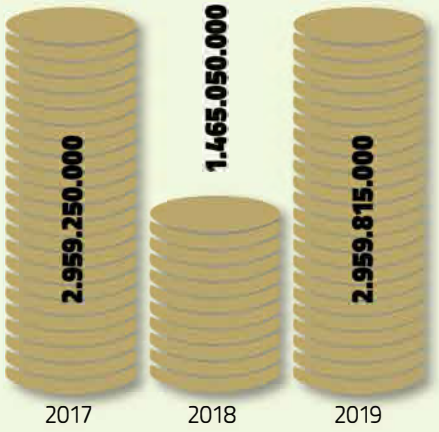
Wynn mencontohkan, harga komoditas kacang mete mentah yang hanya Rp 17 ribu per kilogram melonjak menjadi Rp 142 ribu setelah diolah. “Kami mengidentifikasi kendala petani dalam memberi nilai tambah pada produknya adalah keterbatasan pasokan energi,” ucapnya. Karena itu, Sinari memberikan sumber energi bersih sekaligus membangun seluruh sistem produksi yang relatif ramah lingkungan bagi para petani.

Pendapatan ia bagi dua dengan petani dari harga jual. Komoditas berupa kopra, kelapa, dan kacang kenari yang telah diolah itu dipasarkan ke 120 usaha kecil-menengah di Indonesia hingga Vietnam, Cina, dan Singapura.

TUMBUH DI TENGAH PANDEMI

WABAH virus *corona* sepanjang 2020 memukul banyak sektor, termasuk perusahaan rintisan. Beberapa terpaksa menutup usaha, tapi banyak yang bertahan dengan mengembangkan bisnis. Menurut Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo), sektor teknologi finansial (*fintech*), *e-commerce*, dan logistik tetap tumbuh selama pandemi. Sekretaris Jenderal Amvesindo Eddi Danusaputro mengatakan transaksi sebagian *startup* justru melonjak dan menjangkau konsumen yang makin luas. "Hingga kuartal ketiga 2020, ada 52 transaksi pendanaan oleh perusahaan modal ventura," katanya. Peluang *startup* tumbuh di tengah pandemi setahun mendatang masih sangat besar.

PENDANAAN YANG DIUMUMKAN DALAM TIGA TAHUN TERAKHIR (US$)



PENDANAAN BERDASARKAN TAHAP INVESTASI SELAMA 2019

Pendanaan awal	: 40 transaksi
Pra-seri A	: 13 transaksi
Seri A	: 31 transaksi
Pra-seri B	: -
Seri B	: 19 transaksi
Seri C	: 10 transaksi
Seri D	: 3 transaksi
Seri E	: -
Seri F	: 2 transaksi
Seri G	: -

PENDANAAN SAMPAI KUARTAL III 2020 DARI MODAL VENTURA

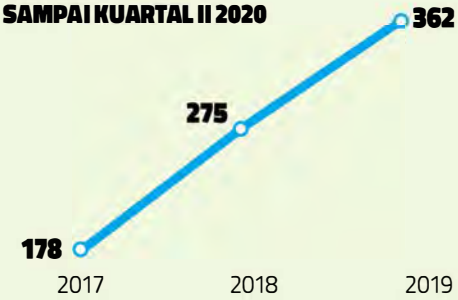
Fintech	: 8 transaksi
Edutech	: 6 transaksi
Software as a service	: 6 transaksi
New retail	: 5 transaksi
Logistik	: 4 transaksi
E-commerce	: 4 transaksi
Jumlah pendanaan total	: US$ 1.920.900.000

PERUSAHAAN YANG MENDAPAT PENDANAAN DI ATAS US$ 20 JUTA

Kopi Kenangan	: US$ 109 juta
Kargo Technologies	: US$ 31 juta
GudangAda	: US$ 25,4 juta
Investree	: US$ 23,5 juta
Koinworks	: US$ 20 juta
Shipper	: US$ 20 juta

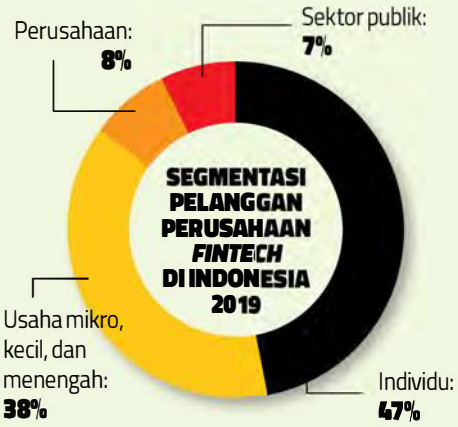
SUMBER: ASOSIASI MODAL VENTURA UNTUK STARTUP INDONESIA, ASOSIASI FINTECH INDONESIA

JUMLAH PERTUMBUHAN STARTUP FINTECH DILIHAT DARI KEANGGOTAAN ASOSIASI FINTECH INDONESIA SAMPAI KUARTAL II 2020

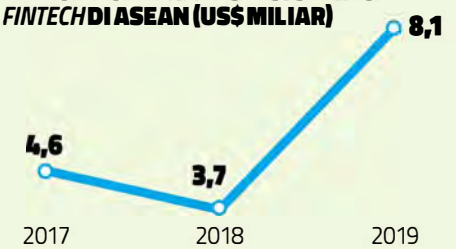


NILAI TRANSAKSI YANG DIBUKUKAN DARI *FINTECH* PER SEGMEN SEPANJANG 2020

- Pembayaran digital : **Rp 93 triliun**
- Pinjaman online : **Rp 113,46 triliun**
- Layanan urun dana : **Rp 15,5 miliar**
- Inovasi keuangan digital : **Rp 2,1 triliun**



PERTUMBUHAN INVESTASI STARTUP *FINTECH* DI ASEAN (US$ MILIAR)



SEKTOR YANG BERTAHAN SELAMA PANDEMI

- *Fintech*
- *E-commerce*
- Logistik
- *Healthtech*
- *Edutech*

SEKTOR YANG DIPROYEKSIKAN MENDAPAT PENDANAAN BESAR

- Digitalisasi UMKM dan *supply chain*
- *Social commerce*
- *Foodtech*

Menurut Wynn, *pivot* atau pengembangan bisnis yang ia lakukan ini justru menarik minat investor. Ia telah mendapatkan pendanaan di kisaran US$ 80-100 ribu dan mulai mencari peluang di Silicon Valley, kawasan inkubator perusahaan rintisan asal Amerika Serikat yang kerap dinobatkan sebagai inkubator dengan ekosistem terbaik. Sebelumnya, ia hanya berfokus menyediakan energi bersih untuk perumahan di desa-desa yang belum memiliki akses energi.

Usaha rintisan hijau lain yang bergerak di bidang energi bersih adalah Sylendra Power di Yogyakarta. Reynaldi Pradipta, CEO Sylendra, mengatakan inti bisnis perusahaan rintisannya adalah pemanfaatan dan pengembangan energi bersih terbarukan. Bisnis ini ia bangun dari pengalamannya sewaktu tinggal di dekat Pembangkit Listrik Tenaga Uap Cilacap, Jawa Tengah. “Meski tinggal di dekat PLTU, masyarakat kerap merugi karena sering ada pemadaman listrik, polusi udara, dan nelayan pun kerap merugi karena tangkapan berkurang drastis semenjak PLTU berdiri,” katanya.

Reynaldi tak terlampau melihat pendanaan sebagai masalah besar. Sebab, perusahaannya dibangun dengan model pendapatan dan target pasar yang jelas. Sylendra menawarkan pemanenan dan penyimpanan energi untuk perusahaan dan perumahan. Ia memanfaatkan peluang dalam berbagai peraturan di tingkat daerah, seperti di Yogyakarta dan Bali, yang mewajibkan penggunaan panel surya pada sektor usaha tertentu.

Selama pandemi, Sylendra bisa bertahan melalui bisnis jasa pemeliharaan perangkat yang telah terpasang. Selain itu, pemerintah daerah membutuhkan pasokan energi panel surya untuk pos siaga Covid-19 di beberapa lokasi.

Menurut Reynaldi, yang dibutuhkan oleh usaha rintisan ramah lingkungan di Indonesia saat ini adalah kolaborasi dengan sektor lain, seperti perusahaan rintisan di bidang teknologi pendidikan. Ia juga berharap pemerintah membuat langkah nyata mendorong industri digital melalui penurunan pajak impor suku cadang energi terbarukan.



Founder Sinari, Wynn Nathaniel. (Dokumentasi Sinari)

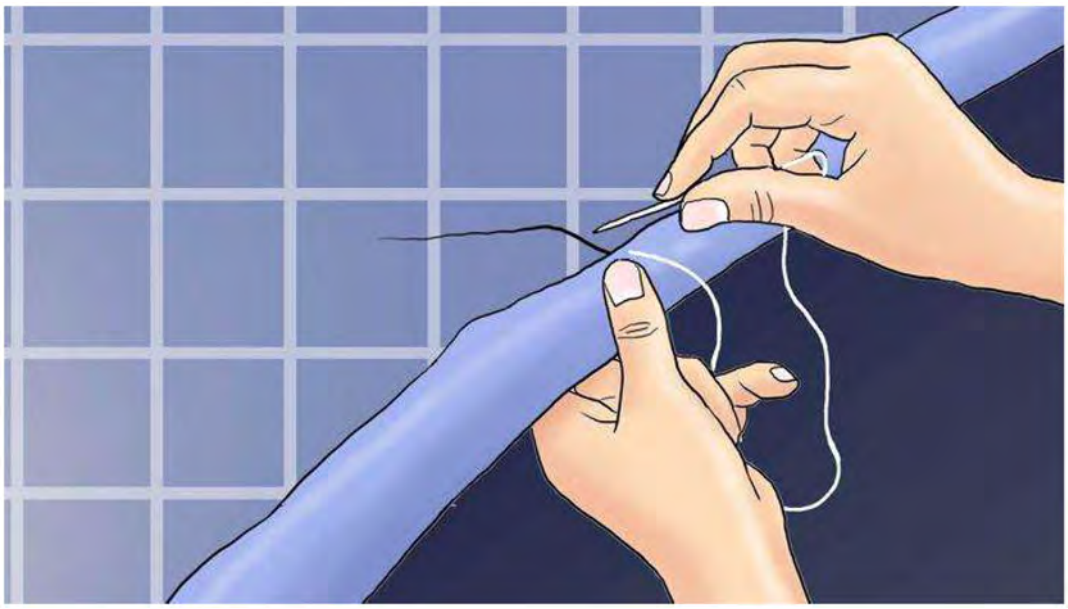
Dengan potensi besarnya turut menurunkan emisi, Wynn Wijaya mengatakan, dukungan pemerintah bagi pelaku usaha hijau sangat diperlukan. Tanpa insentif, pengusaha *startup* akan terseok-seok berjuang sendiri menopang bisnis mereka yang belum banyak diminati masyarakat dan dukungan infrastruktur.

Baik Wynn maupun Reynaldi percaya bisnis digital yang mendorong produk ramah lingkungan akan berkembang di masa mendatang. Selain meningkatnya kesadaran, kebutuhan Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 41 persen atau 1,1 gigaton setara CO_2 pada 2030 akan turut mendorong jenis usaha ini.

Di luar soal potensinya, pemain usaha rintisan hijau juga masih sedikit, sementara kebutuhan energi Indonesia terus naik akibat pertambahan penduduk dan tumbuhnya daerah perkotaan. Pandemi virus *corona* yang membuat aktivitas digital menjadi hal yang lumrah akan membuat usaha ini turut menikmati hasilnya.

Outlook Ekonomi ekonomi digital

Pandemi dan Pembiayaan Berkelanjutan



ilustrasi: tempo/imam yunni

- **Pandemi memberikan pelajaran pembangunan berkelanjutan. .**
- **Undang-Undang Cipta Kerja jadi tantangan berat 21657**

PANDEMI adalah bencana kemanusiaan. Hingga 4 Desember 2020, menurut catatan Badan Kesehatan Dunia (WHO), jumlah orang yang terjangkit virus *corona* mencapai 64,3 juta dengan angka kematian hampir 495 ribu. Ekonomi pun mengalami kontraksi hingga 6 persen. Menurut Bank Dunia, pandemi *corona* menjadi krisis paling buruk sejak Perang Dunia II.

Indonesia turut terpengaruh. Kontraksi ekonomi mencapai 5,32 persen pada kuartal kedua dan 3,49 persen pada kuartal ketiga. Pada akhir November lalu, Menteri Keuangan mengumumkan jumlah penganggur bertambah 2,67 juta menjadi 9,77 juta orang. Menurut survei Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 98 persen usaha mikro atau sekitar 63 juta usaha terkena dampak pandemi.

Program pemulihan pemerintah lebih banyak ditujukan untuk perlindungan sosial dan stimulus bagi dunia usaha, terutama usaha kecil dan mikro. Ini saatnya pemerintah meningkatkan kemampuan adaptasi dan daya lenting masyarakat serta

dunia bisnis agar bisa mengatasi segala dampak dari macam-macam krisis, terutama krisis iklim yang mengakibatkan bencana kemanusiaan.

Dengan target menurunkan emisi 41 persen atau 1,1 gigaton setara CO_2 pada 2030, Indonesia membutuhkan US$ 247,2 miliar atau sekitar US$ 19 miliar per tahun. Menurut Menteri Keuangan, pendanaan iklim di bawah 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menurun pada tahun ini karena anggaran tersedot untuk mengatasi pandemi.

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjQ4OjAxIl0
Di luar APBN, sumber pembiayaan melalui obligasi hijau sejak 2018 mendapat US$ 2,75 miliar per tahun. Dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek energi terbarukan, efisiensi energi, serta mitigasi banjir. Semua pendanaan iklim terpusat di lembaga baru Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, yang mengelola US$ 103,78 miliar. Ekspektasi penurunan emisi dari pendanaan itu sebesar 8,9 gigaton setara CO_2.

Dari pendanaan publik itu, dalam lima tahun terakhir (2016-2020) Indonesia telah mampu mendanai sekitar 34 persen dari kebutuhan pembiayaan iklim nasional setiap tahun. Untuk mengatasi gap pembiayaan sebesar 66 persen, Indonesia membutuhkan pembiayaan dari sektor swasta. Cara efektif mobilisasi kontribusi sektor swasta dalam investasi hijau adalah meningkatkan peran sektor keuangan, termasuk bank, lembaga keuangan nonbank, dan pasar modal.

Komitmen Indonesia dalam keuangan berkelanjutan dijabarkan dalam Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan 2015-2019 yang diprakarsai Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang keuangan berkelanjutan. Pada 2018, delapan bank masuk kelompok keuangan hijau, yang membiayai proyek-proyek energi terbarukan, efisiensi energi, bangunan hijau, infrastruktur hijau, pencegahan polusi dan pengelolaan sampah, pertanian berkelanjutan, perikanan berkelanjutan, serta pariwisata berkelanjutan.

Pariwisata masih dianggap berisiko tinggi. Di sektor infrastruktur, perbankan menanggung sebagian besar pendanaan. Secara berurutan, pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan dengan tingkat *non-performing loan* rendah hingga tinggi pada 2017 adalah pembiayaan pada sektor energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, perikanan berkelanjutan, bangunan hijau, efisiensi energi, pariwisata berkelanjutan, infrastruktur hijau, serta pencegahan polusi dan pengelolaan sampah.

Pemerintah juga mendorong asuransi, reasuransi, dan lembaga pembiayaan memberikan pembiayaan berkelanjutan. Dari survei Ismalina *et al* (2018)

terhadap 44 perusahaan asuransi, 78 persen responden memahami pengembangan produk asuransi yang menimbang manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Di sektor pasar uang, dorongan membentuk pasar modal yang berkelanjutan muncul sejak 2009 melalui pembentukan indeks investasi berkelanjutan dan bertanggung jawab. Indeks ini menilai bermacam bentuk pertimbangan usaha yang berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan, tata kelola perusahaan, keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia, hak asasi manusia, dan perilaku bisnis dengan etika bisnis yang diterima di tingkat internasional.

Di tengah pandemi dan usaha-usaha ramah lingkungan itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Jika tidak dikawal peraturan pelaksanaannya, pasal-pasal yang mengatur lingkungan hidup, terutama tentang analisis mengenai dampak lingkungan, kemudahan perizinan usaha untuk kawasan hutan lindung, pemusatan pengurusan izin lingkungan, hingga pemberian bebas konsesi kepada perusahaan pertambangan, akan menjadi jalan mundur pembangunan berkelanjutan.

Penurunan emisi karbon nasional terhadap target 2030—hingga 7,85 persen pada 2018—menunjukkan inkonsistensi kebijakan dan penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran aturan lingkungan hidup. Akibatnya, skor pembangunan berkelanjutan 2020 Indonesia masih di bawah Thailand, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Skor Indonesia 101, hanya di atas Myanmar dan Kamboja.

Pandemi seharusnya memberikan pelajaran dengan tidak membuat kebijakan yang bertolak belakang dengan pembangunan berkelanjutan.

Outlook Ekonomi

Wawancara Kepala Bappenas Suharso Monoarfa: Dari Pemulihan Pandemi hingga Ekonomi Hijau



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa di kantor Tempo, 27 Agustus 2020. Tempo/Gunawan Wicaksono

- **Pandemi Covid-19 membuat pemerintah masih harus memfokuskan agenda pembangunan tahun depan pada pemulihan ekonomi. .**
- **Untuk mendongkrak daya beli masyarakat, pemerintah mengucurkan dana dalam jumlah besar yang memicu defisit APBN mencapai lebih dari 6 persen hingga akhir tahun ini. 21657**
- **Meski mengutamakan pemulihan ekonomi, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan pembangunan berkelanjutan dan program ramah lingkungan. .**

PEREKONOMIAN nasional yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 membuat ruang gerak pemerintah terbatas. Akibat pagebluk, Indonesia memasuki resesi. Seperti di banyak negara, pemerintah masih akan memfokuskan agenda pembangunan tahun depan pada pemulihan ekonomi. “Kami masih berkonsentrasi untuk penanganan pandemi dan bantalan sosial,” kata Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, 65 tahun, dalam wawancara khusus dengan *Tempo* pada Rabu dan Kamis, 2 dan 3 Desember lalu.

Suharso mengatakan pandemi ini tidak hanya merenggut banyak jiwa, tapi juga menyebabkan 2,67 juta orang menganggur. Dengan merosotnya pendapatan masyarakat, konsumsi rumah tangga menjadi sektor yang paling terpukul akibat pandemi. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menggelontorkan bantuan sosial dalam jumlah besar hingga memicu defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Suharso memperkirakan defisit APBN hingga akhir tahun ini mencapai 6,6-6,7 persen.

Meski berfokus pada pemulihan ekonomi, Suharso memastikan pemerintah tetap berkomitmen merealisasi pembangunan berkelanjutan dan program yang ramah lingkungan. Target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, misalnya, pemerintah mencanangkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030 sesuai dengan Perjanjian Paris. Bappenas juga mengawinkan konsep ekonomi hijau dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. “Kami sudah memasukkan dan mengarusutamakan energi yang ramah lingkungan ke dalam semua proyek besar,” ujarnya.

Melalui konferensi video, Suharso berbincang dengan wartawan *Tempo*, Sapto Yunus, Mahardika Satria Hadi, Aisha Shaidra, Khairul Anam, Retno Sulistyowati, dan Nur Alfiyah. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini menjelaskan kondisi perekonomian nasional yang terpuruk akibat pandemi, proyeksi ekonomi tahun depan, hingga komitmen pemerintah terhadap ekonomi hijau dan upaya menurunkan emisi karbon.

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjUyOjQ4Il0

Pandemi Covid-19 telah memasuki bulan kesembilan. Dalam catatan Bappenas, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian nasional?

Berbeda dengan krisis ekonomi sebelumnya yang banyak berdampak terhadap kelas menengah ke atas, sekarang yang kena justru kelas menengah ke bawah. Masyarakat kelas menengah ke atas menahan pembelian, berjaga-jaga, karena mereka belum percaya apakah keadaan ini benar-benar bisa terkontrol. Mereka belanja seperlunya, selebihnya disimpan. Akibatnya, dana pihak ketiga naik luar biasa. Tapi dana pihak ketiga juga tidak bisa disalurkan. Inilah mengapa kehadiran negara dalam bentuk penyediaan bantalan sosial menjadi penting.

Hampir semua negara mengeluarkan dana pemerintah luar biasa besar untuk menjaga daya beli, konsumsi rumah tangga, sehingga defisitnya besar-besaran.

Apakah respons yang selama ini diambil pemerintah tepat?

Menurut saya pas. Buktinya, setelah triwulan kedua, saat pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi di atas 5 persen, pada triwulan ketiga masih minus tapi lebih kecil. Ini menunjukkan ada tren yang baik, tapi di konsumsi rumah tangga belum. Yang menyangga adalah konsumsi pemerintah. Belanja pemerintah menjadi tulang punggung. Berulang kali presiden mengingatkan agar APBN segera dibelanjakan. Jadi pemerintah telah merespons dan beradaptasi dengan tepat terhadap keadaan ini, direspons cukup lentur, memberikan bantalan sosial yang pas, mendorong semua pekerjaan yang menciptakan daya beli.

Bukankah kondisi lapangan pekerjaan saat ini tidak lebih baik?

Lapangan pekerjaan kita sekarang ini berkurang. Di Indonesia ada total 128,45 juta orang bekerja. Menurut data Badan Pusat Statistik per Agustus 2020, yang bekerja penuh tinggal 82,02 juta atau turun 9,46 juta dari tahun lalu. Artinya, 9,46 juta orang menjadi pekerja paruh waktu dan setengah penganggur. Di antara jumlah itu, 310 ribu orang benar-benar kehilangan pekerjaan. Pekerja paruh waktu naik menjadi 33,34 juta, setengah penganggur juga naik menjadi 13,09 juta. Ini mengakibatkan terjadinya kenaikan angka penganggur 2,67 juta orang dari tahun lalu.

Sektor apa yang paling terpukul?

Tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga memprihatinkan. Dari data BPS, konsumsi rumah tangga yang paling buruk adalah pengeluaran untuk transportasi serta restoran dan hotel. Ini karena masyarakat berhenti bekerja dan pendapatan menurun. Sementara itu, pendidikan dan kesehatan masih surplus.

Berapa perkiraan angka defisit APBN pada akhir tahun ini?

Realisasinya sampai 31 Oktober lalu hanya 4,67 persen. Saat dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kita punya target defisit 6,34 persen. Tapi sampai akhir tahun ini diperkirakan malah naik jadi 6,6 sampai 6,7 persen.

Dengan kondisi seperti itu, bagaimana proyeksi ekonomi tahun depan?

Kita berharap sekali bisa melandaikan kurva pandemi, bisa mengendalikan jauh lebih baik. Apalagi tahun depan sudah ada vaksin, sehingga ketahanan kita terhadap Covid-19 lebih baik. Pada saat itulah ekonomi mulai merambat tumbuh

dengan baik. Kalau keseimbangan ini bisa terjadi, seperti falsafah dua sayap angsa yang harus seimbang, ekonomi Indonesia bisa terbang.

Dengan berfokus pada pemulihan ekonomi, apakah pemerintah tahun depan tetap bisa merealisasi pembangunan berkelanjutan dan program yang ramah lingkungan?

Oh, harus. Covid-19 mengakibatkan emisi gas rumah kaca dengan sendirinya menurun di seluruh bumi karena mobilitas orang sedikit. Kalau kita lihat data mobilitas Google, penurunan gas rumah kaca sangat tampak saat terjadi pembatasan sosial berskala besar di semua negara. Itu terjadi penurunan hampir 1 persen di beberapa kota. Ada yang bahkan 1,8 persen.

Bagaimana pemerintah menjalankan pembangunan berkelanjutan?

Indonesia harus siap masuk dalam transformasi ekonomi. Di dalam transformasi ekonomi yang akan datang, digitalisasi, langit biru, ekonomi hijau, ramah lingkungan harus berjalan serentak. Tidak bisa hanya salah satu. Contohnya, ketika kita mau menurunkan efek gas rumah kaca, industri otomotif harus secara bertahap berpindah ke, misalnya, industri yang tidak menggunakan bensin, tapi gas. Bahkan ke depan menggunakan baterai. Kalau tadinya kita berbicara tentang bauran energi hanya di listrik, sekarang bauran energi juga ada di sektor otomotif, pembangkit listrik, sehingga makin luas.

Contoh implementasinya seperti apa?

Kita punya gagasan besar untuk membuat *solar farm* sebesar 20 gigawatt di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, karena sinar mataharinya kuat di sana. Tapi sekaligus harus ada baterainya biar (listriknya) dapat dipakai dan dipasok ke daerah lain. Pulau Jawa sekarang ini punya listrik 26-27 gigawatt. Baru sekitar 12 persennya yang bersumber dari energi baru dan terbarukan. Kalau nanti kita bisa membuat *smart grid* antara Jawa, Bali, dan NTT dapat menaikkan konsumsi listrik kita. Konsumsi listrik kita itu kecil, cuma 1.014 kWh per kapita. Yang paling tinggi di Jawa, yaitu 1.400-an kWh. Kalau kita bisa bikin *solar farm*, itu bagus. Paling tidak di NTT, yang sekarang listriknya dihidupkan oleh diesel.

Apakah hal itu memungkinkan untuk dilakukan?

Isu yang paling penting di sini adalah harga. Listrik yang diproduksi dan dibeli oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara) di daerah-daerah yang jauh itu kan mahal sekali, sebesar 18-20 sen dolar Amerika per kWh. Sementara itu, energi baru dan terbarukan cuma 12 sen. Bahkan, kalau kita bantu beberapa infrastrukturnya, bisa turun sampai 8 sen. Jangan sampai energi ini dihadapkan dengan energi murah yang didapatkan dari batu bara tapi harga untuk merawat bumi jadi mahal.

Apalagi nanti mulai tahun 2030 dan puncaknya 2050 hampir semua negara di Eropa dan berbagai negara sudah akan mempraktikkan *green economy*, *blue sky energy*. Mereka hanya akan mengimpor barang-barang dari negara yang produksinya didukung oleh energi yang baru dan terbarukan, bukan energi fosil.

Apa dampaknya bagi Indonesia?

Kalau kita memproduksi sesuatu dengan listrik yang tidak rendah karbon, ramah lingkungan, tidak masuk cakupan ekonomi hijau, akan terkena denda. Kita harus siap mulai hari ini sehingga makin banyak yang kita bisa peroleh. Dari pendekatan ini juga akan menciptakan lapangan kerja baru yang cukup besar di ekonomi hijau ini.

Di mana posisi Indonesia dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan ini?

Kita sudah berada di belakang dari agenda energi baru dan terbarukan. Kita tertinggal jauh dari semua negara. Malu kita.

Seberapa tertinggal Indonesia dari negara-negara tetangga?

Kita ketinggalan jauh. Konsumsi listrik kita cuma 1.000-an kWh per kapita per tahun. Kalah dibanding Malaysia yang 1.400 kWh. Singapura jauh di atas kita. Listrik mereka dari mana? Gas ramah lingkungan yang asalnya dari Indonesia. Ini kan lucu sekali. Sementara kita sudah rendah konsumsinya, listriknya kita ambil dari proses yang merusak lingkungan. Itu aneh bin ajaib. Padahal yang ramah lingkungan kita ekspor. Itu tidak boleh lagi terjadi.

Bagaimana Bappenas memastikan program-program ekonomi hijau dapat tetap diwujudkan pada tahun depan?

Kami sudah memasukkan dan mengarusutamakan energi yang ramah lingkungan ke semua proyek besar, termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Jalannya pembangunan kita dari semua sektor merujuk pada SDGs. Di dalamnya ada energi baru dan terbarukan. Misalnya, sepuluh destinasi wisata yang kami dorong tentu akan memproduksi jasa yang luar biasa dan kita berharap bisa kembali meraup devisa sebesar 20 miliar dolar Amerika. Itu nanti diproduksi dari ekonomi hijau. Sekarang sudah banyak hotel yang menerapkan *smart energy*. Di Belitung, misalnya, ada hotel dalam bentuk *camping* yang lampunya tidak dialiri listrik hasil pembakaran diesel. Di Bali tidak boleh lagi memakai plastik yang tidak ramah lingkungan.



Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat peluncuran program Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI) yang bertujuan melestarikan terumbu karang untuk kesejahteraan masyarakat, di Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (13/11/2020). ANTARA FOTO/Olha Mulalinda

Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon, tapi di saat bersamaan kebijakan yang diambil pemerintah kerap tidak sinkron dengan komitmen itu, seperti pembukaan lahan untuk ibu kota baru, lumbung pangan, dan penggunaan energi fosil yang masih tinggi. Bagaimana Indonesia bisa memenuhi komitmen itu?

Justru kami masuk ke lokasi yang hutannya rusak dan sudah dirusak oleh perambah hutan dan industri. Kehadiran ibu kota di sana justru untuk

memperbaiki kembali hutan itu. Makanya ibu kotanya disebut Nusa Rimba. Listriknya nanti tidak akan diambil dari batu bara. Mungkin juga kita tidak akan ambil dari air. Kalaupun dibikin waduk, itu untuk air bersih. Listrik akan diperoleh dari pembangkit tenaga matahari, angin, gas. Ibu kota ini kalau dibangun akan menjadi ibu kota yang ramah lingkungan.

Apakah pengembangan kendaraan ramah lingkungan juga diprioritaskan?

Secara bertahap. Kami mengingatkan perusahaan-perusahaan otomotif untuk memulai dengan sepeda motor yang memakai baterai. Motor termasuk penghasil polusi tertinggi. Tapi penggunaan baterai harus dipikirkan cara membuangnya. Itu bisa polusi juga. Setelah itu kendaraan umum, seperti bus, akan menggunakan baterai atau energi campuran gas atau hidrogen. Itu semua dirancang mulai 2021.

Bappenas masih optimistis Indonesia bisa memenuhi target penurunan emisi karbon global pada 2030 dan 2050?

Kami bisa mengatakan optimistis karena Bappenas yang melakukan *clearing house* perencanaan. Saya berjanji pada 2022 akan terlibat langsung dalam hal Rencana Kerja Pemerintah untuk menyusun APBN. Saya sudah minta izin kepada Presiden, saya akan memimpin langsung. Dalam rangka SDGs, *green economy*, transformasi ekonomi, sehingga kita tahu pengalokasian APBN mengarah ke sana.

Berarti belum dimulai untuk anggaran tahun depan?

Kami masih berkonsentrasi untuk penanganan pandemi dan bantalan sosial. Kami sudah memberi perhatian kepada ekonomi hijau, tapi terus terang belum dalam kerangka kerja yang besar.

Lalu apa saja fokus perhatian pemerintah untuk program kerja tahun depan?

Pertama, kami ingin memperbaiki sistem kesehatan nasional supaya ketahanan kita bagus. Kedua, pemulihan ekonomi, antara lain di sektor industri dan pariwisata. Kami juga sudah mengusulkan kepada Presiden untuk ke depan berfokus pada UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Di seluruh dunia, UMKM didorong oleh negara. Negara harus berpihak kepada mereka.

Pemerintah berkomitmen mengurangi emisi 41 persen pada 2030, bukan lagi 29 persen, karena Indonesia telah menerima bantuan internasional. Bagaimana melaksanakannya?

Kita menanami kembali hutan. Saya kira itu nilainya tinggi sekali untuk penurunan gas rumah kaca. Sekitar 53 persen koral di dunia ada di Indonesia.

Sebanyak 85 persennya ada di Raja Ampat, hampir 15 persennya di Laut Sawu, NTT. Koral kekuatannya 20 kali per satuan luas yang sama dibanding hutan untuk menyerap karbon. Kita harus menjaganya. Kita juga harus menanami kembali *mangrove* di seluruh pantai di Indonesia. Kami ada programnya dengan Bank Dunia. Saya kira semua itu akan cepat menurunkan 1-1,8 persen untuk efek gas rumah kaca.

(*Berdasarkan data Bappenas, perlambatan ekonomi telah mengakibatkan penurunan emisi gas rumah kaca pada 2020 menjadi sekitar 29,5 persen. Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi pascapandemi, emisi karbon diperkirakan meningkat kembali menjadi sekitar 25,8 persen pada 2022. Pemerintah menargetkan penurunan emisi karbon pada 2024 sebesar 27,3 persen*.)

Kebutuhan pendanaan untuk target Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 Indonesia diperkirakan mencapai Rp 3.461 triliun, atau rata-rata Rp 266,2 triliun per tahun. Sementara itu, dana pemerintah untuk kegiatan mitigasi perubahan iklim hanya 89,6 triliun per tahun sepanjang 2016-2020. Bagaimana gambaran kebijakan pemerintah soal pendanaan ini dalam satu dasawarsa mendatang?

Saya bilang, saya akan turun di 2022 itu. Saya juga ingin menyampaikan kepada Presiden bahwa Pembayaran Ketersediaan Layanan (AP) harus digabungkan dengan Dana Dukungan Tunai (VGF) dan *government share*. Itu untuk mendapatkan harga keterjangkauan untuk energi. Contoh, transmisi listrik dibangun pemerintah, tapi investasi yang paling penting, yaitu *smart grid*, listriknya bisa dibeli dengan harga, misalnya, 12 sen tapi dihargai 8 sen. Jadi 4 sennya dari Dana Dukungan Tunai, Pembayaran Ketersediaan Layanan, segala macam instrumen keuangan kita mainkan. Ini memerlukan alokasi anggaran dan sedang kami coba.

Kalau pendanaan negara kurang, apakah pemerintah berencana melibatkan swasta?

Banyak yang dilakukan swasta. Ada satu perusahaan besar yang merehabilitasi kawasan *mangrove* di Bali. Ada yang mengembangkan, misalnya, kerajinan kulit jagung. Ada yang mengajarkan kepada masyarakat di Klungkung tentang daur ulang sampah. Mereka adalah perusahaan-perusahaan swasta nasional yang bekerja sama dengan asing. Hal-hal seperti ini banyak dilakukan pihak swasta dalam rangka SDGs. Jadi partisipasi masyarakat pengusaha tinggi sekali. Kami juga banyak bekerja sama dalam bentuk pemberian hibah dari lembaga-lembaga internasional.

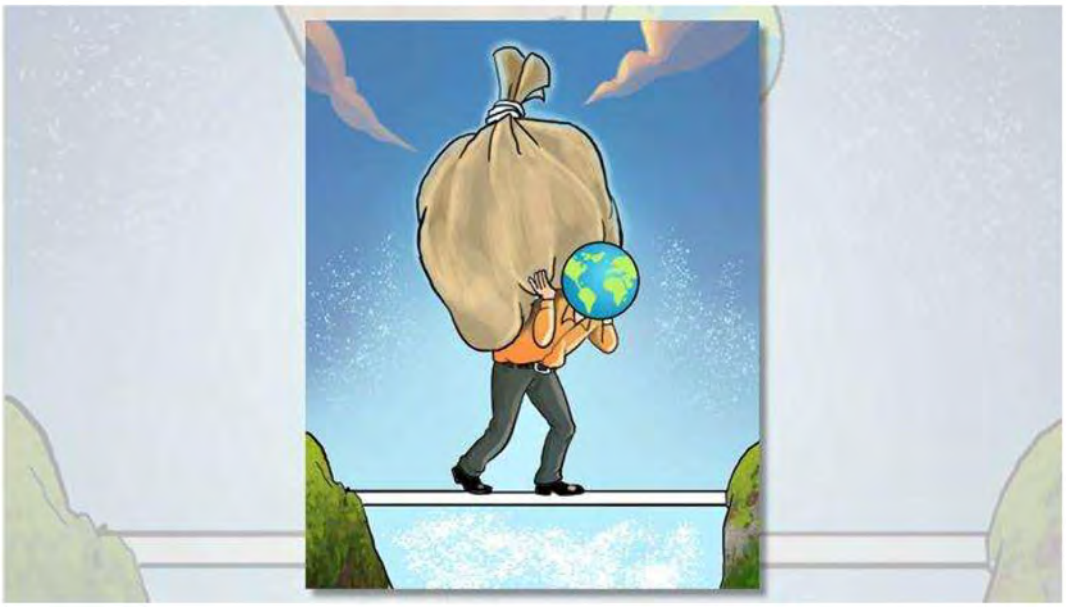
Seperti apa skema stimulus untuk swasta yang terlibat dalam proyek-proyek ramah lingkungan?

Biasanya dalam bentuk pajak. Banyak swasta mendapatkan insentif pajak.

SUHARSO MONOARFA | Tempat dan tanggal lahir: Mataram, Nusa Tenggara Barat, 31 Oktober 1954 | **Pendidikan**: Fakultas Planologi Institut Teknologi Bandung (1974-1978); Executive Development Program di University of Michigan, Amerika Serikat (1994); Executive Program di Stanford University, Amerika Serikat (1995); Visiting Professor di Guangdong University of Finance, Cina, dan Business School University of Nottingham, Inggris (2016-2018) | **Karier**: eksekutif di beberapa perusahaan (1984-2002), antara lain PT Bukaka Sembawang Engineering; anggota staf khusus Wakil Presiden Hamzah Haz (2002-2004); anggota Dewan Perwakilan Rakyat (2004-2009); Menteri Perumahan Rakyat (2009-2012); anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2015-2019); pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (sejak 2019); Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (sejak 2019) | **Penghargaan**: *Doctor honoris causa* bidang bisnis dari Central Queensland University, Australia (2019)

Bantuan Sosial Covid 19 Penurunan Emisi Outlook Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Lingkungan Hidup Pariwisata Jokowi Penghijauan Suharso Monoarfa

Mengapa Utang Penanganan Dampak Covid-19 Berisiko di Masa Depan?



Sinyal Pasar

UMAT manusia sedunia harus bersiap menerima warisan dari pandemi yang kini tengah mengamuk. Warisan itu adalah utang yang jumlahnya sungguh luar biasa. Inilah buah kebijakan semua negara di dunia untuk mencegah keruntuhan ekonomi masing-masing.

Institute of International Finance, asosiasi global yang menghimpun lebih dari 450 lembaga keuangan utama, menghitung rasio total utang sedunia terhadap produk domestik bruto tahun ini akan mencapai 365 persen, naik dari 320 persen pada 2019. Ini tak terelakkan karena utang adalah satu-satunya obat keras yang mampu menyelamatkan ekonomi.

Karena suntikan itu, ekonomi global, setidaknya untuk sementara ini, relatif selamat. Memang ada resesi, tapi ekonomi jelas tidak runtuh. Suntikan utang itu juga membuat pasar finansial lebih bergairah ketimbang di masa sebelum pandemi. Kabar bahwa vaksinasi akan segera dimulai dan karena itu pandemi dapat teratasi kian menghanyutkan pasar dalam optimisme.

Harga saham pun melonjak di mana-mana. Indeks S&P 500 di bursa New York terus menanjak menyentuh titik tertinggi sepanjang masa. Sebelum pandemi, sejak memakai 500 saham sebagai dasar perhitungan pada 1957, indeks ini rata-rata naik cuma sekitar 8 persen per tahun. Justru di tengah wabah pertumbuhannya mencelat luar biasa. Jika dihitung sejak awal tahun hingga akhir pekan 4 Desember lalu, S&P 500 sudah tumbuh 14,3 persen, nyaris dua kali lipat pertumbuhan di masa normal.

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjU2OjU4Il0
Sebagaimana halnya obat keras, utang pasti punya efek samping. Ada risiko besar yang mengancam di masa depan. Namun saat ini pasar seolah-olah mengabaikannya. Di Amerika Serikat, misalnya, total utang semua korporasi, termasuk bisnis kecil-menengah, per Juli 2020 sudah mencapai US$ 17 triliun. Tak ada yang bisa memastikan apakah ekonomi Amerika kelak tetap bisa menggelinding dengan beban utang sebesar itu.

Bunga yang sangat rendah di negara-negara maju, untuk sementara ini, memang membuat beban utang itu terasa ringan. Ongkos berutang masih murah. Tapi, ironisnya, begitu ekonomi mulai membaik dan bunga juga naik di masa depan, ongkos utang itu otomatis berkali lipat bertambah berat.

Utang besar yang membebani korporasi juga berisiko memicu resesi. Perusahaan yang terlampau berat terbebani utang tak akan mampu berekspansi, menambah jumlah pekerja, apalagi berinvestasi. Jika korporasi tak mampu menumbuhkan diri, pada gilirannya pertumbuhan ekonomi juga akan ikut melambat. Tenaga kerja tak terserap. Angka pengangguran bertambah.

Masalah lebih berat muncul di negara berkembang seperti Indonesia. Sebab, di sini bunga utang tak semurah bunga di negara maju. Utang pemerintah juga menjadi persoalan serius, bukan hanya utang korporasi. Jika pemerintah negara maju dapat berutang dengan ongkos yang sangat rendah, bahkan nyaris nol persen alias gratis, pemerintah Indonesia harus membayar ongkos amat besar jika hendak berutang.

Sebagai gambaran, imbal hasil atau *yield* obligasi pemerintah RI yang berjangka 10 tahun saat ini 6,2 persen. Jangankan dibandingkan dengan negara maju, di antara sesama negara ASEAN pun pemerintah RI harus membayar bunga jauh lebih tinggi. Imbal hasil obligasi pemerintah Thailand dengan tenor yang sama, misalnya, hanya 1,3 persen.

Beban utang pemerintah Indonesia yang melonjak begitu besar karena Covid-19 dapat menjadi persoalan serius di tahun-tahun mendatang. Sebagian besar pendapatan pemerintah akan tersedot untuk membayar cicilan utang ataupun

bunganya. Makin sempit pula ruang bagi pemerintah untuk berinvestasi atau membiayai pengembangan infrastruktur.

Keuangan pemerintah memang tertekan hebat karena wabah. Penerimaan merosot sangat tajam, sementara pengeluaran justru bertambah. Sejak awal tahun hingga Oktober, rasio defisit anggaran pemerintah pusat terhadap produk domestik bruto sudah mencapai 4,7 persen atau senilai Rp 764,9 triliun. Estimasinya, sepanjang 2020, rasio defisit ini akan menjadi sekitar 6,3 persen.

Kedatangan vaksin memang melegakan. Orang boleh berharap wabah bakal teratasi. Tapi belum ada jalan yang terang bagaimana Indonesia akan mengatasi beban warisan utang.

Covid-19 Utang Swasta Utang Pemerintah

Dugaan Keterlibatan Aparat Keamanan dan Birokrat Memenangkan Kerabat Presiden



Pekerja melipat surat suara Pilkada Medan di Gudang Logistik KPU Medan, Sumatera Utara, 17 November 2020. ANTARA/Irsan Mulyadi

- **Camat dan lurah di Kota Medan disebut menggalang dukungan untuk memenangkan Bobby Nasution. .**
- **Berbeda dengan Bobby yang dianggap belum aman, elektabilitas Gibran Rakabuming Raka sudah lebih dari 82 persen. 21657**
- **Para petinggi partai politik datang ke Medan untuk membantu memenangkan Bobby Nasution. .**

INSTRUKSI berkumpul di satu kantor kelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, masuk di grup WhatsApp kepala lingkungan pada Jumat, 16 Oktober lalu. Menunjukkan pesan tersebut kepada *Tempo* pada Rabu, 2 Desember lalu, Mahfud—bukan nama sebenarnya—bercerita bahwa dia langsung berangkat ke kantor lurah. Ia menjadi satu dari dua puluhan kepala lingkungan—setingkat rukun warga—yang berada di grup tersebut.

Menurut Mahfud, dalam rapat itu lurah meminta setiap kepala lingkungan membantu memenangkan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution-Aulia Rachman. Sang lurah menugasi tetamunya mengumpulkan data 55 pemilih yang bisa mendukung pasangan nomor urut dua itu, lengkap dengan alamat, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan. “Lurah juga meminta suara Bobby bisa 60 persen di setiap tempat pemungutan suara,” tutur Mahfud.

Dia mengaku menanyakan asal-muasal perintah tersebut. Lurah itu, kata Mahfud, menjawab bahwa instruksi tersebut datang dari atasannya, Camat Medan Perjuangan Afrizal, dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. “Tidak mungkin polisi turun tangan langsung,” ujar Mahfud menirukan ucapan lurah itu. Iming-iming hadiah disampaikan juga oleh lurah itu seandainya Bobby, menantu Presiden Joko Widodo, menang. Pun disiapkan Rp 50 ribu bagi setiap pemilih pasangan itu.



Calon walikota Solo Gibran dan wakilnya Teguh mengunjungi kampung Citropuran, Tipes, Surakarta, Jawa Tengah, 18 Agustus 2020. TEMPO/Bram Selo Agung Mardika

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjQ5OjMwIl0

Ditemui terpisah, seorang kepala lingkungan di daerah yang sama memberikan cerita serupa. Bukan hanya hadiah, kata dia, peserta rapat diancam akan dicopot dari jabatannya jika tak melaksanakan perintah lurah. Kesal terhadap ancaman itu, kepala lingkungan ini mengaku menyerahkan data sekadarnya sekitar sebulan seusai pertemuan. Pada Rabu, 2 Desember lalu, lurah itu kembali mengumpulkan kepala lingkungan. Kembali dia meminta para kepala lingkungan membantu pemenangan Bobby karena elektabilitasnya di Medan Perjuangan masih belum aman.

Hasil sigi internal tim pemenangan Bobby-Aulia yang diperoleh *Tempo* menunjukkan pasangan itu masih unggul dibanding rivalnya, Akhyar Nasution-Salman Alfarisi, di Kecamatan Medan Perjuangan. Dalam dokumen setebal 68 halaman itu, tingkat elektabilitas Bobby-Aulia berada di angka 40 persen, sedangkan Akhyar-Salman 17,5 persen. Namun masih ada 42,5 persen responden yang merahasiakan pilihannya. Jumlah pemilih di Medan Perjuangan sekitar 73 ribu orang.

Survei yang sama menyebutkan elektabilitas Bobby-Aulia di Medan mencapai 36,3 persen dan Akhyar-Salman 27,8 persen. Namun ada 19 persen pemilih yang merahasiakan pilihan dan 17 persen belum menentukan pilihan.

Camat Medan Perjuangan Afrizal mengaku pernah mengumpulkan lurah di wilayahnya tak lama setelah Komisi Pemilihan Umum Kota Medan menetapkan calon kepala daerah. Namun dia menyangkal jika pertemuan itu disebut beragenda memenangkan calon tertentu. “Tidak ada penggalangan,” katanya pada Sabtu, 5 Desember lalu. Afrizal menyatakan pertemuan itu membahas soal daftar pemilih tetap serta rencana tes usap untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara.

Bobby-Aulia didukung oleh delapan partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai NasDem, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Hanura. Adapun lawannya, Akhyar-Salman, diusung dua partai, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

TEMPO.CO

PESTA UNTUK KERABAT

NASKAH: PRAMONO
SUMBER: ARSIP MAJALAH TEMPO, KOMISI PEMILIHAN UMUM, NAGARA INSTITUTE, TEMPO.CO, BERBAGAI SUMBER



SEBANYAK 270 daerah menggelar pemilihan kepala daerah pada Rabu, 9 Desember 2020. Sebagian di antara para calon berkerabat dengan para pejabat di tingkat pusat ataupun daerah. Di sejumlah wilayah, politik kekerabatan terbukti lebih banyak mudarat dan tak membawa manfaat.



Gibran Rakabuming Raka
(anak)
Calon Wali Kota Solo
Pengusung:
PDIP, Golkar, PAN, Gerindra, PPP, PKB, NasDem, dan PSI



Muhammad Bobby Afif Nasution
(menantu)
Calon Wali Kota Medan
Pengusung:
PDIP, Gerindra, PAN, Golkar, PPP, NasDem, PSI, Hanura



Siti Nur Azizah
(anak)
Calon Wali Kota Tangerang Selatan
Pengusung:
Demokrat, PKS, dan PKB





Sekretaris Kabinet **Pramono Anung**

Menteri Pertahanan **Prabowo Subianto**

Menteri Pertanian **Syahrul Yasin Limpo**

Menteri Ketenaga-kerjaan **Ida Fauziyah**



Hanindhito Himawan Pramono
(anak)
Calon Bupati Kediri
Pengusung:
PDIP, PKB, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PKS, Gerindra, dan PPP



Rahayu Saraswati
(keponakan)
Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan
Pengusung:
PDIP, Gerindra, PSI, PAN, Hanura, NasDem, Perindo, Garuda, Berkarya



Irman Yasin Limpo
(adik)
Calon Wali Kota Makassar
Pengusung:
Golkar, PAN, PKS



Titik Masudah
(adik)
Calon Wakil Bupati Mojokerto
Pengusung:
PKB, PDIP, PBB



Mantan Gubernur Jambi **Zumi Zola**



Wali Kota Batam **Muhammad Rudi**



Ratu Munawaroh
(ibu)
Calon Wakil Gubernur Jambi
Pengusung:
PDIP, Golkar



Marlin Agustina
(istri)
Calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau
Pengusung:
Golkar, NasDem

Bupati Pelalawan **H M. Harris**
- **Adi Sukemi** (anak)

Bupati Sleman **Sri Purnomo**
- **Kustini** (istri)

Calon Bupati Pelalawan, menjabat Ketua DPRD Pelalawan
Pengusung:
Golkar, NasDem

Bupati Indragiri Hulu **Yopi Arianto**
● **Rezita Meylani** (istri)
Calon Bupati Indragiri Hulu
Pengusung:
Golkar, NasDem

Keluarga Chasan Sochib
● **Tatu Chasanah**
(anak, ipar Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany)
Calon Bupati Serang
Pengusung:
PDIP, PKS, PAN, PKB, Berkarya, NasDem, Hanura, PBB, PPP
● **Pilar Saga Ichsan**
(cucu, anak Tatu Chasanah)
Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan
Pengusung:
Golkar, PPP

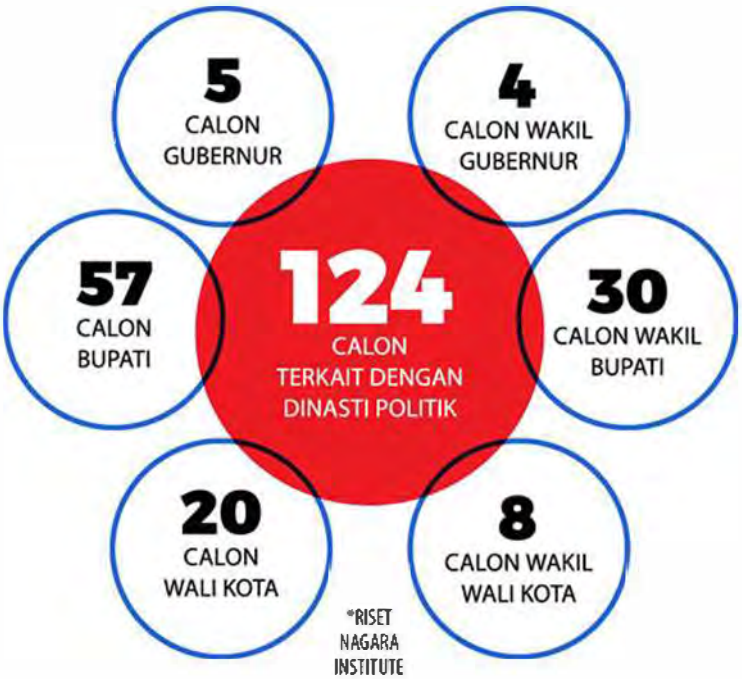
Bupati Bandung Dadang **M. Nasser**
● **Kurnia Agustina** (istri)
Calon Bupati Bandung
Pengusung:
Golkar, Gerindra

Calon Bupati Sleman
Pengusung:
PDIP, PAN, Demokrat

Bupati Banyuwangi **Azwar Anas**
● **Ipuk Fiestiandani** (istri)
Calon Bupati Banyuwangi
Pengusung:
NasDem, PDIP, Gerindra, Hanura, PPP

Bupati Pangkajene dan Kepulauan **Syamsudin A. Hamid**
● **Andi Ilham Zainuddin-Rismayani**
(ipar dan istri)
Calon Bupati-Wakil Bupati Pangkep
Pengusung:
PAN, Golkar, Berkarya
● **Muhammad Yusran Lalogau**
(keponakan)
Calon Bupati Pangkep
Pengusung:
NasDem

Wali Kota Manado **Vicky Lumentut**
● **Julyeta Paulina Amelia Runtuwene** (istri)
Calon Wali Kota Manado
Pengusung:
NasDem, Perindo, PSI



DAMPAK BURUK POLITIK DINASTI

- Pembajakan demokrasi, kader unggulan sulit mendapat kesempatan.
- Pejabat ikut memuluskan kerabatnya mendapatkan dukungan partai.
- Politisasi birokrasi, pejabat mengerahkan birokrat untuk memenangkan kerabatnya.
- Calon yang diusung tak kompeten dan tak memiliki pengalaman.
- Tata kelola pemerintahan cenderung buruk.
- Meningkatkan potensi korupsi.

FAMILI, LALU KORUPSI

● Bupati Kutai Timur Ismunandar
Ismunandar dan istrinya yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur, Encek Unguria, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima suap proyek infrastruktur.

● Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra
Adriatma dan ayahnya yang juga pendahulunya, Asrun, divonis 5 tahun 6 bulan penjara dalam kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kendari.

● Bupati Cimahi Atty Suharti
Atty dan suaminya, Itoc Tochija, yang juga mantan Bupati Cimahi, masing-masing divonis 4 dan 7 tahun karena menerima suap pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi.

● Bupati Banyuasin Yan Anton
Putra bupati sebelumnya, Amiruddin Inoed, ini divonis 6 tahun penjara karena menerima suap ijon proyek di dinas pendidikan.

● Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari
Rita divonis 10 tahun karena menerima suap dan gratifikasi. Sebelumnya, ayahnya, Syaukani Hasan Rais, yang juga mantan bupati, divonis 2 tahun 6 bulan dalam kasus penyelewengan dana kesejahteraan rakyat.

● Gubernur Jambi Zumi Zola
Anak mantan Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin, ini divonis 6 tahun karena menerima gratifikasi lebih dari Rp 40 miliar dan US$ 177 ribu dan Sin$ 100 ribu.

Lima pengurus partai pendukung pemerintah dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PAN, dan PPP membenarkan kabar pengerahan aparat pemerintah untuk membantu memenangkan Bobby. Salah satunya dengan menerjunkan polisi hingga ke tingkat rukun warga. Seorang kepala lingkungan di Kecamatan Medan Johor, Wahidin Surya, mengaku pernah didekati seorang laki-laki yang mengaku sebagai polisi. Laki-laki ini menjanjikan program Bobby-Aulia akan sampai di lingkungan itu jika pasangan tersebut menang. Wahidin hanya mendengarkan permintaan tersebut.

Juru bicara tim kampanye Bobby-Aulia, Ikrimah Hamidi, membantah jika jagoannya disebut menggerakkan birokrat dan aparat keamanan. Apalagi lawan yang dihadapi adalah Akhyar, yang menjadi pelaksana tugas Wali Kota Medan. Hamidi meminta masyarakat membuka identitas polisi yang ikut memenangkan Bobby. “Biar ada tindakan tegas,” ucapnya. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Utara Komisaris Besar Tatan Dirsan Atmaja menampik ada polisi yang tak netral. “Silakan laporkan ke kami nama dan pangkat polisi tersebut,” ujarnya.

Masalah ketidaknetralan aparatur negara kerap dibahas oleh tim pemenangan Akhyar-Salman. Sekretaris tim pemenangan Akhyar-Salman, Wasis Waseso Pamungkas, mengatakan Akhyar pernah mengeluhkan pengawalan polisi dan birokrat yang kian masif untuk memenangkan lawannya. “Kami berharap mereka bisa lebih profesional dan tidak ikut bermain,” kata Wasis.

Tiga petinggi partai politik yang ikut membantu pemenangan Bobby mengatakan Istana juga mengawal pilkada Medan. Salah satunya dengan menugasi Devid Agus Yunanto terjun ke wilayah itu. Devid dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo sejak menjabat Wali Kota Solo. Ia pun ikut diboyong ke Balai Kota dan

Istana setelah Jokowi memenangi pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan pemilihan umum presiden.

Wasis Waseso Pamungkas, yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera, mengaku pernah berjumpa dengan Devid sebelum pendaftaran calon ke Komisi Pemilihan Umum. Menurut Wasis, dalam pertemuan itu Devid mengajak partainya ikut mendukung Bobby. "Tapi kami tolak," ucapnya. Devid menampik ditugasi oleh Presiden Jokowi untuk mengawal pilkada Medan. "Enggak betul itu," katanya. Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, tak membalas pertanyaan yang diajukan *Tempo* soal keterlibatan Istana.

•••

BUKAN hanya menantu, putra sulung Presiden Joko Widodo juga ikut meramaikan kontestasi pemilihan kepala daerah yang digelar Rabu, 9 Desember 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran Rakabuming Raka berlaga melawan calon independen Bagyo Wahono dan F.X. Supardjo. Ketua Badan Pemilihan Umum PDI Perjuangan Bambang Wuryanto optimistis Gibran bakal menang telak di Solo. "Hasil survei per 28 November, elektabilitas Gibran sudah 82 persen," kata Bambang pada Rabu, 2 Desember lalu.

Ketua PDIP Jawa Tengah itu mengatakan potensi suara Gibran bisa menembus lebih dari 90 persen. Alasannya, Jokowi pernah mendulang suara sebanyak itu saat kembali memenangi pilkada Solo pada 2010. Namun Bambang menilai kemenangan Jokowi saat itu lantaran kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya, terutama di bidang ekonomi, sangat tinggi.

Tiga petinggi partai yang membantu pemenangan di Solo mengatakan kemenangan Gibran tinggal menunggu waktu. Apalagi lawannya pun "tiba-tiba muncul" dan bisa menyetorkan 38.831 kartu tanda penduduk saat mendaftar sebagai calon independen. Pada September lalu, Bagyo Wahono menampik jika disebut sebagai calon "boneka". Dia mengklaim sudah bersiap maju jauh sebelum nama Gibran muncul dalam survei Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi pada Juli 2019. "Saya sudah mempersiapkan diri dua tahun sebelumnya," tutur Bagyo.

Meski Gibran dipastikan menang, partai-partai pendukungnya pun bergerak menggalang dukungan. Semua petinggi partai politik yang ditemui *Tempo* mengatakan Presiden Jokowi tak pernah meminta secara langsung pemenangan putranya di Solo. Namun tanpa diminta pun, kata mereka, partai sudah pasti membantu memenangkan Gibran. Hal yang sama berlaku di Medan untuk memenangkan menantu Jokowi, Bobby Nasution.

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia, misalnya, mengaku empat kali bertandang ke Medan dan menggalang dukungan untuk Bobby. Terakhir, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar itu datang bersama tokoh senior partai beringin, Akbar Tandjung, pada Selasa, 1 Desember lalu. Akbar adalah Ketua Dewan Pembina Golkar sekaligus mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Menurut Doli, mereka menemui sejumlah tokoh Islam di Medan, juga korps alumnus HMI. "Partai Golkar menginstruksikan agar semua kadernya mendukung calon yang diusung, termasuk Bobby-Aulia," ucap Doli.

Penggalangan kepada kelompok Islam dilakukan karena rival Bobby-Aulia, yakni Akhyar Nasution-Salman Alfarisi, mendapat dukungan dari Ustad Abdul Somad Batubara pada Senin, 30 November lalu. Ketika itu, Somad berpesan kepada Akhyar-Salman agar amanah jika menang dalam pilkada nanti. "Dukungan Ustad Somad bisa menambah pemilih kami," ujar sekretaris tim pemenangan Akhyar-Salman, Wasis Waseso Pamungkas.

Partai Amanat Nasional juga menerjunkan elite partainya ke Medan dan bertemu dengan Bobby pada Selasa, 24 November lalu. Dalam pertemuan itu, menurut Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Bobby menyampaikan mesin PAN masih belum bekerja maksimal. Penyebabnya, hasil survei lingkup internal Bobby menunjukkan hanya 43 persen pemilih PAN yang mendukung dia.

Eddy pun meminta semua kader partainya habis-habisan memenangkan Bobby-Aulia. Bahkan dia mengancam akan mencopot kader yang menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Medan dan DPRD Sumatera Utara jika Bobby kalah di lima tempat pemungutan suara dekat mereka tinggal. "Sisa waktu hingga pemilihan kita kerja untuk memenangkan Bobby-Aulia," katanya. PDI Perjuangan juga menerjunkan banyak kader dari Sumatera Utara ataupun tingkat nasional untuk mengkampanyekan Bobby-Aulia.



Calon Wali Kota Medan Bobby Nasution (kedua kanan) didampingi politikus PDI Perjuangan Ganjar Pranowo (ketiga kanan) saat mengunjungi kawasan kota tua Kesawan, di Medan, Sumatera Utara, 15 november 2020. ANTARA/Irsan Mulyadi

Tak hanya mendekati kelompok Islam, Bobby juga menyasar kalangan minoritas. Seorang sumber yang mengetahui strategi itu mengatakan ada orang-orang yang khusus bertugas mendekati pemuka agama lain. Awal Januari lalu, misalnya, Bobby bertemu dengan Uskup Agung Medan Monsinyur Cornelius Sipayung. Selain itu, menurut sumber yang sama, Bobby memiliki tim yang mendekati kalangan minoritas, seperti keturunan Cina.

Turun gunungnya para elite Jakarta dan Sumatera Utara memenangkan Bobby lantaran kemenangan Bobby masih belum aman. Hasil survei Citi Research Center menyebutkan elektabilitas Akhyar-Salman 35 persen dan Bobby-Aulia 29,25 persen. Sedangkan Lembaga Survei dan Sosialisasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menyebutkan tingkat keterpilihan Bobby-Aulia sebesar 31,3 persen dan lawannya 20,8 persen. Kesamaan dari dua survei itu, juga survei internal, jumlah massa mengambang masih cukup tinggi dan bisa mempengaruhi hasil pemilihan.

Mantan Deputi IV Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo, yang ikut membantu pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden 2014, mengatakan Jokowi dan keluarga tak pernah berpesan secara langsung agar para tokoh yang diterjunkan ke Medan dan Solo membantu memenangkan Bobby dan Gibran. “Tapi keluarga pasti merestui Bobby dan Gibran,” ujarnya.

HUSSEIN ABRI DONGORAN, PRAMONO, ADINDA ZAHRA NOVIYANTI (MEDAN), MEI (MEDAN), AHMAD RAFIQ (SOLO)

Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution Bobby Nasution Gibran Rakabuming Raka Pilkada 2020

Surat dari Mama agar Anaknya Menang Pilkada - -



Debat publik Pilkada Tangerang Selatan di Jakarta, 22 November 2020. ANTARA /Muhammad Iqbal

- **Putri Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, menyematkan nama ayahnya di poster dan spanduk kampanye. .**
- **Pertarungan di pilkada Tangerang Selatan melibatkan keluarga pejabat pusat dan daerah. 21657**
- **Di Makassar, Jusuf Kalla dan keluarganya ikut membantu memenangkan Munafri Arifuddin. .**

NAMA Ma'ruf Amin tak bisa lepas dari calon Wali Kota Tangerang Selatan, Siti Nur Azizah. Di sejumlah tiang listrik di sepanjang Jalan Siliwangi, Pamulang, misalnya, terpacak spanduk bertulisan Siti Nur Azizah Ma'ruf. Begitu pula akun Instagram Azizah ditambahkan nama Ma'ruf. Di situs resmi milik Azizah, dia juga menyertakan nama Ma'ruf dalam profilnya.

Sebetulnya tak ada nama Ma'ruf di asma lengkap Azizah. Situs Komisi Pemilihan Umum Tangerang Selatan pun menyebutkan demikian. "Mau *diapain aja*, ya

melekat di saya, dan saya juga enggak bisa pilih jadi anak siapa. Tentu harus pandai-pandai menempatkan," ujar Azizah pada Jumat, 4 Desember lalu.

Maju bersama politikus Partai Keadilan Sejahtera, Ruhamaben, anak keempat Ma'ruf Amin itu awalnya memiliki elektabilitas rendah. Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting pada Agustus lalu merilis elektabilitas Azizah-Ruhamaben di posisi buncit dengan 10,5 persen. Di atasnya adalah pasangan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan dengan elektabilitas sebesar 39,3 persen, diikuti Muhamad-Rahayu Saraswati (20,8 persen). Pada November lalu, sigi Indikator Politik Indonesia mencatat elektabilitas Azizah-Ruhamaben 16,4 persen.

Azizah tak menampik jika nama ayahnya dinilai ikut mengerek elektabilitasnya. Menurut dia, faktor pengungkit elektabilitasnya juga berkat kerja tim dan relawan. "Masyarakat menerima visi-misi kami," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu. Juru bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengatakan Ma'ruf hanya memberikan doa dan saran agar Azizah berusaha keras memenangi pemilihan kepala daerah. Masduki menyatakan Ma'ruf tak terlibat langsung dalam kampanye putrinya. "Kiai Ma'ruf berprinsip pejabat negara harus netral."

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjQ5OjQwIl0



Kampanye Situ Nur Azizah di Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan, September 2020.
Dokumentasi Situ Nur Azizah Official Instagram

Lawan Azizah juga merupakan kerabat politikus di tingkat pusat dan daerah. Calon wakil wali kota Pilar Saga Ichsan adalah anak Bupati Serang Tatu Chasanah, yang kembali berlaga dalam pemilihan bupati. Tatu, putri jawara Banten (almarhum) Chasan Sochib, adalah adik bekas Gubernur Banten, Atut

Chosiyah, dan kakak ipar Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diany. Pasangan Pilar, Benyamin Davnie, selama dua periode mendampingi Airin.

Saat pendaftaran, Airin—yang juga Ketua Partai Golkar Tangerang Selatan—ikut mengantarkan kemenakannya ke Komisi Pemilihan Umum. Akhir November lalu, Airin juga berkonsolidasi dengan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) di Hotel Marilyn, Serpong, untuk pemenangan Benyamin-Pilar. Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta berharap pasangan itu bisa melanjutkan kepemimpinan Airin.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan Tangerang Selatan menjadi arena pertarungan yang ketat. Hal itu, kata Doli, terjadi karena masuknya Azizah dan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. “Semula kami anggap Tangsel ini tidak berat karena puluhan tahun kami menang. Tapi, begitu keduanya masuk, ini jadi medan yang ketat,” tuturnya.

Untuk mendongkrak perolehan suara jagoannya, Golkar menugasi semua kader bekerja. Golkar Tangerang menggelar konsolidasi pada akhir November lalu. Paman Pilar yang juga Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, mengatakan partainya menargetkan kemenangan di seluruh wilayah Banten. “Target DPP Golkar, di Banten100 persen. Maka wajib semua kader bantu,” kata Andika.

Mama Pilar yang juga Ketua Golkar Banten pun turun tangan. Tertulis di situs Golkar, Tatu menerbitkan surat tugas kepada kader dan pengurus Golkar se-Tangerang Raya untuk memenangkan anaknya. “Insya Allah meski Golkar sendiri di pilkada Tangsel, dengan turun tangannya Golkar Banten se-Tangerang Raya, kemenangan optimistis diraih,” ujarnya.

Dalam pemilihan Wali Kota Makassar, pasangan Munafri Arifuddin-Rahman Bando juga didukung oleh keluarga mantan wakil presiden Jusuf Kalla. Munafri adalah menantu pendiri Bosowa Group, Aksa Mahmud, yang juga adik ipar Kalla. Munafri, yang akrab dipanggil Appi, kembali maju meski, dalam pilkada 2018, dia kalah melawan “kotak kosong”.

Tak mau kekalahan terulang, keluarga Kalla menyokong penuh Munafri melawan tiga pasang calon lain, yakni Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi; Syamsu Rizal-Fadli Ananda; dan Irman Yasin Limpo, adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yang berpasangan dengan Andi Muhammad Zunnun Armin. Bos Kalla Group, Solihin Kalla, memberikan dukungan dengan membentuk jaringan Relawan Kalla. Ketua Relawan Kalla, Taqiuddin Jabar, mengatakan 6.000 karyawan Kalla Group di Makassar diberdayakan mendukung

Munafri-Rahman. Karyawan Kalla juga diminta mengajak keluarga dan kerabat mendukung Appi-Rahman.

Jusuf Kalla pun memberikan dukungannya. Melalui akun YouTube Appi-Rahman, Kalla mengatakan Appi adalah sosok pemimpin Makassar yang memiliki kemampuan di berbagai bidang. Bahkan Kalla mengaku bahwa Appi adalah sosok penerusnya. Musababnya, Kalla juga pernah mengurusi klub sepak bola PSM Makassar. "Appi itu penerus saya ini," ucap Kalla.

Di Kediri, Jawa Timur, putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanandhito Himawan Pramono, bakal bertarung melawan kotak kosong karena menjadi calon tunggal. Pramono, yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menurut sejumlah petinggi partai politik yang ditemui *Tempo*, ikut melobi agar anaknya bisa mendapat dukungan penuh. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tak menampik lobi tersebut. "Diskusi dengan PDI Perjuangan, ya pastilah," katanya. Dimintai tanggapan, Pramono tak merespons pertanyaan yang diajukan *Tempo*.



Kegiatan kampanye Munafri Arifuddin di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Makassar, 21 November 2020. Youtube APPI-RAHMAN

Sedangkan di Jambi, keluarga mantan Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin, kembali memeriahkan pilkada. Ratu Munawaroh, istri Zulkifli sekaligus ibu tiri mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola, maju menjadi calon Wakil Gubernur Jambi mendampingi Cek Endra, Bupati Sarolangun. Mereka diusung PDI Perjuangan dan Golkar serta mendapat dukungan penuh dari keluarga mendiang Zulkifli Nurdin. Sum Indera, keponakan Ratu yang kini duduk di Senayan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jambi, ikut turun mengkampanyekan Ratu.

Ratu akan melawan gubernur petahana Fachrori Umar, yang berpasangan dengan Syafril Nursal. Kekuatan politik Fachrori Umar terbilang besar. Istrinya, Rahimah Ibrahim, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. Putrinya, Ria Mayang Sari, juga melenggang ke Senayan sebagai anggota DPD pada Pemilihan Umum 2019.

Kesuksesan Fachrori di jagat politik Jambi tak lepas dari peran keluarga besar Ibrahim, ayah mertuanya. Putra Ibrahim, Syamsudin Ibrahim, yang merupakan pengusaha, disebut membantu pemenangan Fachrori. Sedangkan adik Syamsudin, Muhammad Syafi'i, adalah Kepala Detasemen Khusus 88 di era Kepala Kepolisian RI Tito Karnavian.

DEVY ERNIS, HUSSEIN ABRI, RAYMUNDUS RIKANG, MUHAMMAD KURNIANTO (TANGERANG SELATAN), DIDIT HARIYADI (MAKASSAR), MUAWWIN (JAMBI)

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo Dinasti politik Pilkada 2020 Airin Rachmi Diany Ratu Atut Chosiyah

Panasnya Pilkada Surabaya, Polisi Dituding Ikut Mengintimidasi Pelapor Risma



Eri Cahyadi dan Armuji didampingi Tri Rismaharini (kanan) sdi kantor DPC PDIP Surabaya, di Surbaya, September 2020. Dokumentasi PDIP

- **Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menebar surat kepada warga, mengajak mereka memilih Eri Cahyadi-Armudji. .**
- **Sejumlah pihak melaporkan tindakan Wali Kota Risma itu ke Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri. 21657**
- **Di Sumatera Barat, pilkada diwarnai penetapan tersangka para calon yang berlaga. Kompetisi memanas sepekan menjelang hari pencoblosan. .**

TERDIRI atas tujuh alinea, surat yang ditandatangani Tri Rismaharini itu mengajak warga Surabaya memilih calon wali kota dan wakil wali kota Eri Cahyadi-Armudji. Tak menyebutkan jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya, Risma menyatakan pasangan nomor urut satu itu akan membangun Ibu Kota Jawa Timur, membuka kesempatan kerja, dan menyejahterakan rakyat. “Ayo datang ke TPS-TPS, pilih Eri-Armudji. Jangan golput!” demikian penutup nawala tersebut.

Surat tertanggal 20 November 2020 itu menjadi viral setelah dikirimkan ke berbagai penjuru Kota Pahlawan, kurang dari sebulan menjelang hari pencoblosan. Selain surat Risma, amplop cokelat yang dikirimkan kepada warga berisi buklet visi-misi Eri, mantan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya, dan Armudji, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota itu. Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai politik tempat Risma menjadi ketua bidang kebudayaan.

Beredarnya surat itu membuat kubu pasangan nomor urut dua, Machfud Arifin-Mudjiaman, meradang. Ketua tim advokasi Machfud Arifin-Mudjiaman, Sahid, menuding Risma tak netral sebagai kepala daerah dan ikut memenangkan Eri-Armudji. Sahid pun melapor ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Surabaya dengan membawa delapan surat. “Bukti sudah cukup, surat itu tersebar ke banyak kecamatan,” ujar Sahid. Juru bicara tim pemenangan Eri-Armudji, Achmad Hidayat, mengatakan surat itu dikirim Risma dalam kapasitasnya sebagai Ketua PDI Perjuangan.

Tudingan soal ketidaknetralan Risma juga disampaikan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Surabaya. Awal Oktober lalu, KIPP melaporkan Risma ke Badan Pengawas Pemilu Surabaya karena dianggap memfasilitasi penggunaan Taman Harmoni saat penyerahan rekomendasi PDIP kepada Eri-Armudji. KIPP juga mempersoalkan gambar Risma dalam sosialisasi calon wali kota. Pertengahan November lalu, KIPP Jawa Timur melaporkan Risma ke Kementerian Dalam Negeri karena dianggap tak netral. Ketua PDIP Surabaya Adi Sutarwijono membantah tudingan itu. “Kampanye Bu Risma sudah sesuai dengan rambu yang diatur dalam undang-undang,” katanya.

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjQ5OjQ2Il0
Kepada *Tempo* pada Kamis, 3 Desember lalu, Ketua KIPP Jawa Timur Novri Bernado Thyssen mengaku diintimidasi pada saat beraudiensi dengan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Komisaris Besar Jhonny Edison Isir pada akhir November lalu. Menurut dia, Isir malah mempersoalkan jumpa pers KIPP di kantor Bawaslu soal dugaan ketidaknetralan Risma. “Dia menilai tindakan kami ilegal dan tak etis,” tutur Novri.

Novri bercerita, Isir meminta tindakan itu tidak diulangi. “Jangan sampai KIPP dilaporkan ke kepolisian,” tutur Novri menirukan pernyataan Isir. Dia keberatan terhadap peringatan itu. Kepala Polres, kata Novri, juga menyatakan tak peduli lawan pasangan calon yang didukung Risma merupakan purnawirawan polisi. Machfud adalah mantan Kepala Kepolisian Daerah Timur.

Ditanyai soal ini, Isir menyangkal mengintimidasi KIPP. “Kami hanya audiensi dan diskusi biasa,” katanya. Dia mengklaim ada keberatan dari Bawaslu Surabaya terkait dengan penggunaan ruangan lembaga itu untuk jumpa pers. Isir pun membantah jika disebut memihak salah satu calon. “Kami menyadari salah satu calon adalah jenderal purnawirawan. Keberadaan beliau tidak menggerus profesionalitas dan netralitas kami.”

Mendekati pemilihan wali kota, yang digelar Rabu, 9 Desember, suasana politik di Surabaya memang mendekati titik didih. Sebelumnya, beredar video berisi sejumlah orang yang tergabung dalam kelompok Banteng Ketaton—yang berarti “banteng terluka”—menyanyikan lagu “Menanam Jagung” dengan syair yang dipelesetkan menjadi: “Hancurkan Risma”.

Mat Mochtar, kader gaek PDIP Surabaya yang membentuk kelompok itu, enggan berkomentar soal video tersebut. “Saya dimarahi banyak orang,” ujarnya. Namun dia membenarkan soal keinginan sejumlah kader PDIP agar partai banteng menjagokan Whisnu Sakti Buana, yang kini menjabat Wakil Wali Kota Surabaya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto mengakui ada kekecewaan “orang lama” di Surabaya terhadap pencalonan Eri Cahyadi. Namun Bambang, yang telah bertemu dengan Whisnu setidaknya dua kali, menyatakan Whisnu sudah ikut bekerja memenangkan Eri. Mengakui pertarungan di Surabaya berjalan keras, Bambang meyakini Eri bakal menang. “Elektabilitasnya melesat jauh setelah rekomendasi partai turun,” kata Bambang.

Sebaliknya, Maman Abdurrahman, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, juga optimistis jagoannya yang bakal menang. Dia mengklaim mesin delapan partai pengusung Machfud Arifin-Mudjiaman telah bekerja keras. Maman menilai lawannya cenderung hanya mengandalkan sosok Tri Rismaharini. “Eri selalu menggunakan bayang-bayang Risma,” ujarnya.

•••

MENINGGINYA tensi politik lokal juga terjadi dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat. Ini dipicu sejumlah manuver politik untuk menetapkan kedua calon gubernur yang berlaga sebagai tersangka di kepolisian. Di ranah minang, memang ada dua kubu yang tengah berhadap-hadapan. Partai Gerakan Indonesia Raya menyokong pasangan wakil gubernur petahana Nasrul Abit dan Bupati Agam Indra Catri. Sementara itu, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional menjagokan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Mulyadi, dan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni.

Ketua Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade mengatakan elektabilitas jagonya bersaing ketat dengan lawan. Untuk memenangkan Nasrul, Gerindra

menghadirkan petinggi partai, seperti Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, dan bekas calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno ke provinsi itu. “Sumatera Barat halaman depan Gerindra, kami harus menang di sini,” kata Andre pada Rabu, 2 Desember lalu. Pada Pemilu 2019, Gerindra mendulang lebih dari 560 ribu suara dan mendapat tiga kursi Senayan dari dua daerah pemilihan.



(dari kiri) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Mulyadi - Ali Mukhni, Nasrul Abit - Indra Catri, Fakhrizal - Genius Umar , dan Mahyeldi - Audy (kanan), mengikuti Debat Publik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar, di Padang, Sumatera Barat, 23 November 2020. ANTARA/Iggoy el Fitra

Kampanye di sini memanas setelah Kepolisian Daerah Sumatera Barat menetapkan Indra sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal pencemaran nama di media sosial terhadap rivalnya, Mulyadi. Belakangan, polisi tak melanjutkan kasus tersebut. Kepala Divisi Humas Kepolisian RI Inspektur Jenderal Argo Yuwono justru menyatakan Indra belum ditetapkan sebagai tersangka. “Belum cukup bukti,” tuturnya.

Seorang pejabat yang mengetahui perkara itu mengatakan Markas Besar Polri telah meninjau ulang kasus tersebut. Buntutnya, Direktur Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat Komisaris Besar Arly Jembar Jumhana dimutasi ke bagian Pelayanan Masyarakat Polri. Argo Yuwono menyatakan mutasi itu sesuai dengan mekanisme di lingkup internal kepolisian.

Yang menarik, pada Sabtu, 5 Desember lalu, Markas Besar Polri malah berbalik, menetapkan Mulyadi sebagai tersangka kasus pidana pemilu karena dianggap berkampanye lebih awal di televisi. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat Andi Arief mendadak sontak mengkritik keputusan polisi itu. “Menetapkan tersangka pelanggaran pemilu memasuki minggu tenang bukan hanya aneh. Publik bertanya-tanya, sebenarnya tugas aparat itu mengayomi atau ikut

berkompetisi," kata Andi Arief. Namun dia meyakini Mulyadi bakal memenangi pemilihan gubernur di Sumatera Barat.

PRAMONO, BUDIARTI UTAMI PUTRI, INDRA WIJAYA (JAKARTA), KUKUH S. WIBOWO, NUR HADI (SURABAYA), LANGGAM.ID

Pilkada 2020 Gerindra Tri Rismaharini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Ringkasan Berita: Memburu Ali Kalora dan KPK Tangkap Sejumlah Pejabat



Prajurit TNI AD melakukan penyisiran untuk memburu kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), di Desa Lembangtongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, 1 Desember 2020. ANTARA/Eddy Djunaedi

KEPOLISIAN dan Tentara Nasional Indonesia memburu kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Mereka mempersempit ruang gerak kelompok pimpinan Ali Kalora itu setelah terjadi pembantaian satu keluarga di Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. “Kapolri memerintahkan Kepala Polda Sulawesi Tengah berkantor di Poso dan di-*backup* oleh tim terbaik Bareskrim Polri,” ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI Inspektur Jenderal Argo Yuwono, Rabu, 2 Desember lalu.

Pembantaian terhadap empat orang dalam satu keluarga terjadi pada Jumat pagi, 27 November lalu. Pelaku diduga berjumlah sepuluh orang dan merupakan anggota MIT. Kepala Polri Jenderal Idham Azis memerintahkan anggotanya menembak mati anggota MIT yang melawan.

Polri dan TNI mengerahkan tim Satuan Tugas Operasi Tinombala, *drone*, serta peralatan teknologi dan informasi intelijen untuk memburu kelompok Ali Kalora. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Awi

Setiyono mengatakan personel tambahan dari TNI sudah tiba di Sigi untuk membantu polisi. “Ada informasi tambahan dari TNI Angkatan Darat dan Marinir Angkatan Laut sebanyak 30 orang,” katanya.

Komandan Komando Resor Militer 132/Tadulako Brigadir Jenderal Farid Makruf mengatakan kelompok MIT diperkirakan masih di sekitar tempat kejadian karena memiliki logistik yang cukup hasil jarahan dari warga. Dia menyatakan pengejaran kelompok ini akan diperkuat pasukan Komando Strategis Angkatan Darat dan Marinir dari Palu.

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjQ5OjUxIl0
Presiden Joko Widodo mengutuk aksi teror tersebut. Jokowi menilai aksi itu bertujuan menciptakan provokasi dan teror di tengah masyarakat. Presiden berjanji memberikan santunan untuk keluarga korban.

Pembantaian Saat Sarapan

EMPAT orang dalam satu keluarga diduga dibunuh oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Berikut ini kronologinya.

Jumat, 27 November 2020, Pukul 07.30 Waktu Indonesia Tengah
Pelaku: Sepuluh orang, dua orang membawa pistol, satu pelaku menenteng senjata laras panjang

Korban meninggal: Empat orang dalam satu keluarga (Yasa selaku kepala rumah tangga, Pinus, Papa Jana alias Naka, dan Pedi)

07.30 Wita
- Saksi Ney melihat sepuluh orang mendatangi rumahnya di Dusun 5 Tokelemo, Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo. Saat itu, Ney dan Yasa, suaminya, sedang sarapan.
- Para pelaku masuk ke dalam rumah dan memanggil Yasa.
- Kelompok MIT mengikat Ney, lalu membunuh Yasa menggunakan parang.
- Pinus, yang berada di belakang Ney, juga dibunuh.
- Pelaku membantai korban lain, yakni Jana dan Pedi. Jenazah kedua orang itu kemudian dibakar.
- Enam rumah yang menjadi tempat pelayanan umat kristiani dibakar.
- Para pelaku merampas beras sekitar 40 kilogram dan bahan makanan lain.
- Para tetangga Yasa berlari ke hutan untuk menyelamatkan diri.
- Sebanyak 49 keluarga mengungsi.

14.30 Wita
- Tim Satuan Tugas Tinombala tiba di lokasi kejadian.

15.00 Wita

- Empat korban dimakamkan.

2 Desember 2020

- Sebanyak 36 keluarga kembali ke Dusun 5 Tokelemo. Sisanya, yang merupakan keluarga korban, memutuskan pindah kampung.

KPK Cokok Bupati Banggai Laut



Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan barang bukti berupa uang tunai saat konferensi pers operasi tangkap tangan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo di gedung KPK, Jakarta, 4 Desember 2020. ANTARA/Hafidz Mubarak A.

KOMISI Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo pada Kamis, 3 Desember lalu. Calon kepala daerah inkumben yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu diduga menerima suap lebih dari Rp 2 miliar dari sejumlah pengusaha terkait dengan pengerjaan proyek infrastruktur di Banggai Laut, Sulawesi Tengah.

"KPK menetapkan enam orang tersangka, WB (Wenny Bukamo) sebagai penerima," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Jumat, 4 Desember lalu. Komisi antikorupsi juga menetapkan orang kepercayaan Wenny, Recky Suhartono Godiman, dan Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengky Thiono sebagai tersangka penerima suap.

Nawawi mengatakan duit itu akan digunakan Wenny untuk kampanye pemilihan kepala daerah 2020. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan partainya tak akan memberikan bantuan hukum kepada Wenny.

Bekas Anggota BPK Ditahan

KOMISI Pemberantasan Korupsi menahan bekas anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Djalil. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi sistem penyediaan air minum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Tersangka ditahan selama 20 hari pertama," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta pada Kamis, 3 Desember lalu.

Rizal diduga menerima duit senilai Sin$ 100 ribu—sedikitnya Rp 1 miliar dengan kurs sekarang—dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo J. Prasetyo. Pemberian upeti itu diduga bertujuan agar Rizal membantu PT Minarta mendapatkan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum.

Proyek itu kemudian dimenangi oleh Minarta. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2018.

Pejabat Negara Terinfeksi Virus Corona



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemani petugas medis yang memakai baju *hazmat* saat berolahraga di rumah dinas Gubernur di Jakarta, 3 Desember 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W.

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan dinyatakan positif terinfeksi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 pada Selasa, 1 Desember lalu. Dia mengisolasi diri di rumah dinas gubernur di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. "Saya akan mengikuti prosedur pengobatan yang dianjurkan tim medis," katanya.

Empat hari sebelumnya, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria terkonfirmasi positif *corona*. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan tes usap terhadap 437 orang yang berkontak erat dengan Anies dan Riza. Hasilnya, terdapat 24 orang yang positif Covid-19.

Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terinfeksi virus *corona*. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu mengaku sedang melaksanakan isolasi untuk mencegah penyebaran wabah. Penambahan kasus baru harian terus meningkat. Pada 3 Desember lalu, tercatat 8.369 kasus baru—terbanyak sejak pandemi muncul pada awal Maret lalu.

Menteri Sosial Tersangka Kasus Suap

KOMISI Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan Covid-19. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan Juliari diduga menerima Rp 14,5 miliar dari PT Agro Utama dalam proyek pengadaan paket bahan kebutuhan pokok senilai Rp 5,9 triliun.

Menurut Firli, Juliari menunjuk dua pejabat pembuat komitmen, yaitu Matheus Joko Santoso dan AW, untuk melakukan penunjukan langsung. “Uang kepada JPB (Juliari Peter Batubara) diberikan melalui Matheus dan SN (Shelvy N.),” kata Firli dalam jumpa pers pada Ahad dinihari, 6 Desember. Shelvy adalah sekretaris di Kementerian Sosial.

Uang itu diserahkan di suatu tempat di Jakarta pada Sabtu, 5 Desember lalu. KPK menciduk enam orang dalam operasi tangkap tangan. Selain Juliari, empat orang lain ditetapkan sebagai tersangka.

Ali Kalora Anies Baswedan BPK Kementerian Sosial KPK

Alasan Kejaksaan dan Bareskrim Menelisik Lagi Hibah Kemepora yang Pernah Diusut KPK



Video sidang pledoi kasus pemberian dana hibah Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), serta gratifikasi, dengan terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Imam Nahrawi, disiarkan secara daring dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Jumat, 19 Juni 2020./TEMPO/Imam Sukamto

- **Kejaksaan Agung sudah memeriksa sekitar 300 saksi dalam kasus korupsi dana hibah Kementerian Pemudan dan Olahraga. .**
- **Kejaksaan Agung juga menelisik kebocoran anggaran Satlak Prima. 21657**
- **KPK berencana menindaklanjuti rencana suap kepada bekas Jampidsus Adi Toegarisman dan Wakil Ketua BPK Achsanul Qosasi. .**

EMPAT saksi mendatangi Gedung Bundar di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Selasa, 1 November lalu. Tiga di antaranya berinisial MSG, EK, dan FA. Mereka menjabat direktur tiga perusahaan rekanan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Saksi lain berinisial TP, sopir di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memanggil mereka demi melengkapi penyelidikan dugaan penyelewengan dana hibah Kemenpora kepada KONI sebesar Rp 25 miliar tahun anggaran 2016-2017. “Kejaksaan terus melanjutkan dana hibah yang terindikasi ada tindak pidana korupsi itu,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono, Jumat, 4 Desember lalu.

Pemeriksaan keempat saksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan yang digelar Kejaksaan Agung sejak dua tahun lalu. Surat perintah penyelidikan kasus itu diteken Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kala itu, Adi Toegarisman, pada Juli 2018.

Hingga Desember ini, penyelidik sudah memeriksa sekitar 300 saksi. Ketiga direktur perusahaan rekanan KONI itu, misalnya, ditengarai mengetahui aliran dana hibah. Namun Kejaksaan belum menetapkan satu pun tersangka. “Pada saatnya nanti kami sampaikan,” ucap Hari.

Penyelidikan berkembang ke dugaan kebocoran anggaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) yang diresmikan pada 2015. Kementerian Pemuda dan Olahraga membentuk lembaga ini untuk membina atlet nasional agar memiliki kemampuan tingkat internasional.

Pemerintah membubarkan Satlak Prima lewat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional. Namun puluhan miliar rupiah uang negara sudah mengalir ke lembaga tersebut.

Indikasi penyelidikan mengarah ke sana terlihat dari materi pemeriksaan Kejaksaan Agung. Penyelidik memeriksa Bendahara Kemenpora Fauzan Rahim pada 20 Oktober lalu. Undangan pemeriksaan menuliskan soal penghitungan kerugian negara dalam penyaluran dana hibah KONI. Tapi Fauzan justru banyak ditanya seputar pembiayaan program Satlak Prima. “Cuma itu yang saya jelaskan,” ucap Fauzan.



Terdakwa asisten pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga, Miftahul Ulum, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 4 Juni 2020./TEMPO/Imam Sukamto

Kejaksaan menggenjot pemeriksaan setelah menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan. Pada 8 Mei 2020, BPK mengirim hasil audit dana hibah tersebut kepada Kejaksaan Agung. “Memang ada banyak masalah seputar laporan keuangan Kemenpora kala itu. Selama tiga tahun berturut-turut (2017-2019), statusnya *disclaimer*,” kata Wakil Ketua BPK Achsanul Qosasi.

Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewabroto mengatakan Kejaksaan sudah memeriksa puluhan anggota staf. Sebagian besar di antaranya adalah pegawai di bawah Deputi IV Kemenpora. Deputi IV membawahkan pembinaan sejumlah cabang olahraga, termasuk organ temporer yang dibentuk pemerintah semacam Satlak Prima.

Dugaan penyelewengan anggaran Satlak Prima juga menarik perhatian para penyelidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI. Tapi baik penyelidikan Kejaksaan maupun polisi belum juga menemukan titik terang.

• • •

KOMISI Pemberantasan Korupsi menangkap sembilan pegawai dalam rangkaian operasi tangkap tangan di kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Selasa, 18 Desember 2018. Petugas turut memboyong Deputi IV Mulyana dan pejabat eselon III. Lima di antaranya, termasuk Mulyana, ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat korupsi dana hibah Kemenpora kepada KONI.

Penyidikan KPK berkembang ke pejabat yang lebih tinggi. Komisi antirasuah menangkap Miftahul Ulum, anggota staf khusus Menteri Pemuda dan Olahraga

Imam Nahrawi, pada September 2019. Ia diduga menerima setoran Rp 11,5 miliar dari pejabat KONI untuk memuluskan dana hibah.

Dua pekan berselang, KPK menahan Imam Nahrawi. Ia diduga mengetahui penerimaan uang tersebut. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menghukum Miftahul 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta pada 15 Juni lalu. Pengadilan yang sama menghukum Imam 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta pada 29 Juni 2020. Keduanya terbukti menerima suap dan gratifikasi pengurusan dana hibah Kemenpora kepada KONI.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan pemeriksaan di lembaganya berbeda dengan penyidikan KPK. Penyidik KPK menelusuri anggaran dana hibah 2017-2018. “Kejaksaan berfokus pada pencairan dana hibah periode 2016-2017,” ucapnya.

Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewabroto turut diperiksa di Kejaksaan Agung dan KPK pada Juni dan Juli 2019. Kepada kedua lembaga, Gatot menjelaskan regulasi yang mendasari bantuan Kemenpora kepada KONI.

Ketentuan yang melatari penyaluran dana hibah diatur dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional. “Pasal itu sebenarnya menutup peluang bantuan untuk KONI,” tuturnya.

Berdasarkan aturan tersebut, Gatot menambahkan, penyaluran dana hibah mestinya diberikan langsung kepada tiap cabang olahraga. Ia pun menjelaskan hal yang sama saat bersaksi di persidangan Miftahul Ulum dan Imam Nahrawi.

Namun Gatot tidak mengetahui mengapa pejabat Kemenpora tetap menyalurkan dana hibah kepada KONI. “Saya tidak begitu paham. Waktu itu saya sudah jadi Sesmenpora. Kuasa pengguna anggaran itu ada di kedeputian terkait,” ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal KONI Othniel Mamahit menjelaskan dana hibah yang diterima KONI tidak ditujukan ke cabang olahraga. KONI meminta dana hibah tahun anggaran 2016-2017 untuk biaya pengawasan dan pendampingan.

Ia mengakui banyak persoalan seputar pengelolaan dana tersebut pada periode kepengurusan lama. BPK pun menemukan sejumlah transaksi yang diduga fiktif dalam berbagai laporan keuangan KONI.

Kejaksaan memanggil sekitar 140 atlet dan manajer yang selama ini berhubungan dengan program kerja KONI. Pengakuan mereka melengkapi sejumlah kegiatan

fiktif di sejumlah cabang olahraga. “Ke depan, kami bakal menata proses penganggaran yang akuntabel agar kejadian yang menyeret sejumlah pejabat di Kemenpora dan KONI di KPK tak terulang,” ujar Othniel.

• • •

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjUwOjQ2Il0
PENGAKUAN Miftahul Ulum saat menjadi saksi bagi terdakwa Imam Nahrawi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, pada 15 Mei 2020, membetot perhatian publik. Ia mengungkap rencana suap Rp 10 miliar mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Adi Toegarisman, dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Achsanul Qosasi.

Miftahul mengatakan suap itu diberikan untuk “mengerem” penyelidikan korupsi dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga di Kejaksaan. Ia menjelaskan rencana pemberian uang itu dibahas bersama pejabat KONI berinisial HMD dan AW di salah satu hotel di Jakarta Pusat.

Dalam persidangan, Miftahul menjelaskan mereka bersepakat menyiapkan uang sebesar Rp 10 miliar dari pinjaman dan kas KONI. Dari total dana yang terhimpun itu, sebanyak Rp 7 miliar akan diberikan kepada Adi Toegarisman dan Rp 3 miliar untuk Achsanul.

Kejaksaan pun Agung membentuk tim khusus selepas kesaksian Miftahul di persidangan. Berbekal izin pengadilan, tim penyidik Kejaksaan meminjam Miftah dari rumah tahanan KPK untuk mendalami pengakuan tersebut.

Pemeriksaan tertanggal 19 Mei itu berujung pada kesimpulan bahwa pengakuan Miftah tak terbukti. “Tidak cukup petunjuk yang bisa kami gunakan untuk membenarkan pengakuan dia. Toh, buktinya Miftahul juga sudah membuat pernyataan maaf,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono.

Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Bhatara Ibnu Reza mengatakan Komisi Kejaksaan sudah berupaya mengklarifikasi rencana suap Miftahul *cs*. Timnya menemui Miftahul selepas menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Namun Miftahul memilih bungkam. “Dia mengaku hanya akan membuka diri jika ada jaminan keamanan dan keselamatan,” ucapnya.

Komisi Kejaksaan menawarkan Miftahul agar melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ia tetap menolak. “Miftahul seolah menganggap kami bagian dari Korps Kejaksaan,” tutur Bhatara.

Tempo berupaya menghubungi Adi Toegarisman untuk mengklarifikasi kesaksian Miftahul. Namun ia tak merespons panggilan telepon dan permintaan wawancara lewat pesan pendek hingga Sabtu, 5 Desember lalu. Kepada sejumlah awak media, Adi menganggap tuduhan suap itu fitnah. Ia mengaku tak pernah menemui pihak Kemenpora dan KONI saat menyelidiki kasus dana hibah itu.



Achsanul Qosasi./TEMPO/STR/Andi Aryadi

Achsanul Qosasi juga membantah kesaksian Miftahul. Menurut dia, perkara yang ditangani Kejaksaan berangkat dari hasil audit BPK untuk tahun anggaran 2016-2017. Achsanul mengaku baru membawahkan pemeriksaan anggaran untuk tahun anggaran 2017-2018. “Saya tidak mau komentar lagi soal itu. Karena sudah jelas dia membantah dan meminta maaf,” ujarnya.

Pengacara Miftahul Ulum, Wa Ode Nur Zainab, membenarkan adanya koreksi pengakuan dan permohonan maaf kliennya. Miftahul menyampaikan pernyataan itu saat membacakan pleidoi. Namun, Wa Ode menambahkan, pernyataan Miftahul tidak menganulir pengakuan soal rencana suap. “Dia hanya meminta maaf karena menyebut kedua nama itu dalam persidangan. Substansi ucapannya tidak ada yang dicabut,” katanya.

Menurut Wa Ode, KPK sudah mengantongi petunjuk untuk menelusuri rencana suap tersebut. KPK memiliki rekaman penyadapan pembahasan rencana suap itu. “Klien kami pernah diperdengarkan rekaman sadapan yang menghubungkan siapa saja yang terlibat. Jadi tunggu apa lagi?” ucapnya.

Pimpinan KPK membuka pintu penyelidikan terhadap pengakuan Miftahul Ulum. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan pimpinan sudah

mengumpulkan tim penyidik untuk mempelajari kesaksian Miftahul. “Kami akan lihat apakah cukup alat bukti dan keterangan para saksi, juga mempelajari petikan putusan dari kasus-kasus sebelumnya,” ujarnya.

RIKY FERDIANTO | LINDA TRIANITA | ANDITA RAHMA

Suap dan Korupsi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) KONI KPK

Peran Taufik Hidayat dalam Dugaan Korupsi Anggaran Satlak Prima Kemenpora



Taufik Hidayat (kiri) setelah diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap Kementerian Pemuda dan Olahraga di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Agustus 2019./TEMPO/Muhammad Hidayat

- **Uang makan dan akomodasi atlet bulu tangkis di Program Indonesia Emas diduga dikorupsi. .**
- **Polisi sudah memeriksa sejumlah pengurus PBSI dan Satlak Prima. 21657**
- **Wakil Ketua Satlak Prima Taufik Hidayat diduga mencairkan dana Satlak tanpa meneken kuitansi. .**

DUGAAN penyelewengan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga periode 2014-2019 turut menarik perhatian Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI. Sejak pertengahan tahun lalu, penyelidik menelisik dugaan kebocoran uang konsumsi dan akomodasi atlet bulu tangkis dari Kementerian yang berjumlah sekitar Rp 1,075 miliar.

Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Brigadir Jenderal Djoko Purwanto mengatakan kasus ini berbeda dengan dugaan korupsi yang tengah ditangani

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung. “Saya masih mengecek detail kasusnya. Tapi bisa saja kami menanganinya,” ujar Djoko pada Jumat, 4 Desember lalu.

Saat ini, Kejaksaan Agung tengah mengebut pengusutan kasus dugaan korupsi Rp 25 miliar dana hibah Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) periode 2017. Penyelidikan dimulai sejak pertengahan 2019. Ada seratusan saksi yang diperiksa dalam kasus ini.

Namun KPK lebih dulu menahan Menteri Pemuda dan Olahraga 2014-2019, Imam Nahrawi, pada akhir September 2019. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menghukum Imam dengan 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta pada 29 Juni lalu. Ia terbukti menerima suap dan gratifikasi pengurusan dana hibah ke KONI dengan jumlah total sekitar Rp 20 miliar.

Polisi menelisik pos anggaran yang berbeda. Mereka menemukan dugaan kebocoran anggaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) untuk cabang olahraga bulu tangkis. Sejumlah pengurus diduga menilap uang konsumsi dan akomodasi atlet muda itu pada awal 2017.

Penyelidik Bareskrim menyambangi kantor Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) di Cipayung, Jakarta Timur, pada medio 2019. Mereka menggali informasi ke para pengurus inti dan bagian keuangan PBSI. Polisi juga mencecar pengurus keuangan ihwal alokasi penggunaan uang makan dan akomodasi tersebut.

Personel Bareskrim juga meminta bukti-bukti pengeluaran anggaran. Namun, setahun berselang, Bareskrim tak kunjung mengungkap perkembangan penyelidikan.

Kasak-kusuk dugaan penyelewengan anggaran Satlak Prima sudah muncul sejak tiga tahun lalu. Kebocoran menyeruak saat pengurus PBSI hendak mencairkan uang makan dan akomodasi para atlet yang mengikuti program Prima. Nama Wakil Ketua Satlak Prima kala itu, Taufik Hidayat, muncul dalam berbagai perbincangan.

Program Indonesia Emas bertujuan menghasilkan atlet nasional yang mampu berprestasi di tingkat internasional. Sekretaris Jenderal PBSI periode 2016-2020, Achmad Budiarjo, mengatakan anggaran dari Satlak Prima biasanya dicairkan tiap dua bulan.

Pada awal 2017, dua pengurus PBSI mendatangi Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mencairkan dana makan dan akomodasi atlet untuk November-Desember 2016. Jumlahnya mencapai Rp 1,075 miliar. Namun kedua pengurus PBSI itu kembali dengan tangan kosong.

Belakangan, mereka mengetahui Taufik Hidayat sudah mencairkan uang makan dan akomodasi atlet badminton itu beberapa hari sebelumnya. “Ini sempat ramai karena kami tidak pernah mengeluarkan surat mandat atau surat tugas ke yang bersangkutan untuk mengambil itu,” ujar Achmad Budiarjo.

Peraih medali emas tepok bulu Olimpiade 2004 itu diduga berupaya menyamarkan jejak pencairan uang. Ia diduga tak menandatangani kuitansi pengambilan uang. Asisten Taufik meneken dokumen tanda terima pencairan anggaran.

Kisah ini belakangan terungkap dalam persidangan Imam Nahrawi. Direktur Perencanaan dan Anggaran Program Satlak Prima Tommy Suhartanto bersaksi pernah menyerahkan uang Rp 800 juta kepada Taufik. Uang itu diduga merupakan bagian dari hak para atlet bulu tangkis yang berjumlah Rp 1,075 miliar.

Namun Taufik membantah. Ia menjelaskan bertugas di Satlak Prima sebagai pembuat program, bukan mengurusi keuangan. “Beliau (Tommy) ada di situ. Dia meminta saya tanda tangan dan saya tidak tanda tangan, karena itu bukan ranah saya dan bukan hak saya juga,” ucap Taufik.

Persidangan itu juga mengungkap Taufik pernah menyerahkan Rp 1 miliar lewat anggota staf khusus Imam Nahrawi, Miftahul Ulum. Uang itu juga berasal dari anggaran Satlak Prima, tapi dari pos berbeda. “Saya hanya diminta tolong seperti itu di telepon, dan sebagai kerabat di situ ya saya membantu. Tapi saya tidak konfirmasi ke Pak Imam kalau uang sudah dititipkan ke Ulum,” ujar Taufik.

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewabroto mengatakan anggota staf khusus Imam memang ditugaskan untuk mengumpulkan uang setoran dari tiap kedeputian. Taufik diduga mendapat tugas mengumpulkan setoran uang yang diambil dari anggaran keolahragaan di Deputi III dan Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga. “Betul seperti itu,” tutur Gatot.

Dia juga menyampaikan keterangan ini saat menjadi saksi dalam sidang untuk terdakwa salah satu anggota staf khusus Imam, Miftahul Ulum, pada Februari lalu. Ulum telah diganjar hukuman 4 tahun bui pada Juni lalu.

Imam dan Taufik pernah bersahabat. Menurut dua sumber yang mengetahui sepak terjang Taufik, kedekatan dengan Imam Nahrawi membuat mantan juara dunia ini *cawe-cawe* dalam berbagai proyek di Kemenpora. Dalam program persiapan Asian Games 2018, misalnya, PBSI pernah mendapat jatah bantuan delapan karpet lapangan.

Pengadaan karpet merek ternama itu sempat menimbulkan kontroversi karena digelar mendadak. Ada kisah tarik-menarik antara vendor, pengurus PBSI, dan staf Kemenpora dalam tender tersebut. Nama Taufik muncul di belakang salah satu vendor karpet badminton.

Kini, hubungan keduanya retak. Dalam persidangan, Imam mengatakan Taufik pernah menerima Rp 7 miliar dan Rp 800 juta dalam waktu yang berbeda. Ia menuding uang itu akan digunakan untuk pengurusan perkara di Kejaksaan Agung. “Entah ke mana dan mengapa itu hilang tanpa kejelasan. Hilang seolah-olah tenggelam,” ujar Imam saat memberikan keterangan dalam persidangan, 19 Juni lalu.

Tempo berupaya meminta konfirmasi ihwal sejumlah tudingan, termasuk dugaan kebocoran dana atlet bulu tangkis yang mengikuti Program Indonesia Emas, ke Taufik Hidayat. Namun ia tak merespons panggilan telepon dan pesan berisi pertanyaan dan permintaan wawancara hingga Sabtu, 5 Desember lalu.

Kuasa hukum Imam Nahrawi, Wa Ode Nur Zainab, mengatakan kliennya berharap penegak hukum mengusut aliran duit tersebut. “Permintaan Pak Imam agar dana yang diduga mengalir ke oknum Kejagung dan TH bisa diusut,” ujar Wa Ode.

Kejaksaan Agung dan Bareskrim masih belum menetapkan satu pun tersangka korupsi anggaran Kementerian Pemuda. Brigadir Jenderal Djoko Purwanto mengatakan timnya masih terus berupaya menelusuri kasus kebocoran anggaran Satlak Prima atlet bulu tangkis ini.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Ali Mukartono mengatakan belum menyelidiki aliran dana yang mengalir ke institusinya. Ia memastikan pengusutan kasus dana hibah pada 2017 terus berjalan. “Penggunaan anggarannya kecil-kecil, untuk bayar hotel dan lainnya. Jadi banyak yang perlu diperiksa,” ucap Ali.

Bagaimana Strategi Trump untuk Mengatasi Gugatan Hukum Setelah Tak Menjabat Presiden



Presiden Amerika Serikat Donald Trump usai memberikan sambutan pada perayaan Thanksgiving di GedungPutih, Washington, Amerika Serikat, 24 November 2020. REUTERS/Hannah Mckay

- **Presiden Donald Trump mengampuni bekas penasehatnya yang terlibat kasus intervensi Rusia dalam pemilihan Presiden Amerika. .**
- **Trump juga membicarakan kemungkinan memberikan pengampunan untuk dirinya sendiri. 21657**
- **Sejumlah gugatan hukum menunggu Trump setelah masa kepresidenannya berakhir. .**

MICHAEL Flynn sudah dua kali berbohong kepada Badan Penyelidik Federal Amerika Serikat (FBI). Dia membantah saat dituduh pernah berkomunikasi dengan pejabat Rusia. Padahal tim FBI pimpinan Robert Mueller menemukan hal sebaliknya ketika menyelidiki dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden Amerika pada 2016.

Gara-gara skandal itu, Flynn harus hengkang dari Gedung Putih. Jabatan Flynn sebagai penasihat keamanan nasional cuma bertahan 23 hari setelah Presiden Donald Trump memecatnya pada Februari 2017. Namun, selama Trump berkuasa, kasus Flynn menggantung. Kasusnya berhenti di meja pengadilan banding karena hakim belum memutuskan apakah akan menolak banding atau menghukum Flynn. Adapun Departemen Kehakiman terus mendorong agar kasus pensiunan jenderal Angkatan Darat itu dicabut.

Memanfaatkan kuasanya sebagai presiden, Trump kemudian mengampuni Flynn lewat cuitannya pada 26 November lalu. Pengumuman itu bertepatan dengan perayaan Thanksgiving yang juga menjadi hari libur nasional Negeri Abang Sam. "Selamat untuk Jenderal Flynn dan keluarganya! Saya yakin kalian bisa menikmati Thanksgiving dengan meriah!" ucap Trump.

Empat hari kemudian, Departemen Kehakiman merilis salinan surat pengampunan dari Trump. Lembaga itu, seperti dilaporkan *CNN*, juga meminta pengadilan federal membatalkan kasus Flynn. Dengan pengampunan itu, Flynn dibebaskan dari kasus hukumnya.

Pengampunan untuk Flynn menjadi salah satu manuver kontroversial Trump menjelang akhir tugasnya sebagai presiden. Pada Juli lalu, Trump juga membebaskan Roger Stone, yang sebelumnya divonis tiga tahun dan empat bulan penjara dalam kasus serupa dengan Flynn. Pengadilan menilai sekutu Trump itu bersalah karena berbohong kepada Kongres dan menghalangi penyelidikan.

Para pendukung Trump menyambut gembira ampunan yang diberikan oleh Partai Republik itu karena menilai Flynn dan Stone sebagai korban serangan politik lawan-lawannya. Namun kritik keras datang dari kubu Partai Demokrat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi menyebut tindakan Trump sebagai korupsi besar dan penyalahgunaan kekuasaan yang sangat kurang ajar. Ketua Komite Intelijen DPR Adam Schiff menyatakan pengampunan itu secara tidak langsung telah menghapus kebenaran bahwa Flynn sudah mengaku bersalah. "Tak peduli sebesar apa usaha Trump dan sekutunya untuk mengubah hal itu."

Pengampunan adalah hak Presiden Amerika yang dilindungi konstitusi. Para pendiri negara Amerika menyatakan bahwa wewenang pengampunan itu sangat penting untuk menunjukkan belas kasihan dan melayani masyarakat lebih baik. Meski demikian, wewenang itu tak berlaku absolut. Wewenang itu hanya berlaku untuk kejahatan di tingkat hukum federal. Meski demikian, presiden tak perlu mendapatkan pertimbangan dari lembaga pemerintah lain atau memberikan alasan atas keputusannya.

Sejumlah presiden pernah memberikan ampunan dalam kasus besar. Gerald Ford pernah mengampuni Richard Nixon pada 1974 setelah Nixon mundur dari kursi kepresidenan karena terlibat skandal Watergate. Pada 1977, Jimmy Carter memberikan ampunan terbesar kepada lebih dari 200 ribu warga Amerika yang dituduh melanggar wajib militer karena menolak berpartisipasi dalam Perang Vietnam.

Pada 2001, Bill Clinton pernah mengampuni adiknya, Roger, yang terbukti bersalah dalam kasus kepemilikan kokain di Negara Bagian Arkansas. Secara keseluruhan, Clinton memberikan ampunan kepada 450 orang, termasuk Marc Rich, donatur Partai Demokrat yang kabur ke luar negeri karena kasus penghindaran pajak.

Selama menjabat presiden, Trump mendapatkan perlindungan hukum istimewa yang membuatnya kebal dari gugatan. Meski demikian, keistimewaan itu bakal sirna setelah kalah oleh Joe Biden dalam pemilihan presiden pada November lalu. Setelah Biden dilantik menjadi Presiden Amerika pada 20 Januari mendatang, Trump menjadi warga negara biasa lagi.

Pada saat itulah Trump akan menjadi sasaran empuk para penegak hukum yang selama ini menyelidiki dugaan kejahatan yang dilakukannya. Menurut mantan jaksa federal dan Negara Bagian New York, Daniel R. Alonso, keadaan bakal langsung berubah begitu Trump keluar dari Gedung Putih. “Dia tak bisa lagi menggunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk menghentikan penyelidikan,” tuturnya kepada *BBC*.

Trump juga ditengarai mencari cara untuk memberikan ampunan lebih awal untuk anggota keluarga dan para sekutunya. Menurut *ABC News*, Trump pernah sesumbar bahwa dia memiliki hak absolut untuk mengampuni dirinya sendiri. Tapi dia tak melakukannya karena merasa tak pernah berbuat salah. Pengacara Trump, Rudy Giuliani, pada 2018 juga menyebut bahwa konstitusi mengizinkan presiden untuk mengampuni dirinya sendiri.

Laporan *The New York Times* pada 2 Desember lalu menyebut Trump pernah berdiskusi dengan para penasihatnya untuk memberikan ampunan kepada anggota keluarganya, yaitu Donald, Ivanka, dan Eric, serta menantunya, Jared Kushner. Nama Rudy Giulinani juga disebut dalam daftar tersebut. Trump rupanya khawatir Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan Biden nanti mungkin bakal mengincarnya. Giuliani, lewat pernyataannya di Twitter, menyebut laporan itu sebagai berita bohong.

Donald, anak tertua Trump, masuk dalam daftar penyelidikan Robert Mueller atas dugaan keterlibatan dalam kasus intervensi Rusia dalam pemilihan umum 2016. Adapun Kushner diduga memberikan informasi palsu soal kontak personal yang dimilikinya ketika menjalani pemeriksaan untuk mendapatkan akses keamanan tingkat tinggi di Gedung Putih. Sementara itu, Ivanka, Eric, dan Giuliani disebut terlibat dalam aktivitas Trump Organisation, perusahaan milik Trump, yang sedang diselidiki oleh Kantor Jaksa Agung New York.

Sederet kasus hukum lain sudah menunggu Trump. Pada 2018, Trump tersandung skandal "uang tutup mulut" yang diumbar model majalah *Playboy*, Karen McDougal, dan artis film porno Stormy Daniels. Keduanya mengaku pernah berhubungan intim dengan Trump. Mereka menyatakan menerima bayaran untuk tak membicarakan hal itu karena Trump sedang bersiap dalam kampanye pemilihan presiden pada 2016.

Pengakuan McDougal dan Daniels membuka pintu penyelidikan pelanggaran aturan federal soal pendanaan kampanye. Mantan pengacara pribadi Trump, Michael Cohen, akhirnya mengaku mengatur pembayaran kepada kedua perempuan tersebut. Cohen pun dijatuhi hukuman tiga tahun penjara pada 2018.

Keterkaitan Trump dalam kasus ini semakin terang pada Februari 2019. Di depan Kongres, Cohen menyatakan Trump tahu soal pembayaran uang tersebut. Dokumen FBI, yang dibuka atas perintah hakim Distrik Manhattan, New York, William Pauley, pada Juli 2019, menyebut Trump terlibat dalam pengaturan pembayaran uang tutup mulut sebesar US$ 130 ribu kepada Daniels.

Dokumen itu, seperti dilaporkan *Reuters*, juga mengungkap rangkaian komunikasi antara Trump, Cohen, dan juru bicara tim kampanye Trump kala itu, Hope Hicks. Kasus uang tutup mulut ini juga diduga berkaitan dengan pemalsuan data bisnis perusahaan Trump. Sekalipun ada bukti yang cukup, Trump tak bisa dituntut saat masih menjabat presiden.

Jaksa Agung Distrik Manhattan Cyrus Vance juga tengah menyelidiki dugaan pemalsuan data bisnis Trump Organisation. Seperti dilaporkan *CNN*, investigasi yang dilakukan tim Vance juga meliputi kemungkinan keterlibatan Trump dalam kasus penipuan bank, penggelapan asuransi, dan kecurangan pembayaran pajak. Trump berulang kali berusaha menghentikan upaya Vance yang meminta penjelasan soal data finansial dan pembayaran pajaknya selama delapan tahun.

Trump, seperti dilaporkan *The Guardian*, tidak pernah membayar pajak federal

dalam 10-15 tahun sebelum terpilih menjadi presiden. Pada 2016-2017, dia bahkan hanya membayar pajak kurang dari US$ 750. Pada 2010, Trump mendapatkan pengembalian pajak hampir US$ 73 juta setelah mengklaim bisnisnya merugi lebih dari US$ 1 miliar. Otoritas Pajak Amerika (IRS) tengah mengaudit kasus ini. Jika Trump terbukti bersalah, dia harus mengembalikan duit itu beserta penalti yang jumlahnya bisa lebih dari US$ 100 juta.

Jaksa Agung New York Letitia James juga tengah mengincar Trump dan keluarganya terkait dugaan pemalsuan nilai aset perusahaan. Sejak Maret tahun lalu, James memimpin investigasi dugaan kebohongan Trump Organisation. Salah satu bukti kuncinya adalah pengakuan Cohen di hadapan Kongres yang menyebut Trump sengaja mendongkrak nilai aset propertinya untuk mendapatkan pinjaman bank. Namun Trump malah menurunkan nilai asetnya untuk mendapatkan keringanan pajak.

Setelah Trump tak lagi menjabat presiden, James bakal lebih leluasa memanggilnya untuk memberikan keterangan. Selama ini, Trump selalu mangkir dan beralasan terlalu sibuk untuk mengurusi kasus hukum tersebut. “Investigasi ini bakal berlanjut. Kami dipandu fakta dan hukum, bukan urusan politik,” ujar James dalam pernyataan tertulisnya pada Kamis, 3 Desember lalu.

Trump juga akan menghadapi gugatan dari Kantor Jaksa Agung Negara Bagian Maryland dan Washington, DC. Trump diduga melanggar larangan pejabat negara untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan pengaruh atau jabatannya. Ia ditengarai mendapat keuntungan dari tamu-tamu negara yang menginap di hotel miliknya, Trump International Hotel, di Washington, DC.

Sejak menjabat presiden, Trump berjanji tak lagi terlibat dalam urusan bisnisnya. Meski demikian, dia tak melepas saham-sahamnya di perusahaannya. Menurut John Mikhail, ahli hukum dari Georgetown University, hal ini membuat Trump tetap meraup keuntungan dari transaksi komersial perusahaannya dengan pemerintah asing. “Konstitusi melarang pejabat federal melakukannya tanpa persetujuan Kongres,” kata Mikhail, seperti dilaporkan *CNN*.

Keponakan Trump, Mary, juga mengajukan gugatan pada September lalu dan menuntut ganti rugi US$ 500 ribu atau sekitar Rp 7 miliar. Mary adalah penulis buku *Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man* yang terbit pada Juli lalu. Dalam buku ini, Mary menceritakan perjalanan keluarga dan karier Trump, termasuk masalah finansial dan dugaan penggelapan pajak yang dilakukannya.



Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Michael Flynn saat berkampanye dalam Pemilu Presiden Amerika Serikat di Virginia, Amerika Serikat, September 2016. REUTERS/Miie Seager

Mary mengklaim memiliki warisan dari bisnis keluarganya setelah sang ayah, Fred Trump Jr., yang juga kakak tertua Trump, meninggal pada 1981. Saat itu, Mary baru berusia 16 tahun. Mary menuding Trump dan saudara-saudaranya mencuri hak warisannya. "Alih-alih melindungi Mary, mereka merancang skema untuk mencuri dananya, menutupi kecurangan itu, dan menipu Mary ihwal nilai warisannya," demikian isi gugatan Mary soal kelakuan Trump dan saudara-saudaranya.

Gugatan pencemaran nama yang diajukan E. Jean Carroll terhadap Trump juga masih berjalan. Carroll menyatakan Trump telah memperkosanya di ruang ganti pusat belanja di Manhattan pada 1990-an. Sepekan sebelum pemilihan presiden digelar pada 3 November lalu, hakim federal di New York, Lewis Kaplan, menolak permintaan Departemen Kehakiman untuk menghentikan gugatan Carroll.

Dalam opininya, Kaplan menyebut Trump bukan pegawai pemerintah. Kaplan juga menolak intervensi Departemen Kehakiman dalam kasus ini dengan alasan gugatan itu tak berhubungan dengan urusan resmi Amerika. Dengan demikian, gugatan pencemaran nama terhadap Trump secara pribadi bisa dilanjutkan. Para penyelidik bisa mengumpulkan bukti tambahan untuk kasus Carroll, termasuk memverifikasi biomolekul deoksiribonukleat (DNA) Trump di gaun yang dikenakan Carroll saat pemerkosaan terjadi.

Trump juga belum bebas dari gugatan pencemaran nama yang diajukan Summer Zervos pada 2017. Mantan kontestan "The Apprentice", acara televisi yang dulu dipandu Trump, itu juga menuntut Trump membayar uang ganti rugi sebesar US$

3.000 atau sekitar Rp 42 juta. Zervos menyebut Trump telah mencemarkan namanya karena menyebut dia berbohong setelah memberikan pernyataan publik pada Oktober 2016.

Saat itu, Zervos menyebut Trump melakukan pelecehan seksual saat membahas peluang kerja dalam pertemuan di sebuah hotel di Beverly Hills pada 2007. "Setelah acara selesai, Trump mengundang saya ke kamar hotel dengan dalih menawarkan pekerjaan. Dia ternyata punya maksud lain," ucap Zervos dalam salah satu surat elektronik yang dikirimnya ke *Fox News* pada 2015.

Trump tentu saja berusaha untuk menyetop kasus-kasus ini. Sebagai presiden, ia masih bisa berlindung di balik kekebalan hukum yang dimilikinya. "Argumentasi itu bakal lenyap setelah 20 Januari," tutur Barbara L. McQuade, profesor bidang hukum dari University of Michigan. "Begitu saatnya tiba, kita bisa mendapat temuan baru dan mungkin kasusnya bisa berjalan lagi."

GABRIEL WAHYU TITIYOGA (*CNN*, *REUTERS*, *WASHINGTON POST*, *THE NEW YORK TIMES*, *LOS ANGELES TIMES*, *THE INTERCEPT*)

Donald Trump Pemilu Amerika Amerika Serikat

Rencana Besar Israel dan AS di Timur Tengah yang Didukung UEA dan Hampir Disetujui Saudi



Perdana Menteri Israel, Banyamin Netanyahu memberikan sambutan dalam upacara pembukaan jalur udara Uni Emirat Arab dan Israel, di Ben Guiron, Tel Aviv, Israel, 26 November 2020. REUTERS/Emil Salman/Pool

- **Untuk pertama kalinya pesawat Israel diizinkan melintasi langit Arab Saudi. .**
- **Raja Salman disebut berseberangan dengan Putra Mahkota soal rencana Israel dan Amerika di Timur Tengah. 21657**
- **Kebijakan Joe Biden menentukan masa depan Timur Tengah. .**

PESAWAT dengan nomor penerbangan 6H 663 milik Israir Airlines, maskapai Israel, akhirnya berangkat sesuai dengan jadwal pada pukul 10 pagi dari Bandar Udara Ben Gurion, Tel Aviv, menuju Bandara Dubai, Uni Emirat Arab, Selasa, 1 Desember lalu. Penerbangan langsung pertama pesawat Israel ke negara Arab itu hampir batal karena Arab Saudi baru mengizinkan pesawat tersebut melintasi wilayah udaranya beberapa jam sebelum keberangkatan.

Pesawat yang mengangkut 166 penumpang Israel itu harus melintasi Saudi agar perjalanan ke Dubai menghabiskan waktu tiga setengah jam. Jalur lain memakan waktu lebih lama, sekitar tujuh jam, yang sangat tak mungkin ditempuh oleh maskapai penerbangan murah tersebut.

"Hari yang benar-benar meriah," kata Hagai Cnaan, kapten pesawat itu, dalam percakapan via telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seperti dikutip *The Times of Israel*. Netanyahu menyebut penerbangan ini sebagai buah perdamaian negerinya dengan Emirat pada pertengahan Agustus lalu. "Pendaratan Anda di Dubai terwujud berkat perjanjian perdamaian kita yang luar biasa dan akan ada lebih banyak (penerbangan) lagi," ucap Netanyahu.

Sepekan sebelumnya, pesawat dengan nomor penerbangan FZ1163 milik FlyDubai, maskapai Uni Emirat Arab, mendarat di Bandara Ben Gurion. "Ini saat yang bersejarah karena inilah penerbangan komersial pertama antara Dubai dan Israel," tutur Netanyahu saat itu. "Bukan dengan berbaris maju, kita malah terbang, dengan kecepatan luar biasa, menuju era baru yang sekarang jelas sedang mengubah Timur Tengah. Bagi saya, inilah perwujudan dari mimpi."

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjUxOjM0Il0
Awal November lalu, kabinet Israel juga telah meratifikasi kesepakatan pengecualian visa dengan Emirat, kesepakatan pertama negara Yahudi itu dengan negara Arab. Kesepakatan itu memudahkan warga Israel dan Emirat saling mengunjungi kedua negara. Sekitar 300 penerbangan yang mengangkut 50 ribu penumpang diperkirakan akan menempuh rute baru Tel Aviv-Dubai ini.

Penerbangan bersejarah ini tidak hanya melambangkan "normalisasi" hubungan Israel-Emirat, tapi juga antara Israel dan Arab Saudi. Selama ini Saudi dan Emirat menolak mengakui negara Israel. Saudi memang pernah berperang dengan Israel. Adapun Emirat, meski tak pernah berperang, masuk barisan negara Arab yang menentang Israel.

Penerbangan Israir terjadi tak lama seusai pertemuan rahasia di Neom, kota pantai Saudi di tepi Laut Merah, pada 22 November lalu. Dalam pertemuan itu hadir Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, dan Muhammad bin Salman, putra mahkota dan penguasa *de facto* Saudi. Ini pertemuan bersejarah pertama antara Israel dan Saudi.

Pemerintah Saudi, yang selama ini hanya bersedia mengakui Israel jika Palestina menjadi negara merdeka, membantah adanya pertemuan itu. Namun Israel dan sejumlah media Timur Tengah memastikannya. Menurut *Wall Street Journal*, Netanyahu dan Pompeo berharap pertemuan itu akan memuluskan jalan menuju pemulihan hubungan Israel-Saudi, tapi persamuhan ternyata berakhir tanpa

kesepakatan yang diharapkan. Penyebabnya, menurut *Fox News*, Raja Saudi Salman bin Abdulaziz menentang rencana tersebut, sementara putra mahkotanya, sebaliknya, mendukung.

Titik temu antara Amerika, Israel, dan negara-negara Arab adalah masalah bagi Iran. Bagi Amerika, nuklir Iran adalah ancaman serius bagi perimbangan kekuatan di Timur Tengah. Adapun Israel, Emirat, Bahrain, dan Saudi adalah musuh bebuyutan Iran dalam konteks yang berbeda. Iran adalah ancaman bagi Israel karena keberpihakan Teheran terhadap Palestina. Emirat, Bahrain, dan Saudi—semua dipimpin Sunni—berhadapan dengan Teheran, yang dipimpin Syiah. Mereka menuduh Iran mendukung gerakan kelompok Syiah yang merongrong ketiga negara tersebut meskipun Teheran membantahnya. “Sangatlah penting untuk menciptakan poros yang mengisolasi Iran,” ujar Menteri Urusan Permukiman Israel Tzachi Hanegbi kepada *Army Radio Israel*.

Perdamaian Israel dengan negara-negara Arab adalah bagian dari rencana besar Presiden Amerika Donald Trump untuk Timur Tengah. Otak di balik rencana dan lobi-lobi untuk mengegolkannya adalah tim yang dipimpin Jared Kushner, menantu Trump dan penasihat politik Timur Tengah. Rencana itu ditetapkan dalam dokumen yang disebut “The Trump Middle East Marshall Plan” pada 2019.

Rencana ini berfokus pada penyelesaian masalah Timur Tengah, termasuk politik dan terorisme, melalui perbaikan ekonomi. Trump menyiapkan dana US$ 50 miliar untuk membangun Tepi Barat dan Jalur Gaza serta negara-negara di sekitarnya. Perdamaian Israel dan Palestina kelak diwujudkan dengan pendirian negara Palestina, tapi tanpa angkatan bersenjata. Adapun wilayah Israel akan diperluas hingga mencakup seluruh Yerusalem, yang dianggap melanggar kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kushner telah berkeliling untuk melobi negara-negara Arab. Uni Emirat Arab akhirnya meneken perjanjian damai dengan Israel dengan berbagai konsesi, termasuk dukungan Amerika untuk pengembangan energi nuklir dan penguatan pertahanan. November lalu, Trump menyatakan Amerika akan mengirim 50 pesawat tempur siluman F-35 ke Emirat. Menurut Pompeo, penjualan itu bertujuan memuluskan upaya perdamaian di Timur Tengah dan mengikat hubungan Emirat dengan Israel. Bahrain dan Sudan belakangan turut meneken kesepakatan damai dengan Israel.



Pangeran Araba Saudi Muhammad bin Salman menemani penasihat politik Timur Tengah Donald Trump, Jared Kushner (tengah) dan Ivanka Trump, di Riyadh, Mei 2017. REUTERS/Jonathan Ernest

Di tengah berbagai kemajuan ini, angin politik Amerika berubah haluan. Trump kalah oleh Joe Biden dalam pemilihan Presiden Amerika pada 3 November lalu. Pangeran Muhammad bin Salman, yang pada mulanya menunjukkan dukungan terhadap rencana tersebut, belakangan tampak mundur selangkah. Menurut *Journal*, Salman menunda pemulihan hubungan Saudi dan Israel hingga Joe Biden dilantik sebagai presiden pada 20 Januari 2021.

Channel 13, media Israel, melaporkan bahwa Saudi mengajukan tiga syarat untuk perjanjian damai dengan Israel, yakni penerapan rencana pembelian senjata dari Amerika, pembersihan nama dalam kasus Jamal Khashoggi, serta komitmen Israel atas solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Selama ini, pembunuhan Khashoggi terus membayangi Pangeran Bin Salman, yang anak buahnya dijatuhi sanksi oleh Amerika dan Inggris karena diduga terlibat dalam pembunuhan brutal itu. Salman membantah kabar bahwa dia memerintahkan pembunuhan tersebut. Saudi telah mengadili sebelas orang dalam kasus ini.

Namun Amerika di bawah Biden diperkirakan kembali menekan Saudi. Biden menyatakan akan bersikap keras terhadap Saudi dalam hal pelanggaran hak asasi manusia, perang di Yaman, dan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Turki. Oktober lalu, politikus Partai Demokrat itu menyatakan Amerika akan “meninjau kembali hubungan” dengan Riyadh.

Selama kepemimpinan Trump, Saudi dan Israel mendapat dukungan kuat dari pemerintah Amerika, yang melakukan “tekanan maksimum” terhadap Iran. Trump bahkan mundur dari kesepakatan nuklir Iran, yang dulu diteken Barack

Obama. Biden, sebaliknya, menyatakan akan kembali bergabung dengan berbagai negara lain dalam kesepakatan nuklir Iran.

Menurut Howard Stoffer, guru besar madya bidang keamanan nasional di University of New Haven, Connecticut, Amerika, negosiasi antara Saudi dan Israel ini dapat dipandang dari dua perspektif. “Arab Saudi menginginkan kesepakatan terjadi sebelum Trump lengser karena tim Biden mungkin akan lebih kritis terhadap Saudi... atau Saudi menunggu hingga Biden dilantik untuk memperkuat hubungan dengan pemerintahan baru,” katanya kepada *Fox News*.

IWAN KURNIAWAN (*THE TIMES OF ISRAEL, FOX NEWS, CHANNEL 13*)

Israel Donald Trump Mohammad bin Salman Joe Biden Benjamin Netanyahu Amerika Serikat Arab Saudi

Temuan Kejahatan Perang Tentara Australia di Afganistan yang Mengguncang Negeri Kanguru



Anggota dari pasukan khusus Australia SAS, berlatih di Melbourne, Australia 2011. Reuters/File photo/Mick Tsikas

- **Laporan Brereton menemukan bahwa tentara Australia melakukan kejahatan perang di Afganistan. .**
- **Rencana pencabutan tanda jasa para tentara menuai kecaman. 21657**
- **Pemerintah membentuk Kantor Penyelidik Khusus untuk membawa kasus ini ke pengadilan sipil. .**

PANGLIMA Angkatan Bersenjata Australia (ADF) Jenderal Angus Campbell di bawah tekanan banyak pihak menyusul rekomendasinya untuk mencabut medali kehormatan tiga ribu anggota pasukan khusus. Kebijakan itu merupakan respons Campbell atas terungkapnya kejahatan perang tentara Australia di Afganistan.

Sejumlah politikus mendesak pemerintah agar memecat Campbell. “Dia harus dipecat. Saya berharap dia tidak mengundurkan diri sehingga bisa dipecat,” kata

Robert Bellarmine Carl Katter, salah satu anggota parlemen yang menentang keputusan Campbell, pada Kamis, 3 Desember lalu.

Keputusan Campbell membuat gusar para tentara. Dua puluh dari 3.000 tentara itu telah meninggal dan keluarganya harus mengembalikan medali kehormatan tanpa punya kesempatan membersihkan nama. Para veteran perang juga memprotesnya. Veteran pasukan khusus bahkan membuat situs Voice of a Veteran untuk menggalang dukungan bagi sebuah petisi yang meminta pemerintah mempertahankan tanda jasa mereka guna “menjaga kenangan banyak orang kami yang berjasa”. Sebuah kampanye yang digalang para veteran melalui surat kabar dan radio Sydney juga mencoba meyakinkan pemerintah bahwa hukuman kolektif itu tidak adil untuk kasus yang pelaku sebenarnya hanya segelintir orang.

Keributan ini terjadi setelah Inspektur Jenderal ADF merilis laporan tim penyelidik pimpinan Mayor Jenderal Paul Brereton pada 19 November lalu. Brereton adalah perwira infanteri senior dan hakim pada Mahkamah Agung Negara Bagian New South Wales. Laporan yang dipublikasikan itu adalah versi suntingan dengan alasan legal, pribadi, dan keamanan.

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjUxOjM5Il0
Penyelidikan Brereton itu dipicu laporan sosiolog Samantha Crompvoets pada 2016. Crompvoets menyebutkan banyak rumor tentang kejahatan perang yang beredar di kalangan pasukan khusus yang bertugas di Afganistan. Crompvoets mencatat terjadinya pergeseran pandangan di kalangan prajurit dari “perilaku yang tak dapat diterima” menjadi kejahatan perang. Dia menggambarkan adanya kebanggaan sebagai prajurit “yang baik" atas kejahatan ini, “perlombaan membunuh", dan “haus darah". Ada pula perlakuan tak manusiawi terhadap tahanan dan upaya menutup-nutupi pembunuhan yang tak sah.

Crompvoets juga menuliskan sebuah insiden saat anggota Resimen Pasukan Khusus Angkatan Udara sedang berkendara di tengah jalan dan melihat anak-anak berusia 14 tahun yang mereka anggap sebagai simpatisan Taliban. “Mereka berhenti, menggeledah anak-anak itu, dan menggorok leher mereka," tulisnya. “Pasukan kemudian harus 'membersihkan kekacauan ini', termasuk mengarungi dan membuang mayat mereka ke sungai terdekat." Laporan itu tidak menyebutkan secara persis waktu dan tempat kejadian serta tidak pula mengidentifikasi pelaku ataupun unit yang terlibat.

Brereton dan timnya memeriksa lebih dari 20 ribu dokumen dan 25 ribu gambar. Mereka juga mewawancarai 423 saksi. Laporan setebal 465 halaman itu menemukan “informasi yang dapat dipertanggungjawabkan" bahwa tentara Australia telah membunuh 30 orang Afganistan secara tidak sah dan

"memperlakukan dengan buruk" dua lainnya. Mereka mengidentifikasi 25 tentara, baik sebagai pelaku maupun saksi, dan merekomendasikan 19 di antaranya diadili dalam kasus kejahatan perang.

"Tak ada satu pun dari insiden ini yang merupakan keputusan yang dapat diperdebatkan di bawah tekanan panasnya perang," ujar Brereton. "Kasus-kasus yang ditemukan ini adalah informasi yang kredibel tentang kejahatan perang yang menunjukkan dengan jelas bahwa orang yang dibunuh adalah nonkombatan atau kombatan yang menyerah." Laporan ini tak menyebutkan soal pembunuhan terhadap anak-anak 14 tahun yang ditemukan Crompvoets.

Tindakan mereka bermacam-macam. Dalam satu kasus, sejumlah tentara sengaja menaruh senjata atau peralatan militer asing, seperti pistol dan granat, di dekat mayat "musuh yang terbunuh dalam perang". Mereka memotretnya sebagai bukti bahwa korban membawa senjata ketika pertempuran terjadi.

Penyelidik juga mendapat kesaksian tentang tentara junior yang diperintah komandan patroli mereka untuk menembak seorang tahanan sebagai inisiasi pembunuhan pertama mereka. Hal ini biasanya terjadi ketika suatu tempat telah dikuasai dan penduduk lokal sudah diamankan. Cerita rekayasa kemudian dibuat untuk kepentingan laporan operasi dan menghindari pemeriksaan polisi militer. Semua yang terlibat dipaksa tutup mulut.

Tim Brereton tak menemukan bukti bahwa komandan pasukan, Markas Besar Gugus Tugas, atau Markas Besar Angkatan Bersenjata mengetahui ataupun abai terhadap kejahatan perang ini. Mereka juga tak melihat adanya kegagalan pada tingkat pimpinan dalam mengambil langkah yang praktis dan masuk akal untuk mencegah atau mendeteksi kejadian tersebut.

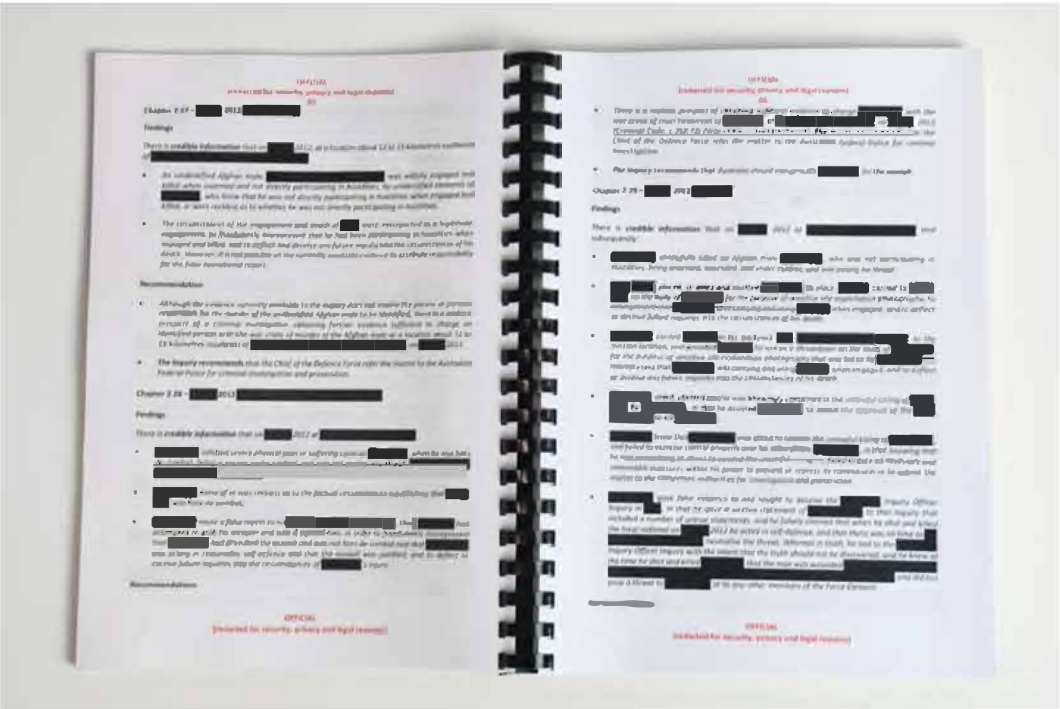
Namun Brereton menggarisbawahi bahwa ketidaktahuan itu tidaklah membebaskan para komandan dari semua tanggung jawab atas kejahatan anak buah mereka. Komandan secara tidak langsung berperan dalam perilaku kriminal ini dalam berbagai cara, misalnya dengan membersihkan atau memperindah laporan untuk menghindari munculnya kecurigaan dan tidak mempertanyakan atau menginterogasi prajurit di lapangan.

Tentara yang terlibat itu berasal dari unit paling elite dan terhormat, Resimen Pasukan Khusus Angkatan Udara (SAS), dan dua komandan resimen. Mereka bertugas dalam Kelompok Gugus Tugas Operasi Khusus yang ditempatkan di pangkalan militer Australia di Tarin Kowt, Provinsi Uruzgan, Afganistan, selama 2005-2013.

Brereton merekomendasikan para tentara yang terlibat diserahkan ke polisi federal dan diadili di pengadilan sipil ketimbang di pengadilan militer. Dia juga

menyarankan pemerintah memberikan kompensasi kepada keluarga orang Afganistan yang menjadi korban.

"Kejadian ini telah mencabik-cabik jantung reputasi militer Australia," tulis Michelle Grattan, jurnalis senior di Canberra. "Dia tidak menghancurkan reputasi itu, tapi usaha memulihkannya haruslah komprehensif dan, di atas segalanya, transparan."



Salah satu bagian yang diedut dalam laporan Inspektur Jendral Pasukan Pertahanan Australia saat berada di Afghanistan, di Canberra, Australia, 19 November 2020. REUTERS/Stringer

Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan Jenderal Angus Campbell berjanji memenuhi rekomendasi Brereton. Campbell memberikan kesempatan kepada tentara yang diduga terlibat dan masih aktif di militer untuk mengajukan alasan mengapa mereka tidak perlu dipecat. Campbell juga membubarkan satu dari empat skuadron SAS.

Morrison membentuk Kantor Penyelidik Khusus untuk menangani kasus ini. Kantor ini diisi penyelidik profesional dari kepolisian federal, ahli, dan penasihat hukum yang akan mengumpulkan bukti untuk diajukan kepada kejaksaan.

"Pemerintah Morrison perlu memastikan bahwa Kantor Penyelidik Khusus punya sumber daya yang memadai untuk bertindak cepat dalam menegakkan keadilan. Seiring dengan berjalannya waktu, prospek keadilan bagi orang Afganistan yang menjadi korban akan makin jauh," ucap Elaine Pearson, Direktur Human Rights Watch Australia. Organisasi hak asasi manusia itu juga mendesak pemerintah agar memastikan bahwa kantor ini independen dari aktor militer dan politik serta menyelidiki semua rantai komando yang terlibat dalam kejahatan itu.

Namun Morrison menolak rekomendasi Brereton mengenai kompensasi bagi orang Afganistan yang menjadi korban. Pemerintah juga berusaha mencegah pencabutan medali kehormatan dari para tentara.

Meskipun laporan itu menyingkirkan kemungkinan keterlibatan para petinggi militer, mantan Menteri Pertahanan, Joel Fitzgibbon, menyatakan tanggung jawab itu harus sampai ke atas. “Saya pikir orang-orang hingga rantai komando atas, di Komite Keamanan Nasional dan kabinet, harus mengambil sebagian tanggung jawab," katanya.

IWAN KURNIAWAN (*ABC, ASIA TIMES, NEWS.COM.AU*)

Kekerasan Militer Afganistan Australia

Perundingan Militer Myanmar dengan Pemberontak Arakan



Parade militer tentara Myanmar di iNaypidaw, Myanmar, Maret 2018. . Reuters/Soe Zeya Toen

MYANMAR

Perundingan Militer dengan Pemberontak Arakan

PARA pemimpin senior Tatmadaw—militer Myanmar—dan milisi pemberontak di Negara Bagian Rakhine, Tentara Arakan, bertemu dalam konferensi daring (*online*) pada akhir November lalu. Ini pertemuan pertama dua kekuatan bersenjata itu. Upaya Tatmadaw memerangi Arakan selama 2016-2017 turut menyebabkan 750 ribu warga Rohingya terpaksa mengungsi ke Bangladesh.

"Para pemimpin Tentara Arakan telah membahas tiga agenda bersama para pemimpin militer Myanmar," kata Khine Thukha, juru bicara Arakan, kepada *Radio Free Asia*, Rabu, 2 Desember lalu. Thukha tak menyebutkan siapa saja yang hadir dalam pertemuan itu. Tiga agenda itu adalah soal pemilihan umum, pasokan makanan dan obat-obatan ke Rakhine, serta upaya membangun kepercayaan di antara kedua pihak.

Pemilihan umum telah berlangsung pada 8 November lalu, tapi Rakhine menangguhkannya karena alasan keamanan. Liga Nasional untuk Demokrasi, partai politik pimpinan Aung San Suu Kyi, menang dalam pemilihan itu. Beberapa hari seusai pemilihan, Tatmadaw mengumumkan pembentukan Komisi Perundingan Damai yang bertugas berunding dengan para pemberontak.

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjUxOjQ1Il0

CINA

Pengadilan Kasus Perundungan Pemandu Acara TV Dimulai

PENGADILAN Rakyat Distrik Haidian di Beijing mulai menyidangkan kasus dugaan perundungan seksual yang dilakukan seorang pemandu acara televisi Cina pada Rabu, 2 Desember lalu. Para analis menyebut sidang ini sebagai momentum yang menentukan masa depan gerakan #MeToo negara itu.

Sidang digelar setelah Zhou Xiaoxuan, penulis skenario muda yang dikenal warganet sebagai Xianzi, mengajukan gugatan atas perundungan yang dialaminya pada 2014. Saat itu ia magang di stasiun televisi *CCTV* dan Zhu Jun, salah satu *host* terkenal, merundungnya secara seksual. Zhu Jun membantah tuduhan tersebut dan balik menggugatnya.

Pengakuan Xianzi pertama kali muncul dalam sebuah tulisan pada 2018. Dia menulisnya setelah mendengar kasus perundungan oleh produser Hollywood, Harvey Weinstein, yang memicu gerakan #MeToo di Amerika Serikat. Hukum Cina melarang perundungan seksual, tapi hingga kini tak ada definisi hukum yang jelas mengenai hal tersebut.

Menjelang sidang tertutup itu, Xianzi menyatakan bahwa apa pun yang terjadi, dia tidak akan menyesal. “Jika saya menang, ini akan mendorong banyak perempuan untuk maju dan menceritakan kisah mereka; jika kalah, saya akan terus mengupayakan banding sampai keadilan ditegakkan,” ucapnya kepada *BBC*.

HONG KONG

Taipan Media Jimmy Lai Ditahan



Jimmy Lai Chee-ying pendiri Apple Daily di Hong Kong, Cina, 2 Desember 2020.

REUTERS/Lam Yik

JIMMY Lai, taipan media dan pendukung gerakan demokrasi di Hong Kong, didakwa melakukan penipuan dan ditahan sampai sidang pengadilan pada April tahun depan. Dia ditahan pada Kamis, 3 Desember lalu, setelah pengadilan menolak uang jaminan atas kasusnya. Hal ini terjadi sehari setelah aktivis Joshua Wong, Ivan Lam, dan Agnes Chow ditahan karena terlibat unjuk rasa pada tahun lalu. Sementara itu, Ted Hui, bekas anggota parlemen pendukung gerakan demokrasi, mengaku sedang mengasingkan diri ke Denmark.

Lai ditangkap berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional pada awal tahun ini, tapi kemudian dibebaskan dengan uang jaminan. Pemerintah Cina mengatakan undang-undang baru itu dibuat untuk menegakkan stabilitas di kota tersebut, tapi para aktivis menyebutnya telah membungkam kebebasan pendapat.

Lai adalah pemilik *Apple Daily*, tabloid terkenal di negeri itu. Dia sudah lama dikenal sebagai pendukung gerakan demokrasi. Dia menyatakan tak akan menyerah terhadap intimidasi yang diterimanya sekarang. “Satu-satunya cara mengalahkan intimidasi adalah menghadapi rasa takut dan jangan biarkan hal itu membuat Anda takut,” tuturnya kepada *BBC* sebelum ditangkap.

Cina Hong Kong Myanmar Rohingya

Memanfaatkan Lahan Sempit di Rumah

Kegiatan berkebun di rumah menjamur selama masa pandemi.



Sejumlah anak belajar menanam bibit pohon saat berkebun di Padepokan Restu Bumi, Ciracas, Jakarta Timur, 21 November 2020. Antara/Asprilla Dwi Adha

SELAMA masa pandemi, Hanan punya hobi baru: bercocok tanam. Dia memanfaatkan pekarangan seluas 10 meter persegi di rumahnya untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Ia menanam sayur-sayuran dan tanaman yang sedang tren saat ini, seperti aglonema, monstera, dan janda bolong.

Hanan mengaku belajar dari media sosial tentang cara bercocok tanam sejak awal masa pandemi. Dia juga aktif dalam grup para pemula yang sedang belajar bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan terbatas di kota. “Saya juga bertanya kepada pedagang tanaman hias bagaimana merawat tanaman hias yang sedang tren,” tuturnya.

Dari kegiatan berkebun di lahan terbatas, kini kebutuhan sayuran, seperti tomat, cabai, dan bayam, bisa dipenuhi dari pekarangan rumahnya. Hanan juga membagikan hasil berkebun kepada para tetangga dan teman. “Tiap kali panen bisa memenuhi kebutuhan sayuran seminggu,” ucapnya.

Badan Pusat Statistik mencatat, dari semua sektor usaha yang terkena dampak pandemi, hanya sektor pertanian yang masih mencatatkan hasil positif. Selama

kuartal kedua tahun ini, pertanian tumbuh 16,24 persen dan 2,15 persen pada kuartal ketiga.

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjU0OjEzIl0
Penggerak bertani yang juga Sekretaris Kelompok Tani Sejahtera Makmur, Ahmad Fahrizal, mengatakan selama sembilan bulan masa pagebluk permintaan bibit pohon alpukat Cipedak melonjak. “Permintaan dari seluruh Indonesia,” ujarnya dalam acara Ngobrol Tempo bertajuk Berkebun Selama Pandemi, Kamis, 4 Desember lalu.

Ahmad mengatakan memproduksi bibit alpukat Cipedak sebanyak 2.000 pohon per bulan. Bibit yang diproduksi cepat terserap oleh pasar. “Entah mengapa teman-teman yang menanam alpukat Cipedak tambah banyak pada masa pandemi ini,” ujarnya.

Penanggung jawab Gang Hijau Asmat Jakarta, Latifah, mengatakan kegiatan bertani di lahan terbatas kini makin digemari masyarakat. Selain bermanfaat untuk konsumsi keluarga, hasil bertanam mendatangkan penghasilan. “Kegiatan menanam punya nilai tambah bagi anggota,” tuturnya.

Latifah menceritakan kegiatan berkebun di rumah digagas pada 2017. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta. Bersama warga, dia menerapkan teknik hidroponik. “Awalnya saya sendiri, kemudian masyarakat terinspirasi dan ikut bergabung.”

Dia menuturkan kegiatan berkebun di rumah membuat orang tetap produktif selama masa pandemi Covid-19. Hasil panen dari kebun dapat dikonsumsi untuk kebutuhan pangan sehari-hari dan tanamannya pun membuat udara lebih segar. “Lingkungan hijau otomatis membuat kualitas udara lebih baik dan enak dipandang,” ucapnya.

Bersama warga, Latifah dapat memanen berbagai jenis sayuran sebanyak 150 kilogram per bulan. Selama pandemi, tingkat permintaan melonjak 100 persen dari biasanya. Pemasaran hasil panen, dia menambahkan, dilakukan secara daring.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati telah menyiapkan program strategis untuk mengajak masyarakat berkebun di lahan terbatas. Menurut dia, bertani di kota besar kini tidak memerlukan cangkul atau area becek. “Bercocok tanam di kota cukup dengan memanfaatkan teknologi, seperti hidroponik dan teknologi tetes dalam pengairannya,” tuturnya.

Menurut Suharini, pemerintah DKI kerap menggelar edukasi secara virtual kepada masyarakat. “Bukan berarti pandemi tidak melakukan apa pun, tapi bisa

dimulai dengan memanfaatkan lahan yang ada di rumah," ucapnya.

Pemerintah DKI berencana membangun enam kebun agroeduwisata sebagai tempat edukasi sekaligus hiburan warga. Di tempat ini, nantinya masyarakat akan diajak untuk belajar sekaligus berwisata tentang pentingnya pertanian.

Adapun penyuluh pertanian Jakarta Barat, Ghausal Akbar, mengakui tren masyarakat berkebun di rumah meningkat selama masa pandemi. Berkebun di rumah bisa dilakukan walau hanya dengan lahan seluas satu meter persegi. "Tidak harus punya lahan luas," tuturnya.

Akbar menjelaskan ada beberapa teknik yang dapat diterapkan ketika berkebun di lahan yang terbatas. Pertama, kata dia, warga dapat menerapkan metode budi daya tanaman buah dalam pot. Selanjutnya, warga juga dapat menggunakan metode hidroponik dengan memanfaatkan wadah penampung air dan pipa-pipa. Kemajuan teknologi pertanian membuat kita tak perlu berkotor-kotor saat bercocok tanam.

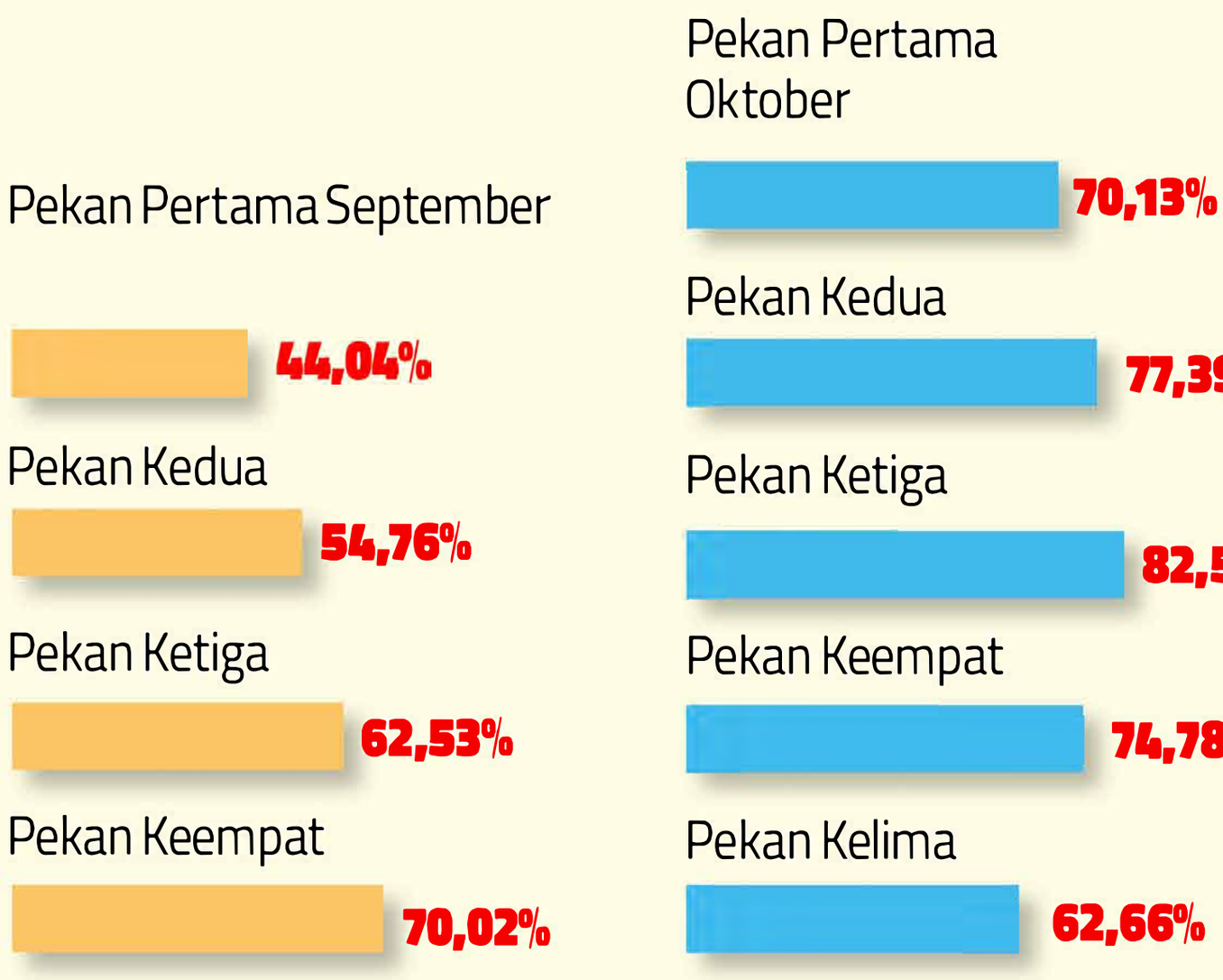
EKO WAHYUDI, ALI NUR YASIN

#JagaJarak #PakaiMasker #CuciTangan Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

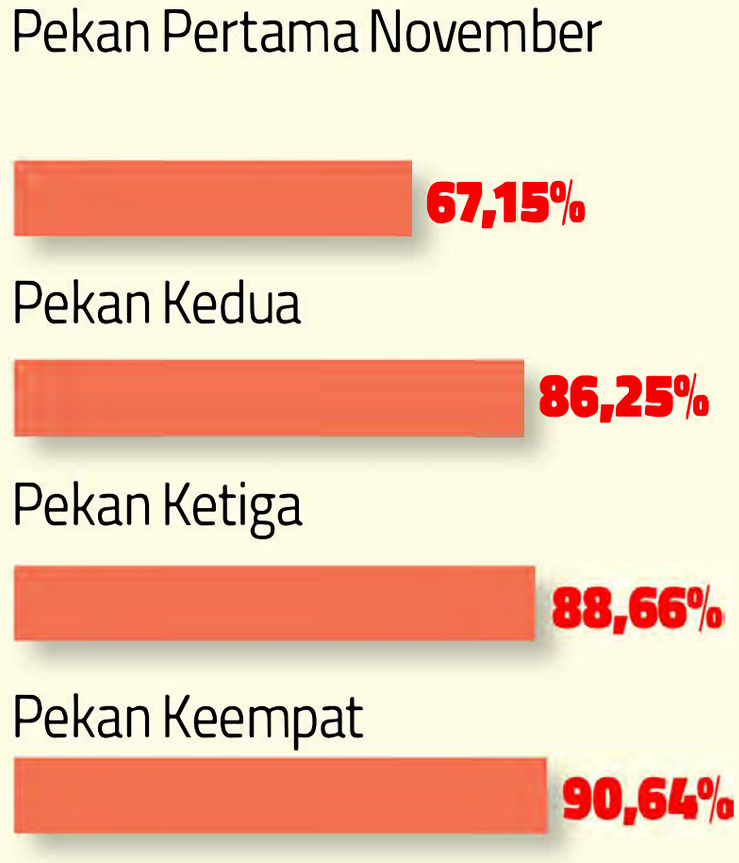
Melonjak

PEMERIKSAAN rata-rata orang per hari yang dilakukan pemerintah sudah mendekati standar minimum Badan Kesehatan Dunia (WHO). Dewi Nur Aisyah, dari tim pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19, mengatakan tolok ukur progres pemeriksaan virus corona adalah jumlah minimum orang yang diperiksa dalam seminggu. Kapasitas pengujian Indonesia per akhir November sudah mencapai 90,64 persen. Jika disesuaikan dengan populasi Indonesia yang sebanyak 267 juta jiwa, diperlukan pemeriksaan polymerase chain reaction terhadap 267 ribu orang per minggu.

Pemeriksaan Mingguan dalam Tiga Bulan Sesuai dengan Standar WHO



Jumlah Laboratorium Pemeriksaan Covid-19 di seluruh Indonesia : 466



***catatan:** dengan asumsi penduduk Indonesia 267 juta jiwa, berdasarkan target WHO, dilakukan pemeriksaan PCR Covid-19 kepada 267 ribu orang per pekan.

Kendala Testing di Indonesia

➜ **Sebaran laboratorium tidak merata**
Hingga saat ini ada 466 laboratorium yang dapat memeriksa sampel Covid-199. Sebaran laboratoriumnya tak merata dan hanya provinsi besar yang memiliki sebaran yang cukup banyak, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

➜ **Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM yang mumpuni dalam testing penyakit menular**

➜ **Komitmen SDM dan laboratorium yang berbeda**
Dari jumlah pemeriksaan spesimen dan orang per hari, dapat terlihat jumlah tes cenderung menurun pada saat akhir pekan, seperti Sabtu dan Minggu. Sebab, sebagian petugas laboratorium libur atau tidak melakukan perawatan.

➜ **Kapasitas tracing mempengaruhi jumlah sampel**

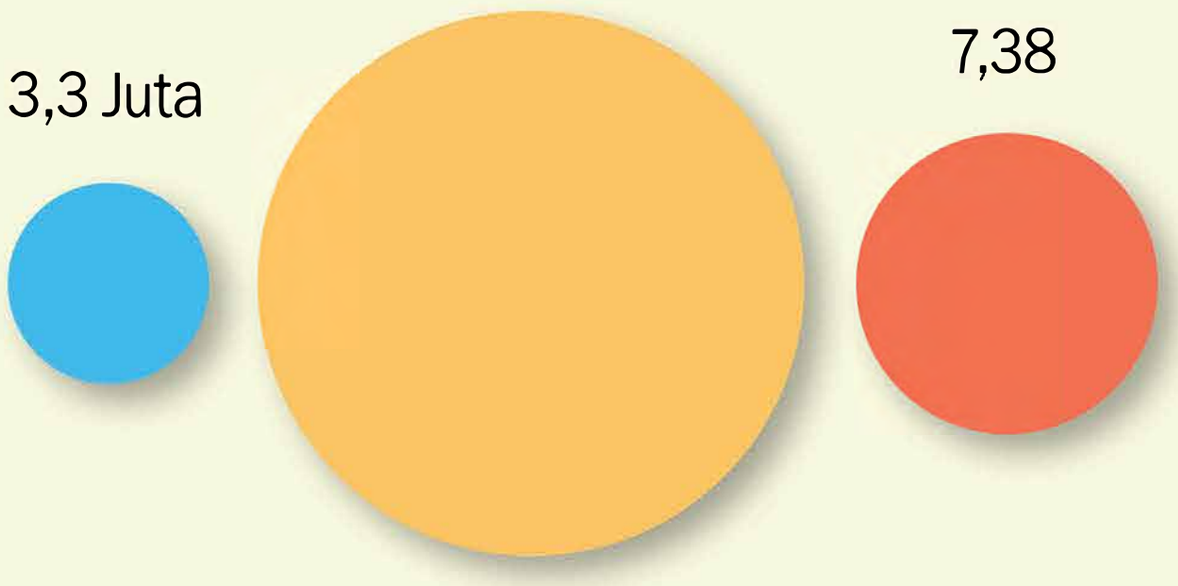
➜ **Peralatan laboratorium di Indonesia bervariasi**

Sumber: Satgas Penanganan Covid-19

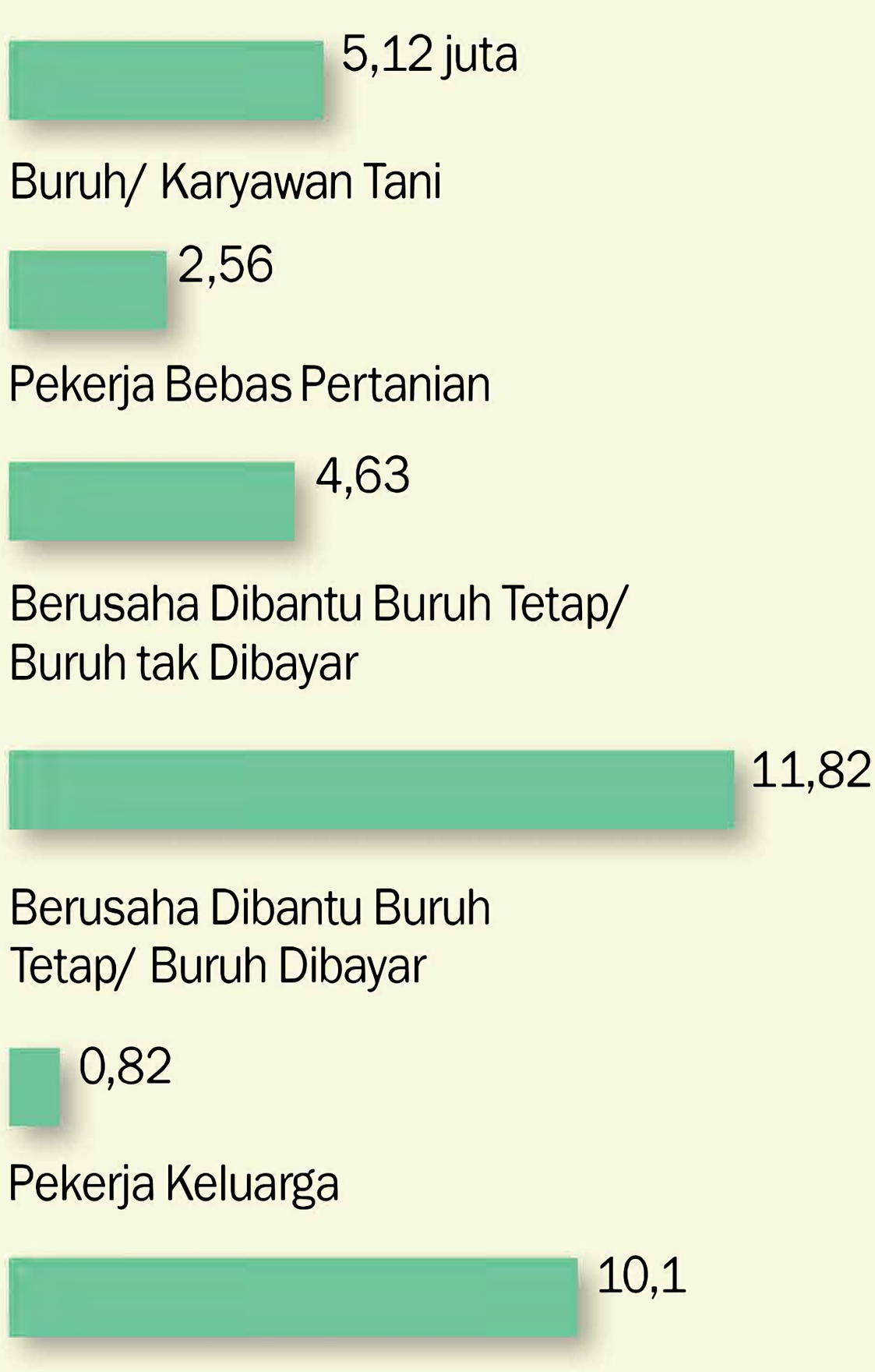
Puluhan Juta Bertani

BERKEBUN di rumah menjadi kegiatan paling digemari selama masa pandemi. Selain mengisi kegiatan di rumah, berkebun bisa menghasilkan sayuran sehat yang bisa dikonsumsi sendiri. Membuat bahan masakan yang digunakan menjadi lebih sehat.

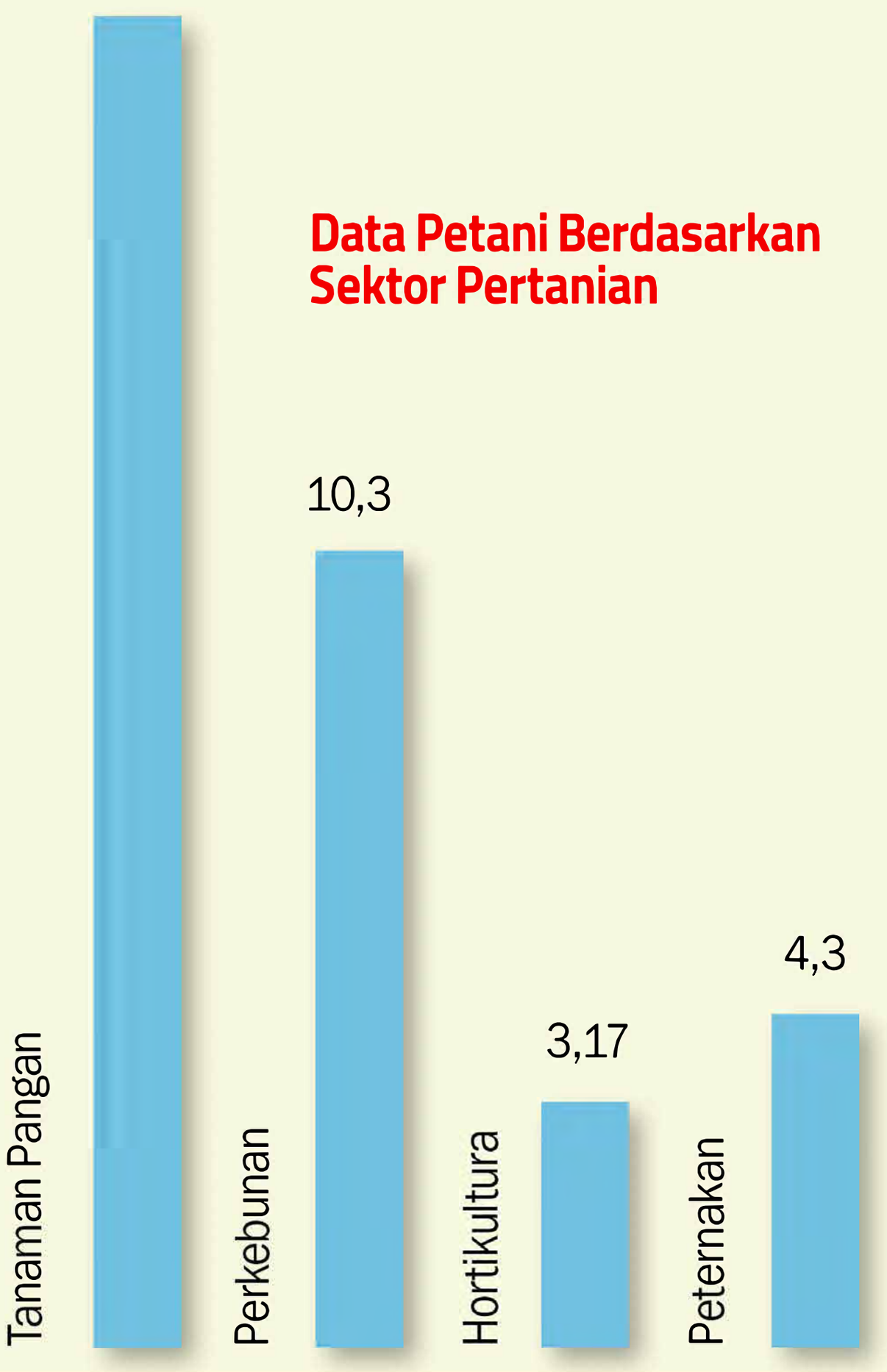
Data Petani di Seluruh Indonesia Berdasarkan Klasifikasi Umur



Data Petani Berdasarkan Status Pekerjaan Utama



Data Petani Berdasarkan Sektor Pertanian



Tip Bertani di Lahan Sempit

- Bersihkan area pekarangan lebih dulu. Pastikan ketersediaan pasokan air dan sinar matahari memadai.
- Pilih tanaman yang banyak disukai masyarakat, seperti sayuran bayam, kangkung, dan sawi.
- Pilih tanaman yang mudah dirawat, seperti cabai, tomat dan bayam.
- Maksimalkan ruang pekarangan dengan mengaplikasikan tanaman dalam pot atau hidroponik memakai susunan pipa-pipa.
- Manfaatkan aneka pupuk organik, bisa membuat sendiri dari sampah organik rumah tangga.
- Jika kebutuhan sayur keluarga telah terpenuhi, kelebihan hasil panen kebul dapat dijual.

Sumber : Kementerian Pertanian Tahun 2020

Cegah Lonjakan Angka Covid-19 di Akhir Tahun: Kembali ke 3M



Polisi memantau penerapan protokol kesehatan di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 29 November 2020. Antara/Aji Styawan

JUMLAH kasus Covid-19 di Indonesia tiap hari terus bertambah. Pada Kamis, 3 Desember lalu, pertambahan angka penderita penyakit yang diakibatkan oleh virus *corona* ini mencapai rekor baru, yakni 8.369 kasus positif. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan ada dua penyebab lonjakan jumlah kasus harian. Pertama, tingkat infeksi Covid-19 masih tinggi. Kedua, kendala sinkronisasi data antara Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan di setiap daerah.

“Jadi, ada beberapa daerah yang kesulitan memasukkan datanya sehingga terakumulasi. Salah satu contohnya Papua yang sejak 19 November sampai kemarin (Kamis, 3 Desember lalu) baru memasukkan datanya,” ucap Wiku, akhir pekan lalu.

Tiga daerah menjadi penyumbang terbanyak kasus positif, yakni di atas 1.000 orang. Ketiga daerah itu adalah Papua, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Adapun Papua mencatat penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 1.755 orang. Sementara itu, sebanyak 102 orang sembuh dan satu meninggal. Di urutan kedua, Jawa Barat dilaporkan memiliki penambahan kasus terkonfirmasi sebanyak 1.648 orang. Kasus sembuh bertambah 253 orang dan 21 orang meninggal. Selanjutnya, angka kasus positif di DKI Jakarta bertambah 1.153 orang. Kasus sembuh bertambah 973 orang dan 26 orang meninggal. Kasus harian nasional didapat dari hasil pemeriksaan adalah 62.397 spesimen.

Selain dua faktor itu, Wiku menambahkan, libur panjang menjadi salah satu penyebab penambahan angka kasus Covid-19 di Indonesia. Dari tiga libur panjang selama masa pandemi, semuanya menyebabkan kenaikan jumlah kasus. Adapun tiga libur panjang yang sudah dilewati adalah libur hari raya Idul Fitri, libur hari Kemerdekaan RI, dan libur panjang 28 Oktober 2020 hingga 1 November 2020.

“Semua itu menimbulkan kenaikan angka kasus pada 10-14 hari kemudian dan bisa bertahan satu sampai dua minggu selanjutnya,” tutur Wiku. “Kenaikan bisa 50-100 persen. Selalu polanya seperti itu dan makin ke sini naiknya semakin menggila.”

Selain sistem, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pun menurun. Hasil studi menyatakan minimal 75 persen masyarakat harus patuh memakai masker untuk menekan laju angka kasus Covid-19. Namun data teranyar Satgas Covid-19 menunjukkan persentase kepatuhan masyarakat memakai masker hanya 59,2 persen. Lalu, tren kepatuhan menjaga jarak hanya 42,5 persen.

“Jika terus seperti ini, fasilitas kesehatan sebanyak apa pun tidak akan cukup untuk menampung lonjakan kasus,” ujar Wiku.

Wiku mengingatkan pentingnya protokol kesehatan diterapkan. Kendati demikian, dia mengakui, belum semua orang memahami dan melakukannya. Banyak warga yang belum menjalankan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci muka, dan menjaga jarak.

Berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya bersama Laporcovid19.org, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengungkapkan 19 persen warganya percaya Covid-19 merupakan teori konspirasi. Adapun 29 persen warga Bogor percaya virus *corona* nyata. “Lima puluh persen warga Bogor berada pada kategori percaya dan tidak terhadap Covid-19,” tuturnya.

Menurut Bima Arya, warga Bogor percaya Covid-19 berdasarkan informasi dari empat sumber, yakni dokter, tokoh agama, pejabat, dan artis. “Ini yang bahaya. Kalau dalam politik ini namanya *swing voters*,” ujarnya.

Menurut Bima, pola komunikasi dan sosialisasi ihwal pandemi kepada masyarakat harus diperbaiki. Sebab, bukan hanya masyarakat yang tak memahami Covid-19, berbagai fasilitas kesehatan di Kota Bogor pun demikian. “Tidak semua rumah sakit dan fasilitas kesehatan paham mereka harus lapor. Masih tidak jelas antara apa yang harus dilakukan dan tidak. Kedua, kita bicara kepatuhan, kapan tarik-ulur itu penting,” ujarnya.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta semua kepala daerah tidak mengizinkan warga berkumpul dalam jumlah besar. Hal ini menyusul naiknya angka terkonfirmasi positif Covid-19 yang melambung. Dia meminta pemerintah daerah menambah fasilitas isolasi terpusat, terutama di Tabanan, Bali.

Pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, mengatakan keputusan pemerintah memangkas cuti bersama sangat efektif mengurangi potensi lonjakan angka kasus Covid-19. Pemerintah memangkas cuti bersama tiga hari, yaitu pada 28 hingga 30 Desember 2020. “Bagus dan efektif untuk mengurangi jumlah kasus, tidak akan setinggi kalau tidak dikurangi,” tuturnya.

Cuti bersama akan memberikan peluang bagi orang-orang untuk bepergian, berekreasi, dan berkumpul. Menurut Hasbullah, seharusnya cuti bersama ditiadakan untuk menekan penyebaran virus SARS-CoV-2.

Secara ekonomi, Hasbullah menambahkan, cuti bersama yang bisa mendorong masyarakat untuk bepergian dan berekreasi memang baik. Tapi potensi kerumunan yang muncul bisa berdampak terhadap kesehatan hingga membahayakan nyawa. “Karena itu, harus dijaga. Jangan cuma untuk kepentingan ekonomi. Kesehatan harus yang utama,” ucapnya.

EKO WAHYUDI | CAESAR AKBAR | ALI NUR YASIN

#JagaJarak #PakaiMasker #CuciTangan Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

GUNUNG API

SEPANJANG November hingga awal Desember 2020, empat gunung api Indonesia meletus, dari Gunung Merapi di Jawa Tengah, Sinabung di Sumatera Utara, Ile Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, hingga Semeru di Jawa Timur. Sebagai negara di peringkat ketiga yang memiliki gunung api paling aktif, Indonesia rawan terkena bencana akibat letusannya.

56%

cagar biosfer berada di kawasan gunung

1.900 GUNUNG API AKTIF DI DUNIA



1.250 DERAJAT CELSIUS, PANAS YANG BISA DIHASILKAN ALIRAN LAVA

1-18 TAHUN, MASA ISTIRAHAT GUNUNG MERAPI, GUNUNG PALING AKTIF DI INDONESIA

7.000 kilometer, jalur gunung api



4,5 JUTA PENDUDUK TINGGAL DI DAERAH RAWAN BENCANA GUNUNG API



Gunung api di Indonesia

- 79 gunung api aktif tipe A *(sejarah letusan sejak 1600)*
- 29 gunung api aktif tipe B *(sejarah letusan sebelum 1600)*
- 21 gunung api aktif tipe C *(tidak memiliki sejarah letusan, tapi punya jejak aktivitas vulkanis)*

60-80%

AIR BERSIH BERASAL DARI PEGUNUNGAN

353 ORANG MENINGGAL AKIBAT LETUSAN MERAPI PADA 2010

71 RIBU ORANG MENINGGAL AKIBAT LETUSAN TAMBORA PADA 1815

¼ POPULASI HEWAN DAN TUMBUHAN DARAT HIDUP DI KAWASAN GUNUNG

SUMBER: PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, VOLCANOES.USGS.GOV

Terapi Okigen Hiperbarik Ternyata Bisa Meremajakan Sel dan Mencegah Penuaan



Terapi hyperbaric oksigen. Shutterstock

- **Peneliti di Tel Aviv menemukan terapi oksigen hiperbarik bisa meremajakan sel darah. .**
- **Terapi oksigen hiperbarik ini awalnya dipakai untuk mengobati penyakit dekompresi. 21657**
- **Di Indonesia, terapi ini banyak dipakai untuk mengobati penyakit seperti luka gangren penderita diabetes. .**

MENCEGAH penuaan adalah impian banyak orang yang dicari dengan susah payah. Di tingkat sel, proses penuaan dapat dicirikan dari memendeknya telomer dan terhentinya pembelahan sel. Telomer adalah daerah pelindung yang terletak di kedua ujung kromosom. “Kini pemendekan telomer dianggap sebagai 'Cawan Suci' biologi penuaan,” kata Shai Efrati dari Sackler School of Medicine pada Tel Aviv University, Israel, seperti dirilis dalam situs universitas, 22 November lalu.

Shai Efrati memakai istilah Cawan Suci (Holy Grail)—cawan yang diyakini digunakan Yesus dalam Perjamuan Terakhir yang dicari oleh para kesatria selama Abad Pertengahan—karena begitu diinginkan tapi sangat sulit ditemukan. Penelitian Efrati dan timnya selama bertahun-tahun terhadap terapi oksigen hiperbarik akhirnya mengungkap terapi itu tidak hanya bisa menghentikan penuaan sel darah, tapi juga dapat membalikkan proses alias meremajakannya. "Temuan ini membuka pintu untuk penelitian lanjutan tentang dampak terapi oksigen hiperbarik untuk membalikkan proses penuaan," ujar Efrati.

Para peneliti dan dokter di Indonesia yang meneliti dan menerapkan terapi oksigen hiperbarik menilai studi awal tim Efrati itu sebagai upaya bagus meski tak sepenuhnya baru. "Itu gebrakan dan bagus," tutur Mayor Laut Titut Harnanik, dokter di Lembaga Kesehatan Kelautan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, di Surabaya, Kamis, 3 Desember lalu. Dia menambahkan, penelitian serupa sebenarnya pernah dilakukan di Indonesia untuk melihat dampak terapi terhadap regenerasi sel. "Namun yang diukur dampaknya pada kolagen. Kalau telomer belum."

Tim Efrati menerbitkan hasil penelitian itu dalam jurnal *Aging* pada 18 November lalu. Dalam studi yang dikerjakan bersama Shamir Medical Center di Israel itu, sebanyak 35 orang sehat berusia 64 tahun atau lebih diminta mengikuti 60 sesi terapi oksigen hiperbarik selama 90 hari. Setiap peserta memberikan sampel darah sebelum, selama, dan pada akhir perawatan. Hasilnya, terapi itu membalikkan proses penuaan dalam dua aspek utama: telomer tumbuh lebih panjang dengan kecepatan 20-38 persen dan persentase sel-sel tua dalam populasi sel secara keseluruhan berkurang 11-37 persen.

Terapi oksigen hiperbarik, menurut Titut, pada prinsipnya adalah menggunakan efek pemberian oksigen dalam kadar dan tekanan udara tertentu. Di alam bebas, jumlah oksigen sekitar 22 persen. Selebihnya adalah nitrogen, argon, helium, dan lain-lain. Dalam terapi oksigen hiperbarik, pasien diberi oksigen 100 persen dengan tekanan 2,4 ATA (total tekanan di sekitar) di dalam *chamber* atau ruang kedap udara. Efeknya sama dengan diselamkan. "Harapannya, dengan diselamkan, molekul oksigennya mengecil sehingga gampang terdifusi, menerobos sampai seluruh sel," katanya.

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjU3OjE5Il0

Kolonel Laut Tjahja Nurrobi, ahli terapi oksigen hiperbarik, menyebutkan menghirup oksigen di lingkungan atmosfer berbeda dengan dalam kondisi tekanan udara tertentu. Pada tekanan yang tinggi, gas itu bisa larut dengan mudah dalam cairan. "Sama dengan kalau menghirup oksigen di bawah permukaan laut,

oksigen akan cepat larut dalam darah," ujar dokter di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dokter Mintohardjo, Jakarta, tersebut, Selasa, 1 Desember lalu. "Kalau oksigen cepat larut dalam darah, artinya cepat juga ditransfer ke dalam sel untuk metabolisme sel," tutur Tjahja, yang kini menjabat Kepala Sekretariat Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Jakarta.

Di Indonesia, Tjahja menambahkan, yang banyak memiliki *chamber* untuk terapi oksigen hiperbarik adalah rumah sakit Angkatan Laut dan fasilitas kesehatan di pertambangan lepas pantai. Sebab, awalnya ruang tersebut dipakai untuk mengobati penyakit dekompresi akibat penyelaman. Manusia sebaiknya tidak langsung naik ke permukaan secara cepat atau mendadak karena bisa menyebabkan oksigen dalam darah menjadi gelembung-gelembung gas atau terjadi emboli. Bahayanya, emboli dapat membuat pembuluh darah kecil tersumbat. "Kalau menyumbat di otak, gejalanya sama dengan *stroke*. Kalau di jantung sama dengan serangan jantung. Kalau menyumbat di paru-paru, tiba-tiba sesak napas."

Setelah itu, Tjahja melanjutkan, pemanfaatan *chamber* tersebut berkembang ke arah pengobatan, di antaranya untuk kasus keracunan karbon monoksida, luka infeksi gangren karena diabetes, infeksi di tulang, dan luka bakar. "Kalau gangren itu kan karena infeksi kuman-kuman anaerob yang tidak suka oksigen. Begitu diberi oksigen, kumannya mati. Jadi oksigen itu berfungsi sebagai antibiotik," ujar Tjahja. Belakangan, terapi oksigen hiperbarik juga dipakai untuk perawatan kecantikan dan kebugaran.

Arif Rahman Nurdianto, peneliti terapi oksigen hiperbarik, mengatakan pemakaian terapi tersebut kini sangat banyak. Dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Hiperbarik Indonesia ini telah melakukan penelitian mengenai dampak terapi tersebut antara lain dalam penyembuhan infeksi HIV dan malaria. "Tapi penggunaannya saat ini banyak pada pasien dengan *stroke* karena perlu pemulihan yang bagus," ucap pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rumah Sakit Anwar Medika, Sidoarjo, Jawa Timur, tersebut, Selasa, 1 Desember lalu.

Untuk disertasi doktoral, Arif Rahman meneliti terapi oksigen hiperbarik dan dampaknya terhadap toksoplasmosis pada kehamilan. Penelitian itu dimulai pada 2018 dan rampung tahun ini. Ia meneliti tikus yang diinfeksi parasit *Toxoplasma* dan diterapi oksigen hiperbarik sepuluh kali. Hasilnya, tikus itu bisa terhindar dari keguguran. Namun, ia menambahkan, karena terapi tersebut masih tergolong baru, masih ada riset lanjutan yang perlu dilakukan. Seusai pengujian terhadap hewan ini, tahap berikutnya adalah uji praklinis, lalu uji klinis. "Kayak vaksin prosesnya," katanya.

Berdasarkan pengalaman selama ini, Arif menjelaskan, efek penyegaran atau anti-penuaan ini sebenarnya bisa dilihat dari efek sekunder terapi oksigen hiperbarik. Dari pengamatannya terhadap orang-orang yang mengikuti terapi di Lembaga Kesehatan Kelautan TNI AL, terdapat efek lain, yaitu kulit mereka yang sebelumnya keriput menjadi lebih bagus. “Terapi itu memicu kenaikan kolagen. Dia tampak lebih segar, lebih bugar,” ucap Arif, yang juga menjabat Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Trosobo, Taman, Sidoarjo.

Tjahja Nurrobi mengungkapkan, dia mempercayai temuan tim Shai Efrati bahwa terapi oksigen hiperbarik berdampak meremajakan sel. “Penyelam yang setiap hari menyelam menggunakan oksigen cenderung lebih awet muda dibanding mereka yang bukan penyelam. Sebab, dia menghirup oksigen dalam tekanan tinggi di bawah permukaan air laut.” Titut Harnanik menjelaskan, hal itu bisa terjadi karena oksigen hiperbarik mendorong kelahiran sel darah baru dan meningkatkan kadar antioksidan sehingga dapat menghambat pemendekan atau kerusakan telomer.

Titut mengetahui hal itu berdasarkan hasil penelitian para koleganya pada 2000-an. Mereka melakukan penelitian awal terhadap orang usia lanjut yang diminta mengikuti terapi oksigen hiperbarik lima kali berturut-turut. “Pada hari kelima terapi itu, antioksidannya tinggi, radikal bebasnya turun,” katanya. Sayangnya, waktu itu hasil penelitian tersebut tidak disimpan di Internet dan hanya masuk lemari perpustakaan sehingga tidak banyak diketahui publik.

Menurut Tjahja, terapi oksigen hiperbarik memang sudah mulai dipakai untuk kebugaran dan kecantikan. Namun pemakainya belum banyak. Tarif terapi itu juga lumayan mahal, Rp 300-500 ribu per terapi. Titut menambahkan, penelitian terhadap orang sehat, misalnya untuk kecantikan, belum umum. “Penelitian seperti itu bagi orang Indonesia mungkin dianggap belum penting. Sebab, penyakit lain (yang harus diteliti) masih banyak,” ucapnya.

ABDUL MANAN (*AGING, TEL AVIV UNIVERSITY, SCIENCE DAILY, EUREKALERT*)

Israel Bio Teknologi

Si-Monic, Pengawas Digital Pasien Covid



Si-Monic, Pengawas Digital Pasien Covid

JUMLAH kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah hingga lebih dari 500 ribu pada awal Desember ini. Di sejumlah daerah, pertambahan angka pasien positif ini menyebabkan rumah sakit hampir penuh. Mereka yang bergejala ringan atau tanpa gejala dikarantina di rumah. Problemnya adalah bagaimana pengawasan terhadap mereka? Tantangan inilah yang menginspirasi peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merintis alat yang berfungsi sebagai pengawas elektronik pasien Covid.

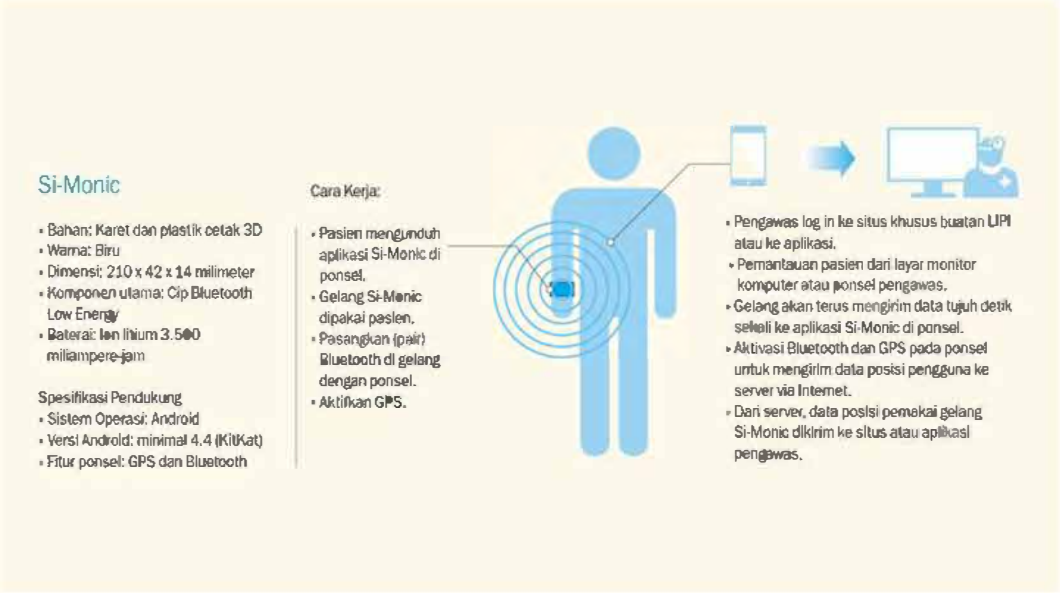
Alat itu bernama Smart Innovated Monitoring for COVID-19 alias Si-Monic. Pemanfaatan teknologi ini memang ditujukan untuk pasien yang terkonfirmasi positif serta punya riwayat kontak erat dengan pasien atau suspek Covid. “Ini produk yang bisa membantu proses karantina mandiri,” kata peneliti Galih Nugraha Nurkahfi mengenai inovasi tersebut, Selasa, 1 Desember lalu.

Galih memimpin tim dari LIPI Bandung yang beranggotakan 13 orang. Mereka berasal dari Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi, Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik, Pusat Penelitian Informatika, serta Balai Pengembangan Instrumentasi. Si-Monic sudah dirintis sejak Juni lalu.

Anggota tim, Mochamad Mardi Marta Dinata, mengatakan Si-Monic terdiri atas tiga bagian, yaitu gelang yang dipakai seperti jam tangan berwarna biru, aplikasi pada telepon seluler pintar berbasis Android, dan server penyimpan data. Dari hasil uji coba internal, gelang dan aplikasi itu beroperasi sesuai dengan rencana. Gelang Si-Monic bisa berfungsi sebagai pengawas untuk memantau pasien Covid-19 dari jarak jauh.

WyJnb3phbGkxQGNibi5uZXQuaWQiLCIyMDIwLTEyLTA2IDEwOjU3OjA5Il0
Sebagai pembeda antarpasien yang dipantau, tim memasukkan penanda berupa kode terenkripsi pada gelang. Namun kerahasiaan pasien tetap dijaga. “Kami tidak memasukkan data identitas pasien di gelang,” tutur Mardi, Selasa, 1 Desember lalu. Gelang Si-Monic dirancang tidak bisa dilepas selama 14 hari masa karantina mandiri. Adapun durasi baterainya teruji bisa tahan sampai sebulan lebih.

Tim juga memasang magnet khusus yang kuat agar gelang sulit dibongkar. Jika ada upaya paksa untuk melepasnya, akan muncul peringatan berupa notifikasi di perangkat pengguna dan sekaligus pengawas yang memantaunya. “Ada bunyi alarm peringatan dan teks (kepada pemakai) untuk mematuhi protokol kesehatan,” ucap Mardi.



Peringatan serupa akan diterapkan untuk aplikasi bagi masyarakat umum yang bukan pasien. Tujuannya adalah orang berhati-hati ketika berada di suatu wilayah yang di sekitarnya ada pasien yang memakai gelang Si-Monic.

Selain itu, tim membuat pagar virtual (*geo-fence*) di area rumah pasien dari peta digital. Jika gelang Si-Monic melampaui batas atau ke luar rumah, sistem seketika memunculkan notifikasi ke pengguna dan pengawas. Notifikasi lain muncul jika pemakai sengaja memutus hubungan gelang dengan ponsel. Jika tidak disengaja, kondisinya disebut *unknown*, yakni ketika ada gangguan komunikasi ponsel

dengan server lewat Internet, baterai ponsel habis, atau koneksi Bluetooth terputus tanpa sengaja.

Menurut Mardi, penerapan sistem Si-Monic ini bakal melibatkan banyak pihak. Di antaranya dokter, rumah sakit, otoritas daerah, serta ketua rukun tetangga untuk pengawasan pasien Covid-19. Nantinya perlu petugas khusus untuk membuka dan melepas gelang, memutuskan siapa yang menjadi pengawas, dan semacamnya. Mardi menambahkan, karena itulah tim LIPI perlu bersinergi dengan tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Si-Monic sejauh ini masih memerlukan penyempurnaan, seperti pembuatan aplikasi bagi pengawas, juga dalam hal bentuk dan bahan gelang. Menurut Mardi, tim lebih berfokus pada fungsi alat. Selebihnya diserahkan kepada industri yang akan memproduksinya secara massal. Purwarupa gelang Si-Monic dibuat dari plastik dengan mesin cetak tiga dimensi. Lapisan karet ditempelkan agar tak melukai kulit pemakai.

Purwarupa gelang Si-Monic memakai komponen yang banyak dijual di pasar. “Harga produksinya Rp 130-150 ribu,” ujar Mardi. Rencananya, alat itu tidak dijual untuk umum. Pemerintah akan memproduksinya untuk disebarkan ke rumah sakit. Gelang bisa dipakai ulang oleh pasien lain setelah disterilkan, diinjeksi data, dan dayanya diisi kembali.

Gelang ini memiliki potensi lain. Menurut Galih, Si-Monic bisa menjadi bagian dari manajemen rumah sakit untuk mewujudkan konsep “Smart Hospital”. Tujuannya adalah membuat pasien mematuhi aturan terkait dengan masalah kesehatan dan administrasi. “Dengan tidak pergi tanpa izin dokter, atau tidak membayar,” katanya.

Covid-19 Penemuan Baru | Inovasi